



**PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M. AP
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

SYAMSURI ARSYAD, S.AP, MA
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Tahun
2021





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat (3) bahwa Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan Pasal 70 Ayat (4) bahwa LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak di semua sektor. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pertanian, pariwisata dan UMKM serta industri. Sektor-sektor inilah yang salah satunya menjadi *point policy brief* dalam hal pemulihan ekonomi daerah. Alhamdulillah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inovasi Daerah yang merupakan salah satu unsur dari Indeks Daya Saing Daerah, tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 61,83 (Kategori Sangat Inovatif) dan Kembali masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif secara Nasional di *Innovative Government Award 2021*.



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai sebuah laporan, LPPD ini berupaya menggambarkan capaian kinerja makro, Capaian kinerja urusan pemerintahan, capaian SPM dan capaian tugas pembantuan selama Tahun 2021, serta kendala yang dihadapi serta keberhasilan yang sudah dicapai.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik bagi Bangsa dan Negara serta Daerah dan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kita cintai, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kandangan, 04 Maret 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah ...	1
B. Data Geografis Wilayah	3
C. Data Kependudukan	5
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.....	7
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	9
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	14
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	16
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	49
1. Visi.....	49
2. Misi	52
3. Tujuan Dan Sasaran	59
4. Perencanaan Kinerja	62
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	75



C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	91
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	141
E. Inovasi Daerah	144
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	151

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH.....	139
2.1. Capaian Kinerja Makro	139
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	140
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	140
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	213
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	232
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	259
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	261
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	265
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	288
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	294



2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	303
2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	322
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	343
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	345
3.1.1.Target Kinerja	345
3.1.2.Realisasi.....	346
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	349
3.2.1.Target Kinerja	349
3.2.2.Realisasi.....	350
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	353
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	353
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	386
4.1. Urusan Pendidikan	387
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	387
4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	387
4.1.3. Realisasi.....	395
4.1.4. Anggaran	407
4.1.5. Dukungan Personil	412
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	413
4.2. Urusan Kesehatan	415
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	415
4.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	421



4.2.3. Realisasi.....	423
4.2.4. Alokasi Anggaran	425
4.2.5. Dukungan Personil	427
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	427
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	429
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	430
4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	430
4.3.3. Realisasi.....	431
4.3.4. Alokasi Anggaran	435
4.3.5. Dukungan Personil	436
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	437
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	438
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	438
4.4.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	430
4.4.3. Realisasi.....	440
4.4.4. Alokasi Anggaran	442
4.4.5. Dukungan Personil	443
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	443
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	444
4.5.1. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.....	445
1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	445
1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	445
1.3. Realisasi	446
1.4. Alokasi Anggaran	447
1.5. Dukungan Personil	449
1.6. Permasalahan dan Solusi	450



4.5.2. Sub Urusan Kebakaran.....	450
2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	450
2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	451
2.3. Realisasi	453
2.4. Alokasi Anggaran.....	456
2.5. Dukungan Personil	457
2.6. Permasalahan dan Solusi	457
4.5.3. Sub Urusan Bencana	458
3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	458
3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	459
3.3. Realisasi	465
3.4. Alokasi Anggaran.....	473
3.5. Dukungan Personil	474
3.6. Permasalahan dan Solusi	475
4.6. Urusan Sosial	476
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	476
4.6.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	478
4.6.3. Realisasi.....	483
4.6.4. Alokasi Anggaran	494
4.6.5. Dukungan Personil	497
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	497
BAB V PENUTUP	500



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Curah Hujan, Hari Hujan, dan Suhu Udara Maksimum Setiap Bulan Tahun 2020.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021	6
Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan	8
Tabel 1.4 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	9
Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021	14
Tabel 1.6 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	50
Tabel 1.7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	66
Tabel 1.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	75
Tabel 1.9 Agenda Politik Kepala Daerah.....	92
Tabel 1.10 Program dan Kegiatan RPJMD 2018-2023	97
Tabel 1.11 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk Dana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	141
Tabel 1.12 Klasifikasi Nilai Indeks Aspek dan Pilar IDSD 2021 ..	147
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Tahun 2021	162
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Keluaran (Output).....	163
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Hasil (Outcome)	136
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan penunjang.	255
Tabel 3.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang	



	Diterima	379
Tabel 3.2	Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan	380
Tabel 3.3	Target Kinerja Penerimaan Tugas Pembantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan	382
Tabel 3.4	Realisasi Penerimaan Tugas Pembantuan Dari Provinsi Kalimantan Selatan	383
Tabel 4.1	Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	394
Tabel 4.2	Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	402
Tabel 4.3	Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	404
Tabel 4.4	Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Menengah Pertama Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	405
Tabel 4.5	Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Kesetaraan Oleh Pemerintah Kab. HSS Tahun 2021	406
Tabel 4.6	Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	407
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan	408
Tabel 4.8	Personil Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.....	412
Tabel 4.9	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	416
Tabel 4.10	Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	418
Tabel 4.11	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	421



Tabel 4.1 2	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2021	424
Tabel 4.1 3	Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2021	426
Tabel 4.14	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan	427
Tabel 4.15	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum.....	431
Tabel 4.16	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2021.	432
Tabel 4.17	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021	435
Tabel 4.18	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	435
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	436
Tabel 4.20	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan	437
Tabel 4.21	Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	439
Tabel 4.22	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan	440
Tabel 4.23	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan.....	446
Tabel 4.24	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021	446
Tabel 4.25	Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021	444
Tabel 4.26	Alokasi anggaran pendukung SPM.....	447
Tabel 4.27	Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021.....	448



Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	450
Tabel 4.29	Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021.....	449
Tabel 4.30	Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran	451
Tabel 4.31	Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021	452
Tabel 4.32	Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan.....	454
Tabel 4.33	Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021...	456
Tabel 4.34	Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran	456
Tabel 4.35	Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021	457
Tabel 4.36	Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana	465
Tabel 4.37	Tahapan Penyusunan KRB	466
Tabel 4.38	Data Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana yang Menerima Informasi Rawan Bencana Tahun 2021	467
Tabel 4.39	Tahapan Penyusunan RPB.....	469
Tabel 4.40	Tahapan Penyusunan Rekon	469
Tabel 4.41	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	471
Tabel 4.42	Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021	473
Tabel 4.43	Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan	473
Tabel 4.44	Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana, Kesbangpol	475
Tabel 4.45	Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 2021	478



Tabel 4.46	Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2021	479
Tabel 4.47	Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021	482
Tabel 4.48	Realisasi Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	483
Tabel 4.49	Realisasi Anak Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	485
Tabel 4.50	Realisasi Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	487
Tabel 4.51	Realisasi Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	490
Tabel 4.52	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten	492
Tabel 4.53	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021 ...	493
Tabel 4.54	Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021 .	495
Tabel 4.55	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan.....	497



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	4
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. HSS 2017 - 2020	7
Gambar 1.3 Logicframe Perencanaan Misi 1	54
Gambar 1.4 Logicframe Perencanaan Misi 2	55
Gambar 1.5 Logicframe Perencanaan Misi 3	56
Gambar 1.6 Logicframe Perencanaan Misi 4	57
Gambar 1.7 Logicframe Perencanaan Misi 5	58
Gambar 1.8 Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi	59
Gambar 1.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1	61
Gambar 1.10 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2	62
Gambar 1.11 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3	63
Gambar 1.12 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4	64
Gambar 1.13 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	65
Gambar 1.14 Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah	92
Gambar 1.15 Peta Daya Saing Daerah Tahun 2021	145
Gambar 1.16 Nilai IDSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dalam Aspek dan Pilar.....	146
Gambar 1.17 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	148
Gambar 1.18 Penghargaan Innovative Government Award 2021 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	148
Gambar 1.19 Terobosan Pengembangan Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	149



Gambar 1.20	Proses Pelaksanaan HSS Innovation Awards 2021	150
Gambar 1.21	Jumlah Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..	151
Gambar 2.1	Capaian Indikator Makro	243
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita	246



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta tugas-tugas pembantuan yang diberikan. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kepala daerah wajib untuk menyampaikan laporan berkenaan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut baik kepada pemerintah pusat berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepada DPRD berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun kepada masyarakat berupa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kewajiban ini dituangkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Pada bulan April 1950 DR. Murdjani diangkat sebagai Gubernur Kalimantan. Kemudian karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka untuk sementara melalui



Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C 17/15 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) Kabupaten Administratif dan 3 (tiga) Swapraja. Salah satu diantaranya adalah Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dengan ibukotanya Kandangan.

Pembagian wilayah administratif tersebut tidak memuaskan rakyat karena yang diinginkan adalah terbentuknya Kabupaten Otonom sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Untuk itu sebagai langkah darurat Gubernur Kalimantan mengeluarkan Keputusan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 yang menetapkan peraturan sementara tentang pembagian daerah-daerah otonom Kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat Kabupaten. Kabupaten Hulu Sungai yang semula hanya bersifat Administratif menjadi Kabupaten Otonom. Keadaan ini terus berlangsung meskipun tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan dari Negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibentuk dengan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/ tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembagian Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah-Daerah Otonom Setingkat Kabupaten Di Provinsi Kalimantan. Berdasarkan keputusan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada awalnya (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C 17/15) hanya bersifat Daerah Administratif ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten Otonom. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).



Secara *de facto* Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950, yakni tanggal dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama serta dibentuknya DPRDS. Penetapan tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikukuhkan dengan Ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06 KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Tanggal 2 Desember 2021 merupakan Hari Jadi Ke-71 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tahun ke 3 (tiga) kepemimpinan pasangan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP dan Syamsuri Arsyad, S.AP., MA yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor :131.63-5862 Tahun 2018 dan Nomor : 132.63-5863 Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

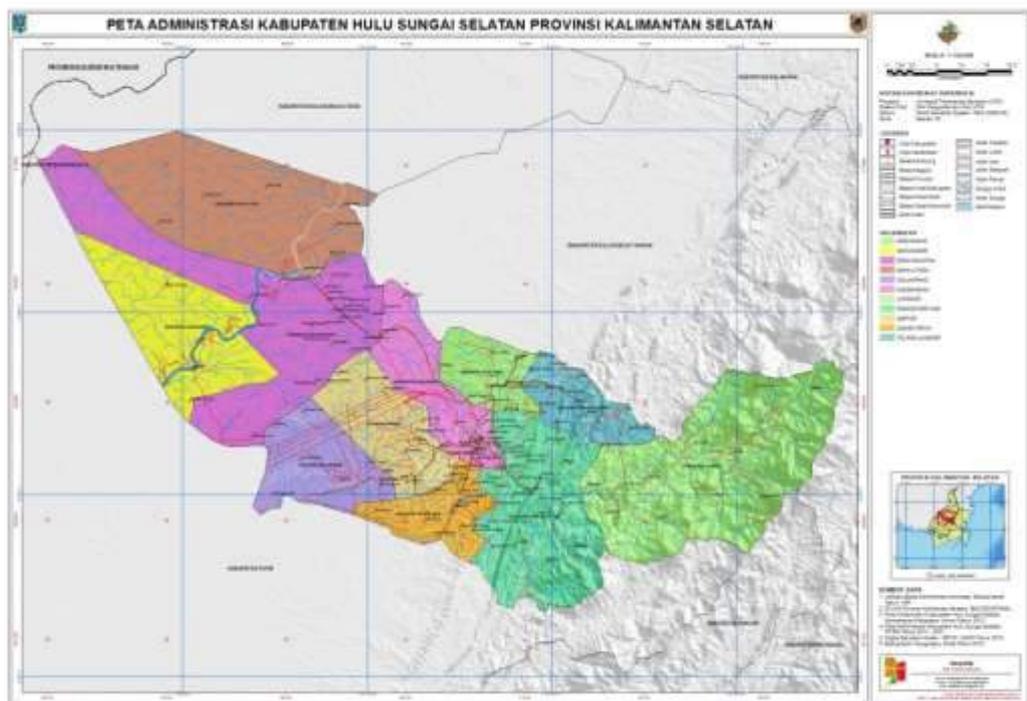
Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara: -02029'58" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19" sd 115036'19" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak kearah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak 135 Km. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; di sebelah selatan dengan Kabupaten Tapin; di sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar,



Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru; sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 180.494 Ha memiliki 11 (sebelas) Kecamatan. yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Sepanjang tahun 2020 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 75,38 persen sampai dengan 83,13 persen. Sedangkan rata-rata suhu udara berkisar antara 25,53°C - 29,50°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2020



disetiap post, hujan paling sering terjadi di bulan Januari dan Desember. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan rata-rata suhu terendah sekitar 26,53°C pada bulan Mei.

Tabel 1.1

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2020

BULAN	SUHU UDARA			KELEMBABAN UDARA		
	Min	Max	Rata2	Min	Max	Rata2
1	2	3	4	5	6	7
Januari	21,95	34,33	28,14	62,00	98,00	80,00
Pebruari	22,30	33,95	28,13	59,00	98,00	78,50
Maret	21,83	34,08	27,96	57,50	97,75	77,63
April	22,15	34,65	28,40	59,00	97,25	78,13
Mei	22,00	35,80	28,90	53,50	98,25	75,88
Juni	22,13	35,70	28,92	55,75	97,25	76,50
Juli	21,83	35,05	28,44	51,75	94,50	73,13
Agustus	21,35	36,38	28,87	49,00	92,50	70,75
September	22,13	36,80	29,47	46,75	92,50	69,63
Oktober	22,65	35,75	29,20	25,50	92,75	59,13
November	22,50	35,93	29,22	44,00	94,50	69,25
Desember	21,85	33,05	27,45	67,75	95,50	81,63

Sumber : Kab. HSS dalam Angka, 2021

C. KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Hasil Konsolidasi Data dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 240.020 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan. Adapun jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		KK	Total
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Sungai Raya	9.233	9.346	7.084	18.569
2.	Padang Batung	11.234	11.242	8.091	22.476
3.	Telaga langsung	5.369	5.334	3.884	10.730
4.	Angkinang	9.902	9.882	7.025	19.784
5.	Kandangan	25.466	25.854	18.432	51.320
6.	Simpur	7.899	8.104	5.907	16.003
7.	Daha Selatan	21.983	21.242	14.254	43.225
8.	Daha Utara	17.253	16.639	10.828	33.892
9.	Kalumpang	3.478	3.318	2.470	6.796
10.	Loksado	4.587	4.408	2.953	8.995
11.	Daha Barat	4.212	4.018	2.647	8.230
Total		120.633	119.387	83.575	240.020

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2021

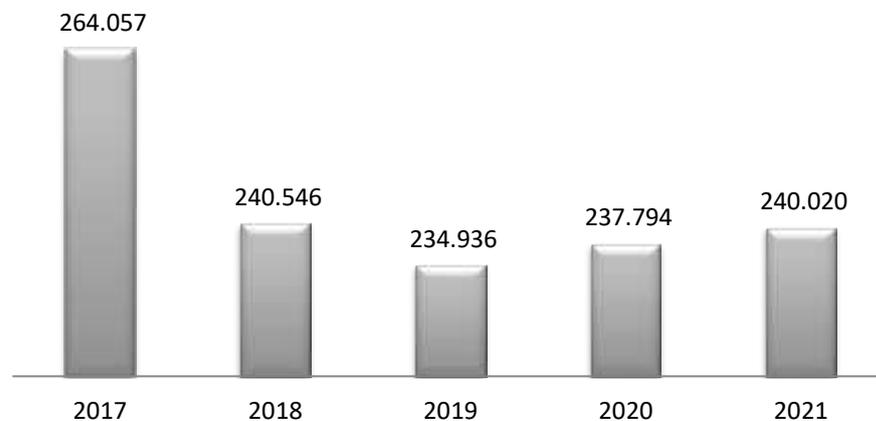
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ketahun mengalami perubahan kenaikan, pada tahun 2014 sebanyak 5.557 jiwa dan tahun 2015 kenaikan sebanyak 3.373 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 data jumlah penduduk 263.107 mengalami penurunan jika dibandingkan data tahun 2015 sebanyak 263.909, menurun sebanyak 802 jiwa. Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 950 jiwa sehingga menjadi 264.057 jiwa. Kemudian untuk Tahun 2018 data kependudukan adalah 240.547, hal ini karena sejak tahun 2018 ada keharusan untuk melihat data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak lagi melihat kepada data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 234.936 jiwa. Jika dibandingkan dengan



angka tahun sebelumnya tahun 2018 240.547 ada penurunan sebesar 5.611. Sebenarnya data jumlah penduduk bukan menurun tetapi karena kegiatan dari Dinas Dukcapil bekerjasama dengan para Kepala Desa/ Lurah mengaktifkan laporan kematian. Tahun 2020 data jumlah penduduk sebanyak 237.794 orang, bertambah sebesar 2.858 atau 0.98 persen. Pada Tahun 2021 data jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 240.020 jiwa bertambah sebanyak 2.226 atau 0.93 persen.

Selengkapnya rincian mengenai perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. HSS
2017 - 2021



Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2021.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan Dan Kelurahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)	Persentase
	Desa	Kelurahan		
1. Padang Batung	17	-	203,93	11,30
2. Loksado	11	-	338,89	18,78
3. Telaga Langsung	11	-	58,08	3,22
4. Angkinang	11	-	58,40	3,24
5. Kandangan	14	4	106,71	5,91
6. Sungai Raya	18	-	80,96	4,49
7. Simpur	11	-	82,35	4,56
8. Kalumpang	9	-	135,07	7,48
9. Daha Selatan	16	-	322,82	17,88
10. Daha Utara	19	-	268,11	14,85
11. Daha Barat	7	-	149,62	8,29
Hulu Sungai Selatan	144	4	1.804,94	100,00

Sumber : BPS Kab. HSS, 2021

Dari sebelas kecamatan yang ada, daerah yang paling luas adalah Kecamatan Loksado dengan luas mencapai 338,89 km² atau 18,78 persen, selanjutnya Kecamatan Daha Selatan 322,82 km² (17,8%), Kecamatan Daha Utara 268,11 km² (14,85%), Kecamatan Padang Batung 203,93 km² (11,30%), sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung yang hanya memiliki luas 58,08 km² atau 3,22 persen luas wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan.



E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
1	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	4	4
2	BAGIAN UMUM	1	0	18	3	0	3	1	26	1	16	8	1	26
3	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	1	1	0	4	1	7	0	0	6	1	7
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	4	3	7
5	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	0	4	2	6	0	0	4	2	6
6	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	6	0	1	3	0	10	0	4	5	1	10
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	1	4	0	7	4	16	0	1	14	1	16
8	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	1	1	1	0	4	0	7	0	2	4	1	7
9	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	0	5	1	0	4	1	11	0	3	7	1	11



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
10	SEKRETARIAT DPRD	0	0	8	3	0	8	4	23	0	8	11	4	23
11	INSPEKTORAT	0	0	5	2	0	21	16	44	0	3	27	14	44
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1	2	10	11	0	21	5	50	1	15	27	7	50
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	9	6	1	18	4	38	0	9	25	4	38
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	6	1	0	7	2	16	0	2	11	3	16
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	5	1	0	2	0	9	0	5	3	1	9
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	1	2	2	0	12	5	22	1	2	13	6	22
17	RSUD BRIG. JEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN	2	7	16	197	24	128	44	418	9	88	297	24	418
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	3	41	1	0	13	2	63	5	34	21	3	63
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	0	7	5	0	13	3	29	1	7	15	6	29
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	2	3	1	10	4	20	0	2	14	4	20
21	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	11	3	0	10	2	27	1	9	13	4	27
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	11	6	0	15	2	34	0	11	18	5	34
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	0	1	12	5	1	12	4	35	0	7	24	4	35



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
	TATA RUANG													
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	0	0	11	2	17	0	4	10	3	17
25	DINAS PERDAGANGAN	0	2	11	10	0	12	4	39	0	13	19	7	39
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5	11	45	6	1	14	5	87	17	37	31	2	87
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	1	5	3	0	10	4	23	0	3	15	5	23
28	DINAS KESEHATAN	1	0	4	14	4	16	5	44	1	3	34	6	44
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	2	0	10	3	18	0	2	13	3	18
30	DINAS PERIKANAN	0	0	5	1	0	11	1	18	0	3	10	5	18
31	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	3	3	1	7	3	17	0	2	10	5	17
32	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	3	2	0	11	2	18	0	2	12	4	18
33	DINAS SOSIAL	0	0	11	2	0	10	2	25	0	5	16	4	25
34	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	0	0	9	1	0	12	3	25	0	6	14	5	25
35	DINAS PERTANIAN	0	1	32	9	2	65	6	115	1	23	61	30	115
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	0	9	3	0	61	14	88	0	3	45	40	88
37	KECAMATAN KANDANGAN	0	2	7	1	0	7	1	18	0	6	11	1	18



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
38	KECAMATAN SIMPUR	0	1	5	1	0	3	3	13	0	4	6	3	13
39	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	0	1	3	0	0	6	1	11	0	3	7	1	11
40	KECAMATAN SUNGAI RAYA	0	0	12	0	1	8	1	22	0	8	14	0	22
41	KECAMATAN KALUMPANG	0	0	8	1	0	9	0	18	0	1	15	2	18
42	KECAMATAN ANGKINANG	0	0	9	1	0	9	0	19	0	4	15	0	19
43	KECAMATAN PADANG BATUNG	0	0	4	1	1	9	0	15	0	3	11	1	15
44	KECAMATAN DAHA UTARA	0	0	4	0	0	6	3	13	0	4	8	1	13
45	KECAMATAN DAHA SELATAN	0	0	6	0	0	6	2	14	0	4	9	1	14
46	KECAMATAN LOKSADO	0	1	4	3	1	6	0	15	1	5	8	1	15
47	KECAMATAN DAHA BARAT	0	0	1	4	0	4	1	10	0	1	8	1	10
48	KELURAHAN KANDANGAN KOTA	0	0	5	0	0	1	0	6	0	1	5	0	6
49	KELURAHAN KANDANGAN UTARA	0	0	8	2	0	4	0	14	0	3	11	0	14
50	KELURAHAN JAMBU HILIR	0	0	2	1	0	2	0	5	0	0	5	0	5
51	KELURAHAN KANDANGAN BARAT	0	0	7	0	0	4	0	11	0	1	9	1	11
52	RSUD DAHA SEJAHTERA	0	1	5	48	3	9	6	72	1	18	52	1	72
52	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	1	0	0	3	0	4	0	0	3	1	4
54	PUSKESMAS ANGKINANG	0	1	7	23	1	4	1	37	0	6	30	1	37
55	INSTALASI FARMASI	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	3	1	4
56	PUSKESMAS BATANG KULUR	0	0	2	17	3	3	0	25	0	2	22	1	25
57	PUSKESMAS BAJAYAU	0	0	0	17	2	3	0	22	0	11	11	0	22
58	PUSKESMAS BARUH JAYA	0	0	0	16	3	1	1	21	0	4	17	0	21
59	PUSKESMAS BAMBAN	0	0	4	14	1	4	2	25	0	2	23	0	25



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
60	PUSKESMAS BAYANAN	0	0	2	11	2	3	0	18	0	4	14	0	18
61	PUSKESMAS GAMBAH	0	0	3	16	3	2	0	24	0	4	19	1	24
62	PUSKESMAS JAMBU HILIR	0	0	6	19	4	5	0	34	0	3	29	2	34
63	PUSKESMAS KALIRING	0	0	3	18	2	3	0	26	0	1	23	2	26
64	PUSKESMAS KALUMPANG	0	0	0	24	1	4	1	30	0	11	18	1	30
65	PUSKESMAS KANDANGAN	0	0	5	25	5	4	1	40	0	7	28	5	40
66	PUSKESMAS LOKSADO	0	1	0	16	3	8	0	28	0	12	16	0	28
67	PUSKESMAS MALINAU	0	0	1	13	2	3	0	19	0	10	9	0	19
68	PUSKESMAS NEGARA	0	0	3	19	4	3	0	29	0	7	20	2	29
69	PUSKESMAS PASUNGGAN	0	0	6	12	1	2	0	21	0	7	14	0	21
70	PUSKESMAS PADANG BATUNG	0	0	4	18	2	2	1	27	0	2	23	2	27
71	PUSKESMAS SIMPUR	0	0	2	22	4	11	0	39	0	9	28	2	39
72	PUSKESMAS SUNGAI PINANG	0	0	0	9	0	2	2	13	0	2	10	1	13
73	PUSKESMAS SUNGAI RAYA	0	0	3	17	3	4	0	27	0	2	24	1	27
74	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT	0	0	4	25	0	2	0	31	0	12	19	0	31
75	PUSKESMAS WASAH	0	0	4	14	3	1	0	22	0	3	16	3	22
76	UPTD SKB	0	0	3	0	0	6	1	10	0	0	7	3	10
77	SLTP	1	3	19	16	0	271	20	330	2	11	191	126	330
78	SD	6	8	126	85	0	1145	16	1386	3	133	737	513	1386
79	TK	0	0	6	10	0	61	0	77	0	7	43	27	77
JUMLAH		23	50	616	860	91	2228	233	4101	45	672	2452	932	4101

Sumber : BKPSDM Kab. HSS, 2021



F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.275.769.551.357,00 atau turun sebesar Rp. 265.484.331,- (0,021%) dari Target Pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.275.504.067.026,00. Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 11.342.594.409.895,62 atau 105,24% dari target yang ditetapkan. Dimana Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 247.698.636.066,62 atau 122,48%, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.072.252.216.279,00 atau 122,48%, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 22.643.557.550 atau 95,56%.

Target belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.578.122.225.635,28 dan realisasinya sebesar Rp. 1.420.796.435.755,16 atau 90,03%. Dimana realisasi belanja daerah meliputi : Belanja Operasi sebesar Rp. 970.133.905.440,00 atau 89,36%, Belanja Modal sebesar Rp. 260.921.215.974,16 atau 88,89%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.533.858.800,00 atau 78,74% dan Belanja Transfer sebesar Rp. 185.332.397.000,00 atau 100%.

Rincian detail target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.239.285.720	247.698.636.066,62	122,48
1.1	Pajak daerah	14.310.773.000	13.541.151.921	94,62



1.2	Retribusi daerah	8.675.139.600	6.607.815.981	76,17
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.004.500.000	6.091.259.048	101,44
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.248.873.120	221.458.409.116,62	127,83
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.049.834.045.637	1.072.252.216.279	102,14
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	974.878.765.637	1.003.434.645.997	102,93
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.955.280.000	68.817.570.282	91,81
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.696.220.000	22.643.557.550	95,56
3.1	Pendapatan hibah	1.025.200.000	54.449.550	5,31
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	22.671.020.000	22.589.108.000	99,64
	Belanja Operasi	1.085.590.398.611,06	970.133.905.440,00	89,36
	Belanja Pegawai	528.616.181.498,56	482.702.664.650,00	91,31
	Belanja Barang	509.285.568.014,50	444.372.124.882,00	87,25
	Belanja Hibah	26.172.625.498,00	25.458.597.908,00	97,27
	Belanja Bantuan Sosial	21.516.023.600,00	17.600.518.000,00	81,80
	Belanja Modal	293.524.117.576,00	260.921.215.974,16	88,89
	Belanja Tanah	12.088.673.758,00	1.563.402.500,00	12,93
	Belanja Peralatan dan Mesin	61.732.816.917,00	55.907.592.945,00	90,56
	Belanja Bangunan dan Gedung	119.225.872.294,00	108.565.226.735,16	91,06
	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	98.528.774.517,00	93.351.134.994,00	94,7
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.947.980.090,00	1.533.858.800,00	78,74
	Belanja Tidak Terduga	13.675.312.448,22	4.408.917.341,00	32,24
	Belanja Tidak Terduga	13.675.312.448,22	4.408.917.341,00	32,24
	Transfer	185.332.397.000,00	185.332.397.000,00	100,00
	Bagi Hasil Pajak	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	100,00
	Bagi Hasil Retribusi	182.703.532.000,00	182.703.532.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN DAERAH			
C.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	302.352.674.278,28	302.352.674.278,28	100



1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.333.220.278,28	302.352.674.278,28	100,01
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	19.454.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	302.352.674.278,28	302.352.674.278,28	100
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	224.150.648.418,74	0

Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2021, Data Unaudit)

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.



Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa



urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi 6.13 persen, 2018 sebesar 6,14 persen dan tahun 2019 menjadi 5,32 persen yang mana ini terjadi perlambatan pertumbuhan karena pengaruh beberapa sektor yang mengalami tekanan karena adanya pengaruh global ekonomi sehingga masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan.



- b. Persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan berada pada tahun 2013 berada pada angka 6,67 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,73 persen, meningkat menjadi 6,77 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,45 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 6.29 persen, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 5.8 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 5,21 persen dan tahun 2019 menjadi 5,4 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk penanggulangan masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Hulu Sungai Selatan pada periode 2014 sampai 2018.
- c. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 395 kasus, cenderung mengalami fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 dan 2015 angka kriminalitas menjadi 290 kasus dan 148 kasus dan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 214 kasus dan 232 kasus dan tahun 2019 menjadi 271.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan



masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat realisasi tahun 2019 sebesar 81,43% masih belum mencapai target yaitu sebesar 89,17%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat sebesar 74,68% dan target sebesar 79,45%. Kesenjangan antara target dan capaian bidang pendidikan menggambarkan masih adanya penduduk usia jenjang pendidikan SMP sederajat yang belum diserap pada jenjang pendidikan tersebut.

3. Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

- a. Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah penting. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari 2 tahun terakhir. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan



upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan, irigasi. Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan kabupaten adalah sepanjang 859,36 Km dengan jalan beraspal sepanjang 545,04 Km, jalan kerikil sepanjang 125,58 Km, jalan tanah sepanjang 108,50 Km, jalan beton sepanjang 80,24 Km. Jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 401,79 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 148,48 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 174,86 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 134,23 Km.
- b. Realisasi pencapaian SPM air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik masih belum mencapai 100%, cakupan SPAM pada tahun 2018 sebesar 74,65% dan 2019 sebesar 84,66%. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2019 sebesar 9,216%.
- c. Realisasi capaian kinerja dari rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan



Kabupaten, pada tahun 2019 sebesar 80 % masih di bawah target 100%.

- d. Realisasi capaian indikator kinerja rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2019 sebesar 62,039%.

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman mempunyai target pencapaian 100% untuk SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbunan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

Realisasi capaian kinerja dari rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah pada tahun 2019 sebesar 58,82%. dan indikator kinerja Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) pada tahun 2019 sebesar 84,45%.

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

a. Pelayanan informasi rawan bencana:

- 1) penyusunan kajian risiko bencana
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
- 3) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 1) penyusunan rencana penanggulangan bencana
- 2) pembuatan rencana kontingensi;
- 3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- 4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- 1) respons cepat kejadian luar biasa penyakit / *wabah zoonosis* prioritas;
- 2) respons cepat darurat bencana;
- 3) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 4) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum; dan
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi dari target SPM masih belum mencapai 100%.



7. Bidang Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data ataupun pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data, meninggal atau pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dikarenakan sebagian gepeng tidak mengalami perubahan perilaku setelah ditertibkan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengemis lagi, atau ada yang kembali lagi setelah dipulangkan ke daerah asalnya.

8. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Permasalahan pada bidang tenaga kerja meliputi:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 71,38, tahun 2018 meningkat menjadi 72,15% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 71,49. Namun peningkatan ini dirasakan masih belum optimal karena indikator kinerja pada persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tahun 2019 hanya mencapai 77,16%, indikator kinerja pada persentase perusahaan yang menerapkan tata



kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2019 sebesar 92%, realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 91,23%, realisasi indikator kinerja pada persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten tahun 2019 sebesar 93,98%. Realisasi capaian indikator kinerja pada Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 83,33%.

- b. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sebesar 2,02% dan tahun 2018 menjadi 2,43% dan tahun 2019 menjadi 2,56%, dari data dapat diketahui adanya tren peningkatan pada indikator tingkat pengangguran terbuka pada penduduk usia produktif.

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 sebesar 88,36, pada tahun 2016 sebesar 89,08, pada tahun 2017 sebesar 89,07 (Data BPS pada 03 Desember 2019).
- b. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 sebesar 60,41% kemudian tahun 2015 menjadi 60,38% dan tahun 2017 menjadi 61,10%. (Data BPS pada 07 Desember 2019).
- c. Realisasi capaian indikator kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 sebesar 57,5 %, masih rendah



jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2019.

- d. Terkait status kota layak anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih harus berkomitmen menuju kota layak anak dan pada tahun 2017-2019 masih berstatus pratama selama 3 (tiga) tahun.

10. Bidang Pangan

Permasalahan bidang pangan adalah masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

11. Bidang Pertanahan

Selain jumlah luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2019 sebesar 76,24%, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 pada persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, sebesar 23%. dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2019 sudah mencapai 100% namun hal ini masih perlu upaya untuk mempertahankan capaian realisasi. Capaian realisasi indikator kinerja pada indikator tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan



maksimum dan tanah absentee sebesar 56% rata-rata penerima menerima sebidang tanah seluas 3100 m² (31%).

12. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015 Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55, tahun 2019 sebesar 55,96. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten pada tahun 2019 sebesar 73,68% dan realisasi capaian indikator kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 68,97%. Dari data tersebut dapat diketahui pengelolaan sampah dan ketaatan penanggung jawab usaha masih rendah terhadap izin lingkungan.

13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama pada bidang ini dari realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran pada tahun 2019 mencapai 92,83% dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP



Elektronik 95,78%. Masih terdapat gap antara target 100% dan realisasi capaiannya.

14. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama yang dihadapi adalah realisasi indikator kinerja pada indikator TFR (Angka Kelahiran Total) tahun 2019 sebesar 2,35, Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) pada tahun 2019 sebesar 100%, Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2019 sebesar 76,67%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) pada tahun 2019 sebesar 15%

15. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan. Realisasi capaian kinerja rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2019 untuk aspek penyeberangan yaitu jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten yaitu sebesar 0,625 dan realisasi indikator kinerja pada kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota tahun 2019 rasio sebesar 20,88.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama adalah realisasi dari target indikator kinerja pada persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 39,47%, indikator kinerja untuk persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2019 sebesar 68,42%, realisasi indikator kinerja pada persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,



mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten tahun 2019 sebesar 81,95%. dan indikator kinerja pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government tahun 2019 sebesar 100%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa implementasi *e-government* sudah ada regulasi yang mengaturnya.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Yakni penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK yang merupakan sebuah layanan pemerintah agar supaya dapat mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Serta adanya integrasi aplikasi sebagai penerapan tata kelola fasilitas pemerintahan yang baik dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.



Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun portal dan aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan publik. Di masa mendatang pelayanan SPBE oleh Diskominfo akan lebih ditingkatkan baik dalam kualitas maupun dalam kuantitasnya, hal ini untuk menjawab kebutuhan Daerah maupun Perangkat Daerah.

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan bidang KUKM adalah walaupun ada peningkatan Koperasi yang berkualitas tahun 2019 sebesar 77,16% namun masih berada di bawah target 100%, indikator kinerja koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 78,48% dan indikator kinerja pada meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha masih sebesar 81,29% tahun 2019.

18. Bidang Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten pada tahun 2019 sebesar 173,96% namun hal ini belum ditandai dengan peningkatan yang signifikan pada peningkatan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019.

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2019 masih rendah yaitu 0,05% kemudian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2019 sebesar 2,35%, Peningkatan prestasi olahraga atas perolehan medali pada tahun 2019 sebanyak 11 medali, persentase jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan pada tahun 2019 sebesar 26,19%



20. Bidang Persandian

Permasalahan persandian pada realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2019 sebesar 34,25%. Hal ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

21. Bidang Kebudayaan

Realisasi indikator kinerja pada indikator kinerja terlestariannya Cagar Budaya pada tahun 2019 sebesar 56,41% dan penyelenggaraan festival seni & budaya sebanyak 8 event. Pada urusan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan kepariwisataan sebagai daya tarik wisata. Sehingga bidang ini perlu berbenah dan mengoptimalkan capaian indikatornya.

22. Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama dari urusan ini terdapat pada realisasi capaian indikator kinerja nilai budaya baca yang pada tahun 2019 sebesar 50,4%, dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan sudah mencapai 100% sehingga tetap diperlukan kinerja untuk lebih memantapkan capaiannya. Indikator kinerja pada koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2019 sebesar 58,81%.

23. Bidang Kearsipan

Permasalahan utama pada kearsipan yaitu pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps 40 dan 59 UU 43/2009) pada tahun 2019 sebesar 75%.



24. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan, antara lain menurunnya produktivitas kolam, produksi budidaya minapadi (budidaya ikan di sawah) dan produktivitas minapadi. Hal ini terjadi karena budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang. Sementara dari realisasi indikator kinerja jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten pada tahun 2019 sebesar 105%. Untuk ke depannya akan lebih ditingkatkan lagi.

25. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum khusus menjadi kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana, kualitas sumber daya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.



26. Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2019 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian
- b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 sebesar 4,83%, tahun 2017 sebesar 1,67%, tahun 2018 sebesar 4,33% dan tahun 2019 sebesar 2,97%. Tren pertumbuhan fluktuatif dan cenderung menurun untuk tahun 2019.
- c. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2014 yaitu 99,83%, menjadi 99,99% pada tahun 2015, mencapai 97,52% pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian sebesar 96,69% dan terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan 2019 menjadi 95,07%. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalannya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

27. Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.



Pada awal periode tahun 2015 mencapai 4,76%, tahun 2016 sebesar 4,60%, tahun 2017 sebesar 5,25%, tahun 2018 sebesar 4,84% dan tahun 2019 sebesar 4,96%. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan. Realisasi indikator kinerja persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2019 sebesar 98,95%, indikator kinerja pada persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 26,58% pada tahun 2019. Pada indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 77,33%.

28. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama perindustrian terletak pada indikator kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP pada tahun 2019 sebesar 75%, sementara untuk indikator kinerja Pertambahan jumlah industri Kecil di Kabupaten mencapai 100%, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun 2019 sebesar 100%.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Saat ini pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi New Normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi *virus corona* menghantam seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai



skenario telah dirancang, termasuk menyiapkan protokol pencegahan di berbagai sektor industri yang nantinya akan diizinkan kembali beroperasi.

Istilah *New Normal* mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah wabah virus corona dengan menerapkan protokol pandemi covid-19. WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya dengan *COVID-19* sampai vaksin ditemukan.

Ketika *New Normal* masyarakat memang dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, salah satunya menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Pemerintah juga telah menyiapkan pedoman bekerja di era *new normal*. Pedoman tersebut tertuang dalam beberapa produk kebijakan antara lain adalah :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Bar



Setidaknya ada beberapa APD (alat pelindung diri) dan peraturan yang mesti dipatuhi, baik perusahaan maupun pegawai, ketika Work From Office (WFO) kembali dilakukan, antara lain :

- a. Dalam peraturan Kemenkes dan BPOM, setiap pekerja diwajibkan menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja
- b. Pekerja wajib menjaga jarak sosial minimal satu meter baik di perjalanan maupun di tempat kerja,
- c. Pekerja diimbau membawa atau perusahaan menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen sebagai upaya pencegahan tambahan, terutama di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dan lain-lain
- d. Pekerja wajib mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan air mengalir selama 20 detik, terutama saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi
- e. Wajib menjaga kebersihan di area bekerja dan melakukan disinfektan secara berkala
- f. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan seperti alat salat, makan, dan lain-lain
- g. Menerapkan etiket batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu saat melakukannya
- h. Terakhir, para pekerja harus menerapkan pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja.



Jadi, dapat disimpulkan, yang terpenting dalam menjalani fase kehidupan baru atau new normal adalah senantiasa menerapkan protokol pencegahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni dengan menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan protokol pencegahan lainnya.

Adapun kondisi covid-19 di Kalimantan Selatan masih terlihat tinggi hal ini sesuai dengan data yang disampaikan Bappenas RI bahwa angka reproduksi efektif covid-19 (R_t) di Kalimantan Selatan masih di atas 1 (satu).

R_t merujuk pada angka reproduksi efektif covid-19 di setiap wilayah atau negara sebagai gambaran tentang kondisi epidemi terkini lewat estimasi jumlah rata-rata penularan yang terjadi per satu kasus infeksi. Angka R_t dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat digunakan untuk mengukur laju penularan virus secara real time.

Adapun kondisi Hulu Sungai Selatan sesuai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam konteks pemetaan kondisi epidemiologi masuk dalam kategori Daerah Penularan Sedang/Zona Kuning. Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terkait infeksi Covid-19, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan sebagai Daerah Yang Mempunyai Respons Sedang dan untuk penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikategorikan sebagai Daerah Berkemampuan Sedang

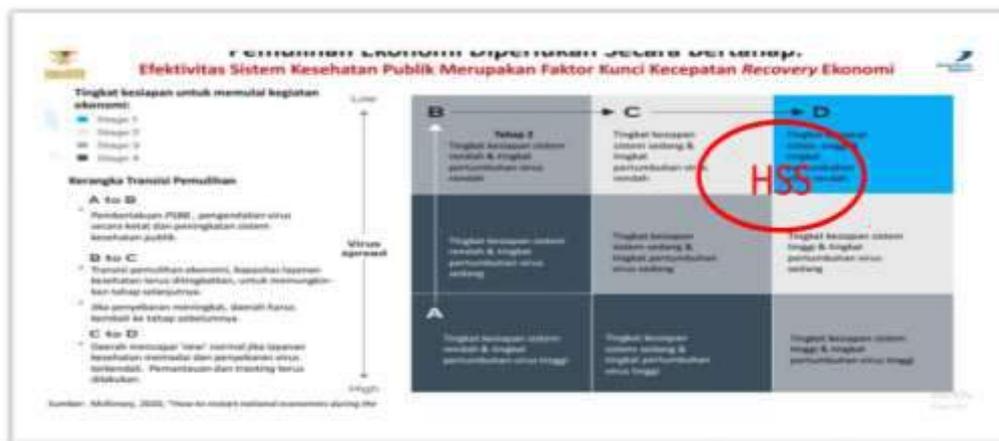


NO.	SUB INDIKATOR	HASIL GRAFIK	NILAI	KRITERIA
1	Jumlah Penderita Positif	Meningkat	25	Daerah Penularan Sedang / Zona Kuning
2	Jumlah ODP/PDP	Mendatar	20	
3	Jumlah Kematian Dimakamkan dengan Protokol Covid-19	Mendatar	20	
4	Penularan langsung Covid-19 pada petugas Kesehatan	Mendatar	20	
TOTAL NILAI			85	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HSS

Kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini koheren dengan proses pemulihan ekonomi secara bertahap, yang mana sangat menekankan pada efektivitas sistem kesehatan publik. Sebagaimana yang tergambar dalam gambar di bawah ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dimasukkan dalam tahapan transisi dari C ke D. Dimana tingkat kesiapan sistem kesehatan kategori sedang dan tingkat pertumbuhan virus rendah.

Dalam tahapan ini pemerintah perlu terus memperkuat sistem kesehatan dalam rangka memberikan layanan yang optimal, serta seraya mengendalikan penyebaran virus dengan terus melakukan pemantauan dan *tracking*.





New Normal Artinya kita harus berdampingan dengan covid-19 sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan, WHO menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Karena ada potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Berdampingan bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan diri.

Kebijakan Pemerintah Pusat ini terlihat dari beberapa kebijakan yang mengarah pada pemulihan ekonomi, hidup yang produktif namun tetap aman dari covid-19.

Mau tidak mau Kabupaten Hulu Sungai Selatan (dengan kondisi saat ini zona kuning) harus memiliki langkah yang tepat dan cepat dalam merespons kebijakan *new normal* dalam beberapa waktu ke depan.

Hal yang ditakutkan ketika kebijakan *new normal* ini dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dengan peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona secara masif. Walaupun penerapannya secara bertahap dan gradual namun perlu banyak langkah yang harus disiapkan.

Apalagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah transit dan jalur Nasional antar Provinsi akan menampung dan dilalui semakin banyak orang ketika *new normal* dijalankan. Hal ini tentu membuka peluang besar penyebaran covid-19 di Hulu Sungai Selatan

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi *new normal* ini, antara lain :



1. Peningkatan Kemampuan Daerah Dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat Terinfeksi Covid-19 (Pelindung komunitas masyarakat, Alat Pelindung Petugas Medis, Sarana dan Peralatan Medis dan perlengkapan pasca wafat)
2. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penelusuran Kontak dekat Masyarakat Dengan OPD dan PDP serta Orang yang Dimakamkan dengan Protokol Covid-19.
3. Setiap sektor kehidupan masyarakat, terutama yang mengumpulkan banyak/kerumunan orang dituntut untuk memiliki protokol kesehatan masing-masing, misal protokol kesehatan di sekolah, protokol kesehatan di pasar, protokol kesehatan di minimarket, protokol kesehatan di masjid/musala/langgar, protokol kesehatan di restoran/warung makan, protokol kesehatan di kantor, protokol kesehatan di angkutan umum, dll.

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini dapat dijadikan pedoman adalah :

- a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES /328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi



Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- c) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru
- d) Mengoptimalkan sosialisasi protokol kesehatan di setiap sektor pada masyarakat luas

Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Begitupun halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk



diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya daerah perdesaan. Selain infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir. Namun pada faktanya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan wilayah rawan tanah longsor, bencana kebakaran maupun angin puting beliung. Meskipun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya bencana. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang mengedepankan pariwisata sebagai prioritas pembangunan harus mampu mengamankan modal sosial. Terlebih lagi mengingat pemberlakuan *ASEAN Community* yang semakin memperbesar intervensi budaya-budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai



sosial lokal. Perlu adanya tindakan preventif dalam rangka memfilter intervensi budaya yang mungkin mampu mempengaruhi nilai kearifan lokal Hulu Sungai Selatan melalui penguatan modal sosial. Selain itu, PMKS juga menjadi isu tersendiri yang perlu untuk menjadi perhatian. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Hulu Sungai Selatan masih terbelang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial perlu ditingkatkan

2. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di kategori sedang namun harus tetap dipantau oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM masih belum optimal pula. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada level nasional maupun regional provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya pengupayaan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu pula peningkatan kerjasama antar daerah sekitar Hulu Sungai Selatan demi mengurangi indeks gini.

Dalam rangka merespon tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu distimulasi melalui penguatan *bargaining position* UMKM serta sumber daya wirausahawan. Namun sampai saat ini permasalahan-permasalahan mendasar berkenaan dengan UMKM dan sumberdaya wirausahawan belum dapat sepenuhnya terselesaikan. Seperti kualitas dan daya saing UMKM misalnya



yang masih belum optimal. Selain itu, struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas. Pembinaan dan pembekalan sumber daya wirausahawan masih rendah, hal ini melatar belakangi kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha cenderung rendah. Oleh karenanya perwujudan daya saing ekonomi daerah penting untuk diupayakan.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Positifnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami konsistensi penurunan.

Pariwisata sebagai kategori unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sepatutnya menjadi motor penggerak produktif perekonomian daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, kontribusi penerimaan PDRB melalui komoditas pariwisata belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi perluasan jaringan kemitraan yang belum optimal atau daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata yang masih lemah. Melihat kondisi tersebut, nampaknya peran masyarakat sangat vital untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sehingga, sangat rasional



bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi leverage pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian

Fasilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkenaan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih;
2. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air;
3. Masih tingginya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik;
4. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh; dan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, rumah dengan jangkauan air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam rangka mengakomodir banyaknya isu serta momentum positif tersebut perlu untuk



memberikan afirmasi lebih terhadap isu ini. Oleh karenanya, penyediaan infrastruktur baik fisik, ekonomi maupun sosial sangat penting untuk ditingkatkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada tahun 2017 masih belum mampu mengakomodir 20% RTH Publik dari total 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, kualitas penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah cukup baik. Dengan demikian maka, tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas penataan ruang menjadi perhatian penting pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat pembangunan tanpa IMB masih relatif tinggi. Inilah sebabnya mengapa peningkatan kuantitas yang ekuivalen dengan kualitas sangat penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Hal ini agar peningkatan infrastruktur fisik diiringi dengan kualitas yang ada baik secara teknis maupun non teknis.

4. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif



dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, pencemaran lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasannya adalah, bargaining position Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat terancam dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemerintah daerah, mengingat topografi dan karakteristik fisiologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu modal utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.



B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. VISI

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan kata lain pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2018-2023 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi daerah, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada VISI:



**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas,
Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Perwujudan Visi RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis



Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	<p>ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura,2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan,3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p>
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	<p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).</p>
Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam</p>



Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	<p>konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p> <p>Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p>

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :



1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

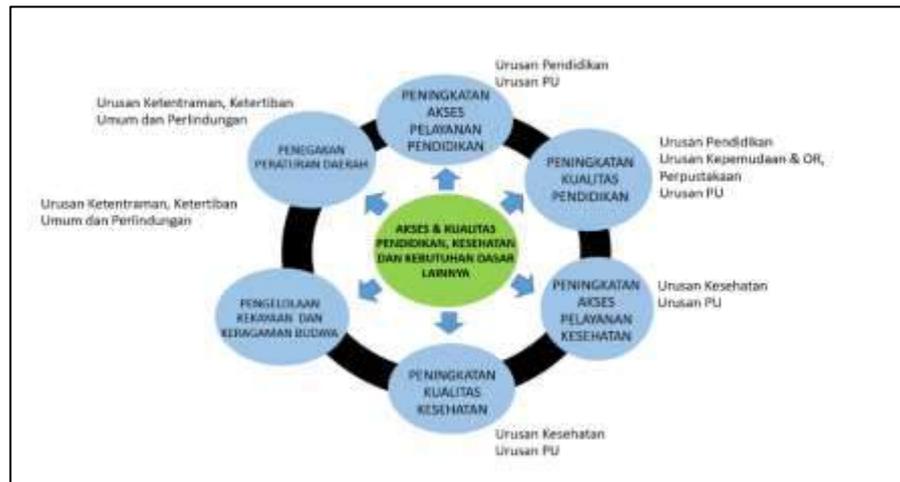
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut.



Gambar 1.3 *Logicframe* Perencanaan Misi 1



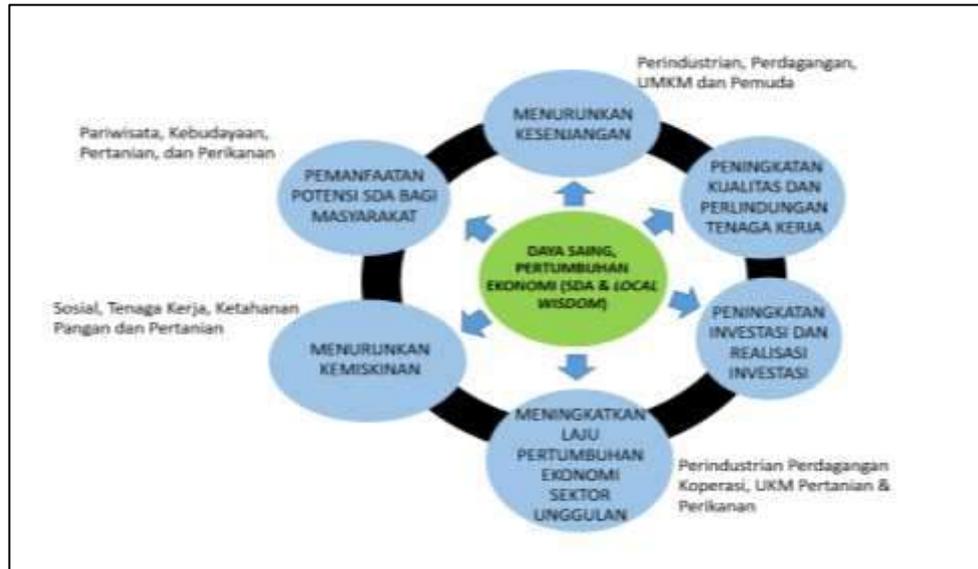
Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melaluipertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian misi ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-2 sebagai berikut.



Gambar 1.4 *Logicframe* Perencanaan Misi 2



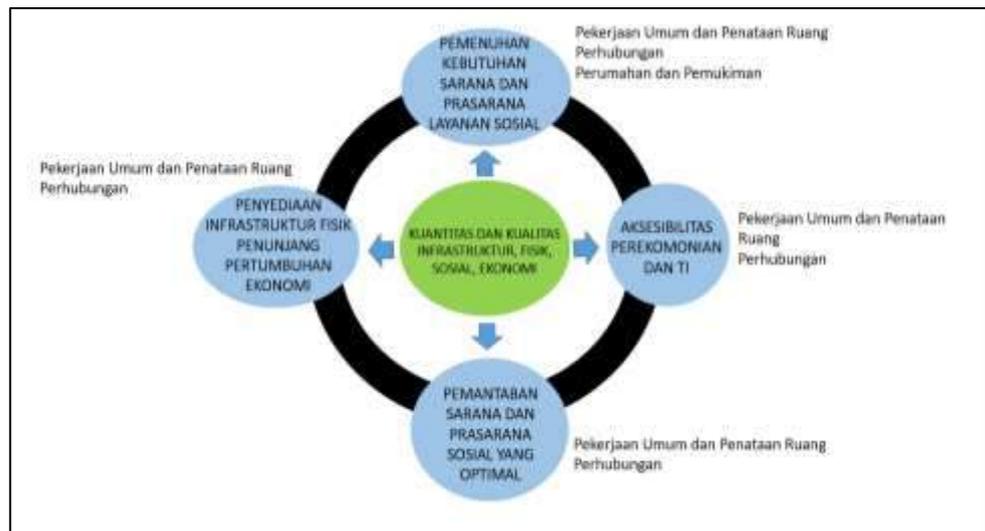
Misi 3: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagai berikut.



Gambar 1.5 Logicframe Perencanaan Misi 3



Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

Dalam upaya pencapaian misi ke-4 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 1.6 *Logicframe* Perencanaan Misi 4



Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.



Gambar 1.7 Logicframe Perencanaan Misi 5



Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib :
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 1. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 3. Penguatan UMKM dan koperasi.
- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.



3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian di intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.

Gambar 1.8 Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi



3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, yang mengacu pada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta



didasarkan pada issue-isue dan analisis stratejik yang mampu mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1



Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan:

1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat



Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.10 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2



Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.11 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3



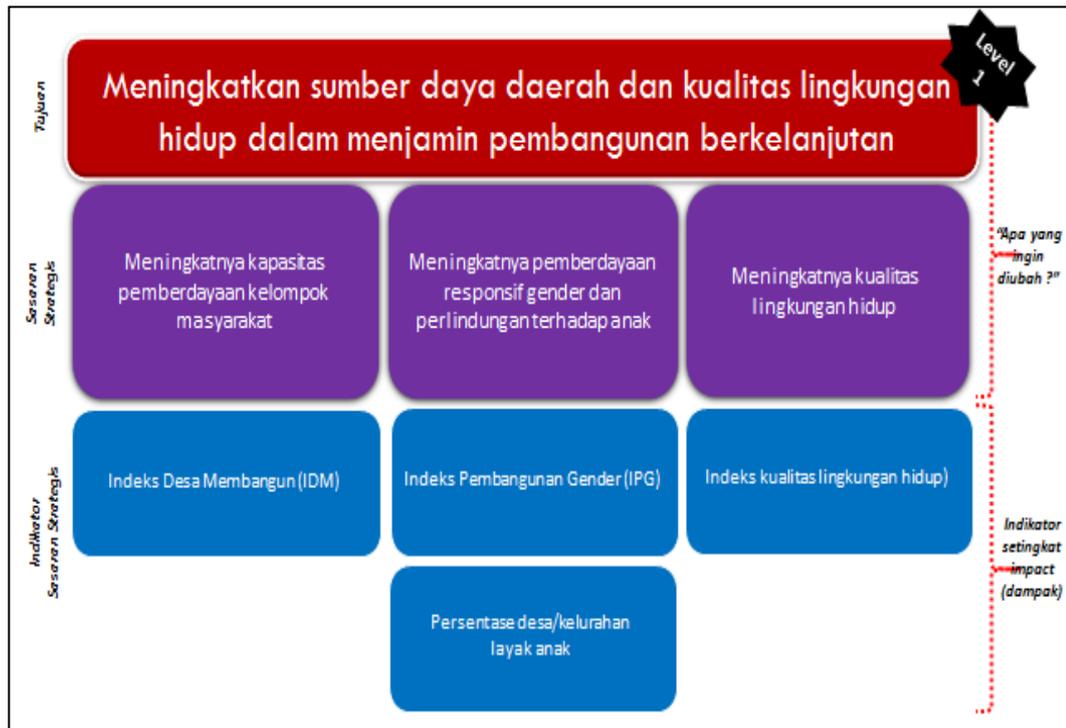
Dalam rangka pencapaian misi Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.12 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4



Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

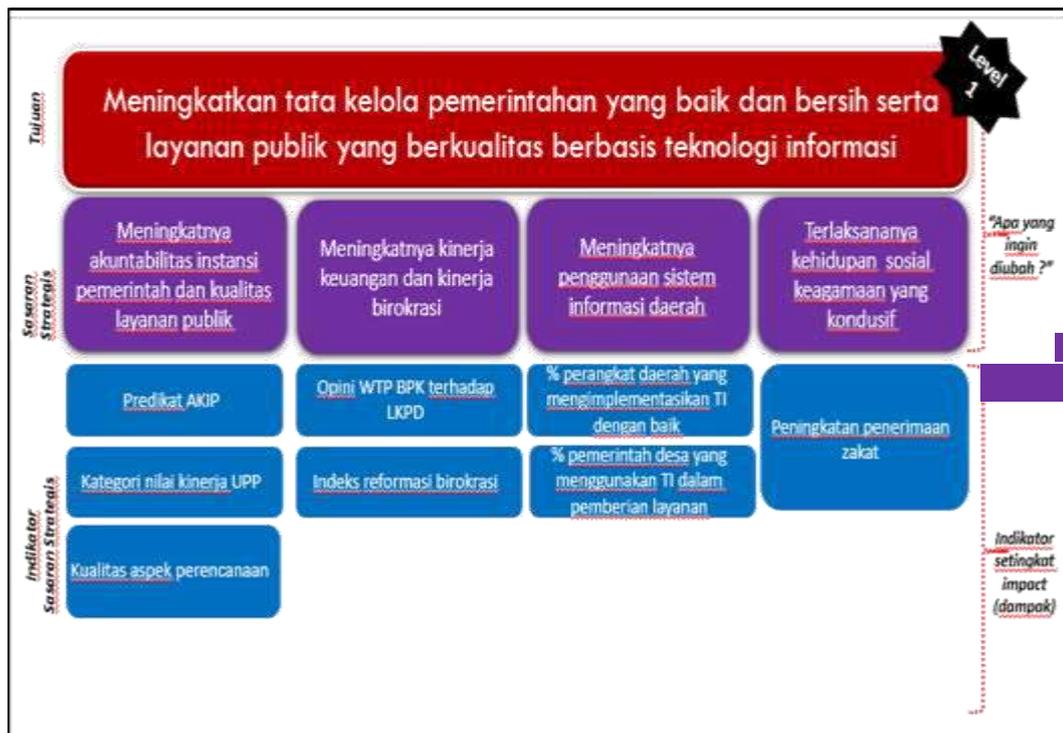
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
 3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah;
- dan



4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.13 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5



Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:



Tabel 1.7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat														
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya														
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,80	68,41	69,41	70,25	71,08	71,86	72,57	72,57			
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	12.05	12.07	12.70	12.89	13.08	13.29	13.52	13.52	Disdik
			2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.71	7.72	8.00	8.17	8.33	8.44	8.53	8.53	
			3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	1.25	1.25	2,50	4,37	6,87	9,37	12,50	12,50	
	4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	4,76	4,76	6,59	8,79	10,99	13,19	15,02	15,02			
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,39	65,59	66,05	66,54	67,04	67,51	67,87	67,87	Dinkes	
		6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	75.81	74.57	73.02	72.18	71.35	70.51	69.68	69.68	Dinas PPKBPP & PA	
		7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	belum diukur	A	AA	AA	AA	AAA	AAA	AAA	RSUD Hasan Basry	
8		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	4.35	4.35	4.35	4.35	8.70	13.04	17.39	17.39	Dinas Kesehatan/UP T RS Daha Sejahtera/RSU D Hasan Basry		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	Skor	83,19	83.77	84.61	85.46	86.31	87.17	88.04	88.04	Dinas Ketahanan Pangan
	4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	52,00	54,00	57,00	61,00	67,00	72,00	75,00	75,00	Disdik/Dinkes /Dinsos/Satpol PP/BPBD Kesbangpol/Dis.PUTR/Dis.PR LH
	5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	Persen	63,87	64.62	65,76	68,94	71,19	73,65	76,35	76,35	Dinsos
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal														
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	2. Tingkat kemiskinan		Persen	5,80	5,21	5,14	5,06	4,80	4,54	4,28	4,28		
		6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan	Persen	5.80	5.21	5.14	5.06	4.80	4.54	4.28	Dinsos
				13	Indeks Gini	Indeks	0.336	0.317	0.318	0.312	0.308	0.299	0.284	Dis TK, Kop dan UKP
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2.43	2.07	2.04	1.96	1.99	1.86	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		3. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,12	6,14	6,23	6,28	6,33	6,38	6,43	6,43	
	8 Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15 Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	5,85	4,55	4,47	4,98	5,27	5,56	5,85	5,85	Dis TK, Kop dan UKP
		16 Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,28	4,84	5,38	5,50	5,61	5,72	5,83	5,83	Disdag
		17 Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,67	4,33	4,28	4,51	4,86	4,92	5,63	5,63	Distan/Diskan
		18 Persentase koperasi sehat	Persen	1,18	1,76	2,35	3,18	3,82	4,46	5,10	5,10	Dis TK, Kop dan UKP
	9 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	21,10 Milyar	22,50 Milyar	23 Milyar	24 Milyar	25 Milyar	26 Milyar	28 Milyar	28 Milyar	Bakeuda
	10 Meningkatkan investasi PMDN	20 Persentase peningkatan Penanaman Modal	Persen	3,00	4,20	4,80	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	Dis PMPTSP



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	Dalam Negeri (PMDN) Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rupiah	3.223.750.000	3.904.175.000	4.224.480.000	5.374.026.000	6.687.744.000	7.873.326.000	9.073.800.000	9.073.800.000	Disporapar	
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian														
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	4. Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen	67,49	71,35	49,64	51,00	50,38	51,31	50,90	50,90			
	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas												
		22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥40 Km/jam	Persen	74,00	74,50	62,45	63,60	64,75	65,80	67,00	67,00	DisPUTR	
		23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	80,00	85,00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43		
		24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana public	Persen	10	14	24	48	67	86	100	100		
		25	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24,82	24,83	24,84	24,85	24,86	24,87	24,87	24,87	24,87	Dispera KPLH
		26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	40,16	40,66	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32	82,32		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan														
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71			
	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71	Dis.PMD
	6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27		
	14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27	DPPKBPPA
			29	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	0,68	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	7,43	
	7. Indeks kualitas lingkungan hidup			Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,6	55,77	55,77		
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77	55,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis														



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	72	78	83	88	88			
		16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31 Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	Seluruh SKPD
		32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	B	A	A	A	A	A	A	Setda (Bag. Orpad) / Disdukcapil/ Dinkes/RSUD HHB/RSU Daha Sejahtera/Dis. PMPTSP	
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	33	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	53,33	56,81	60,28	62,82	63,81	65,45	67,09	67,09	Bappelitbang da	
		34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat	
		35	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	48,63	49,04	69,77	73,17	74,42	78,12	81,33	81,33	BKD	
		18	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	7,89	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Diskominfo
			37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	0.60	0.60	8.33	15.97	23.61	31.25	38.88	38.88	DisPMD
	19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	7	7,5	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	Koordinasi Setda Bag. Kesra dengan Baznas Kab. HSS



4. PERENCANAAN KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai rencana tingkat capaiannya (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ada dalam Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET CAPAIAN
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya				
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,25
		2	Harapan lama sekolah	12,7
		3	Rata-rata lama sekolah	8,17
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	66,54
		5	PPH Ketersediaan	85,46
	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	61,00
Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,06



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET CAPAIAN
berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	wilayah	8	Indeks Gini	0,312
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	2,04
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	6,28
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,98
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,50
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,51
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	24 milyar
	Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5,00
	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp.5.374.026.000
Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian				
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	17	Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	51
		18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	63,60
		19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	65,60
		20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	48,00
		21	Persentase kecukupan RTH publik	24,85



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET CAPAIAN
		22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	59,98
Misi 4 : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan				
Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65
	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,58
		25	Persentase desa/kelurahan layak anak	3,38
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,27
Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27	Indeks Reformasi Birokrasi	72
		28	Predikat AKIP	A (80,01)
		29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		31	Indeks Profesionalisme ASN	73,17
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	39,47
		33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	15,97



5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,08	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 42.941.348.000
				2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,33		
				3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	6,87		
				4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	13,19	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 497.275.318
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,04	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Rp 58.012.591.582



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
							Masyarakat	
				6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	Persen	71,35	Program Pengendalian Penduduk Rp 28.178.100
							Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 260.310.225
							Program Pemberdayaa dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp 48.848.800
				7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	AA	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Rp 47.444.051.005
				8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	8,7	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 21.369.021.188
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	Skor	86,31	Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp 2.825.000
							Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 464.892.500



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	67,00	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulata dan kemandirian pangan	Rp 373.525.000
							Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 34.417.500	
							Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 573.601.000	
							Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 3.883.719.000	
							Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 3.389.895.500	
							Program peningkatan ketentraman dan ketrtiban umum	Rp 1.380.402.250	
							Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan	Rp 871.230.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
							kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
							Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Rp 101.150.000
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	Persen	71,19	Program Pemberdayaan Sosial Rp 4.644.731.700
		6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah				Program Pengelolaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 486.484.500
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka				Program Penanganan Bencana	Rp 454.569.900
				14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,96	Program Penempatan Tenaga Kerja Rp 109.240.000
							program pelatihan kerja dan produktifitas kerja	Rp 331.371.600



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	5,27	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 119.480.000
							Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Rp 25.000.000	
							program perencanaan dan pengembangan industri	Rp 387.464.500	
				16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,61	Program Pengembangan Ekspor	Rp 588.625.000
							Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 15.368.000	
							Program Standardisasi dan perlindungan konsumen	Rp 74.094.000	
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Rp 142.273.900	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							Penting		
							Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp 2.913.665.000	
							program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Rp 51.177.820	
							Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp 2.336.965.000	
				17	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,86	Program pengawasan penggunaan sarana pertanian	Rp 2.336.344.000
							Program pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota	Rp 849.263.500	
							Program pengendalian dan pengawasan penyediaan dan predaran benih/bibit ternak, dan	Rp 424.450.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
							hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	
							Program pengembangan prasarana pertanian	Rp 388.401.350
							Program pengembangan prasarana pertanian	Rp 1.620.973.000
							Program penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Rp 177.961.450
							Program pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Rp 63.383.000
							Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp 1.164.656.500



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							kabupaten/kota		
							Program penerbitana izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Rp 291.936.000	
							Program pelaksanaan penyuluhan pertanian	Rp 440.398.900	
				18	Persentase koperasi sehat	Persen	3,82	program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Rp 111.025.000
		9	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	19	Indeks Kemandirian Daerah	Persen		program pengembangan UMKM	Rp 100.000.000
						18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 994.635.475	
		10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	5,50	Program Promosi Penanaman Modal	Rp -
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp -	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
		11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	Rp 6.687.744.000	Program peningkata daya tarik destinasi pariwisata	Rp 3.195.901.000
							Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp 129.375.000	
							Program pemasaran pariwisata	Rp 1.667.032.707	
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	Persen	64,75	Program pengembangan Kebudayaan	Rp 1.085.368.000
							program pembinaan sejarah	Rp 318.891.000	
							program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp 256.125.000	
							Pengelolaan museum kabupaten/kota	Rp 80.753.000	
							Program penyelenggaraan	Rp 30.274.480.400	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							jalan		
							Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rp 1.437.984.206	
							Program pelayaran	Rp 378.850.000	
				23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	67,35	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp 17.443.473.500
				24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	67,00	Program penataan bangunan gedung	Rp 72.467.394.000
							Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Rp 10.423.287.000	
							Program pengelolaan dan pengembangn sistem drainase	Rp 1.958.069.000	
				25	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	24,86	program pengelolaan tanah kosong	Rp 104.644.000
				26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	67,43	Program pengembangan perumahan	Rp 78.750.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							program kawasan pemukiman	Rp 2.911.288.000	
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,67	Program peningkatan kerjasama desa	Rp 20.239.936
							Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 728.892.438	
							Program pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Rp 826.680.750	
							Program pengembangan Kapasitas Daya saing keolahragaan	Rp 4.516.288.250	
			Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,81	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan	Rp 27.452.800



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
			perlindungan terhadap anak				perempuan		
							program perlindungan perempuan	Rp 11.342.300	
				29	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	4,73	Program peningkatan kualitas keluarga	Rp 352.118.500
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 97.123.500	
							Program perlindungan khusus anak	Rp 17.162.400	
		15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55,44	Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 785.995.441
							Program pengelolaan keragaman hayati (KEHATI)	Rp 3.714.329.000	
							Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp 1.179.724.000	
							program	Rp	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	360.550.000	
							program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Rp 2.325.000	
							program pengelolaan persampahan	Rp 9.350.890.000	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31	Predikat AKIP	Predikat	A (80,01)	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp 2.032.232.050
				32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	A (4,65)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 558.627.200
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 2.472.360.826	
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 45.834.241	
							Program pemenuhan upaya kesehatan	Rp 13.806.181.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
							Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	Rp 9.718.800.000	
							program pendaftaran penduduk	Rp 160.624.700	
							program pencatatan sipil	Rp 130.375.000	
							program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp 38.425.000	
							Program perumusan kebijakan dan asistensi	Rp 1.094.863.650	
				33	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	90	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 549.602.250
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp 134.414.800	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 269.161.500	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.752.508.796	
							program penyelenggaraan Penataan ruang	Rp 570.813.000	
							Program pengembangan jasa konsruksi	Rp 296.880.000	
		17	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah	34	Opini WTP BPK	Persen	>80	Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Rp 213.901.267.600
				35	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	74,42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.211.892.900
							Program penyelenggaraan pengawasan	Rp 1.546.314.700	
							Pengembangan Sumber Daya	Rp 3.052.461.250	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
							Manusia		
							Program Kepegawaian Daerah	Rp 3.142.559.580	
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	65,79	Program Aplikasi informatika	Rp 5.355.360.000
							Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 2.588.493.000	
							Program pelayanan statistik dan sandi daerah	Rp 53.063.500	
				37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	23,61	Program administrasi pemerintahan desa	Rp 128.082.400
		19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	10,00	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp 9.461.353.525



C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri, yang mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala Daerah terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, atau kedalam arah kebijakan maupun strategi. Jika janji dari Kepala Daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan maupun strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.14
Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah



Berdasarkan penjelasan diatas, dan ilustrasi yang digambarkan diatas maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini

Tabel 1.9
Agenda Politik Kepala Darah

MISI I	Beasiswa bagi pelajar dan santri berprestasi kuliah di dalam dan ke luar negeri	Hibah/Bansos
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah	Program Peningkatan Mutu PAUD
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Bansos/ *level arah kebijakan*
	Generasi muda dan pelajar HSS bebas narkoba	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	BPJS semesta untuk semua warga	Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga
		level arah kebijakan



MISI 2	CINTA Berwirausaha	Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Mutu Produk Industri
	Resi Gudang	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan
	Asuransi bagi petani dan nelayan yang berpotensi gagal panen	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat
	Pertanian Organik	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
		Program Peningkatan Produksi Holtikultura
		Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan
MISI 3	Islamic Center	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman
		Level Arah Kebijakan
	Bantuan sarana dan prasarana untuk pesantren dan pendidikan negeri/ swasta	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik
		Level Arah Kebijakan
	Feri Penyeberangan	*Level Arah Kebijakan*
	Angkutan Mini Bagi Pelajar	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar
MISI 4	Hijau Desaku	Program Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Sehat
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal



		Pemakaman
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		APBDes
	BUMDes untuk peningkatan ekonomi desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
		APBDes
MISI 5	Aghniya (Hartawan) untuk HSS yang lebih baik	*Level Arah Kebijakan*

Melalui arah kebijakan diperoleh instrumen berupa program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Arah kebijakan diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

- Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
- Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja



(outcome) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

Setiap strategi mengandung berbagai program yang inherent dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata di tiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indicators dan leading indicators. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Penetapan program dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD).

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur berfikir dari masing- masing strategi yang dirumuskan kedalam arah kebijakan serta program prioritas, yang di rangkum dalam arsitektur-arsitektur pembangunan Kabupaten Hulu Sungai



Selatan periode 2018-2023. Adapun arsitektur yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Tabel 1.10
Program dan Kegiatan RPJMD 2018-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Misi 1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Dasar lainnya.																	
	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,80	69,41	259.826.578.068	70,25	251.455.177.717	71,08	259.643.041.738	71,86	262.062.928.299	72,57	260.619.610.322	72,57	1.293.607.336.144	
	Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Harapan lama sekolah	Tahun	12.05	12.70	15.598.510.850	12.89	16.595.684.600	13.08	16.595.684.600	13.29	16.595.684.600	13.52	16.595.684.600	13.52	81.981.249.250	
		2. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.71	8.00		8.17		8.33		8.44		8.53		8.53		
		3. Persentase PAUD Formal berakreditasi A	Persen	1.25	2,50		4,37		6,87		9,37		12,50		12,50		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4. Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	4,76	6,59		8,79		10,99		13,19		15,02		15,02		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Formal	Persen	72,98	76,55	958.800.000	77,80	958.800.000	79,05	958.800.000	80,30	958.800.000	81,55	958.800.000	81,55	4.794.000.000	
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	109,67	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	1.005.350.000	100	5.026.750.000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	94,29	97,45		98,00		98,30		99,00		99,50		99,50		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Persen	34,00	28,00		25,00		23,00		20,00		15,00		15,00		
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	93,14	89,17	-	90,49	450.000.000	91,37	450.000.000	92,25	450.000.000	93,13	450.000.000	93,13	1.800.000.000	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,29	79,45		79,90		80,25		82,15		85,00		85,00		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Persen	15,00	10,00		7,00		6,00		5,00		4,00		4,00		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	85,38	89,23	1000.000.000	91,15	1.200.000.000	93,06	1.200.000.000	94,30	1.200.000.000	96,14	1.200.000.000	96,14	5.800.000.000
	Program Peningkatan Budaya Baca	Persentase Peningkatan bahan Pustaka	Persen	0	20	277.850.000	40	415.350.000	60	415.350.000	80	415.350.000	100	415.350.000	100	1.939.250.000
	Program Peningkatan Akses Perpustakaan	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan	Persen	93,20	93,20	136.325.000	94,11	230.500.000	96,11	230.500.000	97,57	230.500.000	100	230.500.000	100	1.058.325.000
		Persentase Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang Aktif	Persen	27,39	27,39	86.211.250	34,24	201.710.000	41,09	201.710.000	47,94	201.710.000	54,79	201.710.000	54,79	893.051.250
	Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	Persen	12,19	15	-	16	4.186.400.000	17	240.550.000	18	240.550.000	19	240.550.000	19	4.908.050.000
	Sasaran 2 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5. Angka Harapan Hidup	Nilai (jumlah)	65,39	66,05	58.627.647.560	66,54	40.607.647.560	67,04	40.607.647.560	67,51	40.607.647.560	67,87	40.607.647.560	67,87	221.058.237.800



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	61,55	72,30	314.051.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	314.051.000
	Program Peningkatan Kesehatan ibu hamil bersalin, nifas, dan anak	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	persen	61,55	79,00	2.195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2.195.000.000
	Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Persentase pemenuhan Akses Prasarana Kesehatan	persen	77,08	80	-	83	1.800.000.000	84	1.800.000.000	87	1.800.000.000	89	1.800.000.000	89	7.200.000.000
		Persentase pemenuhan Akses Sarana Kesehatan	persen	17,64	20,50	850.990.735	21,45	850.990.735	22,40	850.990.735	23,36	850.990.735	24,79	850.990.735	24,79	4.254.953.675



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	persen	100	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	30.326.614.400	100	151.633.072.000
	Program Promosi kesehatan	Persentase Pemenuhan Layanana Promosi Kesehatan	persen	17,19	20,64	116.232.500	21,15	116.232.500	18,71	116.232.500	14,74	116.232.500	100	116.232.500	100	581.162.500
	Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Persentase pemenuhan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Dasar, Penyakit Menular dan Tidak Menular	persen	60,36	48,52	144.477.160	52,38	144.477.160	55,4	144.477.160	58,43	144.477.160	60,67	144.477.160	60,67	722.385.800
		Persentase Pemenuhan Capaian Indikator Pengendalian Penyakit Menular	persen	20,06	55,33		57,21		58,46		63,23		65,97		65,97	
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah dasar, ibu, dan lansia	Persen	61,55	-	-	81	2.509.051.000	82	2.509.051.000	83	2.509.051.000	84	2.509.051.000,00	84	10.036.204.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6. Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun	Persen	75,81	73,02	4.522.722.500	72,18	4.522.722.500	71,35	4.522.722.500	70,51	4.522.722.500	69,68	4.522.722.500	69,68	22.613.612.500
	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	6,67	9,92	39.978.600	29,76	39.978.600	49,60	39.978.600	69,44	39.978.600	89,28	39.978.600	89,28	199.893.000
		Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,69	78,99	4.482.743.900	79,29	4.482.743.900	79,59	4.482.743.900	79,89	4.482.743.900	80,19	4.482.743.900	80,19	22.413.719.500
		7. Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	BB	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AA	42.405.095.400	AAA	42.405.095.400	AAA	212.025.477.000
	Program Pembangunan/Peeliharaan Gedung Layanan	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	2,86	3,57	42.405.095.400	3,93	42.405.095.400	4,29	42.405.095.400	5	42.405.095.400	5,71	42.405.095.400	5,71	212.025.477.000
		8. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	4,35	4,35	132.458.828.957	4,35	132.458.828.957	8,7	133.646.692.978	13,04	137.066.579.539	17,39	140.623.261.562	17,39	676.254.191.993
	Program Peningkatan kualitas layanan	Persentase fasyankes yang terakreditasi	persen	4,35	4,35	15.358.773.713	4,35	15.358.773.713	8,7	15.358.773.713	13,04	15.358.773.713	17,39	15.358.773.713	17,39	76.793.868.565



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	rumah sakit	paripurna															
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82		82		82		82		82		82		82
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi Sempurna	Persen	4,35	4,35	32.790.755.244	4,35	32.790.755.244	8,70	32.790.755.244	13,04	32.790.755.244	17,79	32.790.755.244	17,79	163.953.776.220	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,87	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	82	-	-
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD, Kategori > B	Persen	-55	-66,9	84.309.300.000	-75,6	84.309.300.000	-79	85.497.164.021	-81	88.917.050.582	-85	92.473.732.605	-85	435.506.547.208	
		Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD, Kategori > B		-68	-72,03		-76,99		-77,97		-78,44		-78,93		-78,93		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Persentase Pemenuhan Tingkat Kesehatan RSUD, Aspek IPP RSUD, Dan Akreditasi RSUD , Kategori > B		-80	-80,5			-80,75			-81			-81,5			-82			-82	
	Sasaran 3 Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9. PPH Ketersediaan	Skor	83,19	84.61	814.022.500	85.46	814.022.500	86.31	814.022.500	87.17	814.022.500	88.04	814.022.500	88.04	4.070.112.500					
	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Ton	59,653	102,103	814.022.500	0	-	0	-	0	-	0	0	102,103	814.022.500					
	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Ton	59,653	102,092	-	117,092	677.451.000	132,092	677.451.000	147,092	677.451.000	162,092	677.451.000	162,092	2.709.804.000					
		Tingkat Fluktuasi harga	Persen	5,87	-	-	5,47	158.971.500	5,43	158.971.500	5,40	158.971.500	5,35	158.971.500	5,35	635.886.000					
	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	≤20%	≤17%	154.585.500	≤15%	177.850.400	≤13%	177.850.400	≤12%	177.850.400	≤10%	177.850.400	≤10%	865.987.100					



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Skor PPH Konsumsi	Skor	80,90	82,82	-	83,65	47.429.600	84,48	47.429.600	85,32	47.429.600	86,17	47.429.600	86,17	189.718.400
	Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	52	57	5.263.780.301	61	13.915.206.200	67	20.915.206.200	72	19.915.206.200	75	14.915.206.200	75	74.924.605.101
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pemenuhan SPM/SNP PAUD	Persen	0,62	1,25	528.579.000	1,87	528.579.000	2,50	528.579.000	3,12	528.579.000	3,75	528.579.000	3,75	2.642.895.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentase pemenuhan Aspek SPM Dikmas	Persen	18,51	25,92	1.723.775.000	25,92	1.723.775.000	29,92	1.723.775.000	33,33	1.723.775.000	37,03	1.723.775.000	40,74	8.618.875.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pemenuhan SPM/SNP SD	Persen	2,9	4,15	7.809.574.600	5,39	7.809.574.600	6,64	7.809.574.600	7,88	7.809.574.600	9,13	7.809.574.600	9,13	39.047.873.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pemenuhan SPM/SNP SMP	Persen	31,25	25	3.077.396.000	34	3.077.396.000	43,75	3.077.396.000	53,15	3.077.396.000	59,38	3.077.396.000	59,38	15.386.980.000
	Program peningkatan mutu sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan Kualitas Prasarana Kesehatan	persen	40,91	98,18	4.796.514.265	72,73	4.796.514.265	77,27	4.796.514.265	86,36	4.796.514.265	90,91	4.796.514.265	90,91	23.982.571.325



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	kesehatan																
		Persentase pemenuhan Kualitas Prasarana Kesehatan	Persen	14,29	38,10		52,38	180.000.000	66,67	180.000.000	80,95	180.000.000	90,48	180.000.000	90,48	900.000.000	
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	Persen	76,94	77,62	7.090.993.500	78,27	7.090.993.500	78,89	7.090.993.500	79,48	7.090.993.500	80,04	7.090.993.500	80,04	35.454.967.500	
	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	40,16	53,05	15.066.726.000	59,98	15.066.726.000	67,43	15.066.726.000	74,88	15.066.726.000	82,32	15.066.726.000	82,32	75.333.630.000	
	Sasaran 5 : Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11. Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	54,97	56,58	135.970.000	60,00	135.970.000	62,03	135.970.000	64,50	135.970.000	67,20	135.970.000	67,20	679.850.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial, yang aktif dalam penanganan masalah sosial	Persen	35,33		135.970.000	42	135.970.000	45,33	135.970.000	48,67	135.970.000	52	135970000	52	679.850.000
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kawasan Ketertiban Umum Yang Diobservasi	Persen	100	100	76.600.000,00	100	76.600.000,00	100	76.600.000,00	100	76.600.000,00	100	76.600.000,00	100	383.000.000
	Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Kebakaran dan Pemenuhan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	720.391.950.	100	3.601.959.750



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan penyelesaian penegakkan perda	Persen	25	37,50	86.030.000	50	86.030.000	63	86.030.000	75	86.030.000	100	86.030.000,00	100,00	430.150.000
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana	persentase pemenuhan prasarana penanggulangan bencana	Persen	100	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000	100	137.880.000		689.400.000
	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap	Waktu	<1 Jam	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000	<1 Jam	101.150.000		505.750.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,63	6,02	389.935.000	6,74	389.935.000	6,78	389.935.000	6,83	389.935.000	6,87	389.935.000	6,87	1.949.675.000
		Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	1,11	3,54	200.211.200	3,85	200.211.200	4	200.211.200	4,13	200.211.200	4,26	200.211.200	4,26	1.001.056.000
	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	60,2	63.008.650	65,22	63.008.650	70,23	63.008.650	75,25	63.008.650	80,27	63.008.650	80,27	315.043.250



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPB	Persen	18,18	18,18		36,36		54,55		72,73		100		100		
	Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	2. Tingkat Kemiskinan	Persen	5,80	5,32	6.781.750.500	5,06	6.781.750.500	4,80	6.781.750.500	4,54	6.781.750.500	4,28	6.781.750.500	4,28	33.908.752.500	
	Sasaran 6. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	Persen	5,80	5,14	6.781.750.500	5,06	6.781.750.500	4,80	6.781.750.500	4,54	6.781.750.500	4,28	6.781.750.500	4,28	33.908.752.500	
		13. Indeks Gini	Indeks	0,336	0,318		0,312		0,308		0,299		0,284		0,284	-	
	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persen	4,85	5,72	399.336.500	7,00	399.336.500	7,07	399.336.500	7,16	399.336.500	7,25	399.336.500	7,25	1.996.682.500	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Sosial (PMKS)															
	Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64	74,64	6.382.414.000	77,13	6.382.414.000	79,87	6.382.414.000	82,88	6.382.414.000	86,2	6.382.414.000	86,2	31.912.070.000	
		3. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,13	6,23	20.959.563.055	6,28	24.955.782.155	6,33	25.759.772.155	6,38	26.373.832.155	6,43	31.504.914.875	6,43	129.553.864.395	
	Sasaran 7. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2,07	212.645.500	2,04	212.645.500	1,96	212.645.500	1,99	212.645.500	1,86	212.645.500	1,86	1.063.227.500	
	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	3,1	3,18	184.554.250	3,35	184.554.250	3,56	184.554.250	3,81	184.554.250	4,11	184.554.250	4,11	922.771.250	
		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	75	80	14.340.000	85	14.340.000	90	14.340.000	95	14.340.000	95	14.340.000	95	71.700.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang di tempatkan	Persen	0,73	0,75	13.751.250	0,76	13.751.250	0,77	13.751.250	0,78	13.751.250	0,79	13.751.250	0,79	68.756.250
	Sasaran 8. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15. Persentase laju pertumbuhan kategori industri pengolahan	Persen	5,27	4,47	188.970.000	4,98	2.688.970.000	5,27	2.588.970.000	5,56	2.588.970.000	5,85	2.088.970.000	5,85	10.144.850.000
	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	Persen	3,94	4,18	71.005.000	6,96	71.005.000	9,75	71.005.000	12,54	71.005.000	15,32	71.005.000	13,92	355.025.000
		Persentase Peningkatan Kapasitas Produk Industri Kecil	Persen		5,58	117.965.000	11,16	117.965.000	16,74	117.965.000	22,32	117.965.000	27,90	117.965.000	27,90	589.825.000
	Program Pengembangan Sentra Industri	Persentase Pengembangan Sentra Industri	Persen	-	-	-	8,5	2.500.000.000	18	2.400.000.000	27	2.400.000.000	34	1.900.000.000	34	9.200.000.000
		16. Persentase laju pertumbuhan kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,41	5,38	7.509.351.000	5,5	7.509.351.000	5,61	7.509.351.000	5,72	7.509.351.000	5,83	7.509.351.000	5,83	37.546.755.000
	Program Peningkatan usaha sektor	Persentase pelaku usaha perdagangan non	Persen	11,05	11,05	817.098.000	10	817.098.000	8	817.098.000	7	817.098.000	5	817.098.000,00	5	4.085.490.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	perdagangan	formal terhadap pelaku perdagangan formal															
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	PAD sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	Rupiah	10 jt	35 jt	1.584.983.000	38 jt	1.584.983.000	41 jt	1.584.983.000	44 jt	1.584.983.000	45 jt	1.584.983.000,00	45 jt	7.924.915.000	
	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	97,42	97,42	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000	97	4.282.832.000,00	97	21.414.160.000	
		PAD sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	Rupiah	3,9 M	4,2M	824.438.000	4,3 M	824.438.000	4,4 M	824.438.000	4,5 M	824.438.000	4,6 M	824.438.000	4,6 M	4.122.190.000	
		17. Persentase laju pertumbuhan kategori pertanian dan perikanan	Persen	2,06	3.27	5.275.141.555	4.86	5.279.066.655	5.63	5.283.056.655	4.51	5.287.116.655	4.92	10.500.868.375	4.92	31.625.249.895	
	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Produksi Padi	Ton	253653	242707	446.812.500	247.335	446.812.500	253.506	446.812.500	255.048	446.812.500	258.133	474.180.000	256.620	2.261.430.000	
		Produksi Jagung	Ton	4.973	5.035	31.010.000	5.038	31.010.000	5.041	31.010.000	5.073	31.010.000	5.102	31.010.000	5.102	155.050.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Produksi Kacang Tanah	Ton	619,00	530	20.305.000	533	20.305.000	539	20.305.000	542	20.305.000	545	20.305.000	545	101.525.000
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Karet	Ton	124.692	115.568	221.150.000	115.637	221.150.000	115.705	221.150.000	115.774	221.150.000	115.842	221.150.000	115.842	1.105.750.000
		Produksi Kayu Manis	Ton	29.040	29.340	98.607.000	29.564	98.607.000	29.789	98.607.000	30.013	98.607.000	30.328	98.607.000	30.328	493.035.000
		Produksi Kelapa	Ton	79.464	80.875	8.502.500	81.074	8.502.500	81.276	8.502.500	81.473	8.502.500	81.672	8.502.500	81.672	42.512.500
		Produksi Aren	Ton	2400	2376	78.850.000	2388	78.850.000	2.400	78.850.000	2.412	78.850.000	2.424	78.850.000	2.424	394.250.000
	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabe	Ton	6.617	5.976	161.800.000	6.036	161.800.000	6.096	161.800.000	6.156	161.800.000	6.216	161.800.000	6.216	809.000.000
		Produksi Tomat	Ton	2.838	3.816	143.000.000	3.886	143.000.000	3.956	143.000.000	4.026	143.000.000	4.096	143.000.000	4.096	715.000.000
		Produksi Bawang Merah	Ton	38	48	79.735.500	60	79.735.500	72	79.735.500	84	79.735.500	96	79.735.500	96	396.877.500
	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah populasi ternak besar (sapi + kerbau)	Ekor	6.680	6.840	756.800.000	7.040	756.800.000	7.100	756.800.000	7.375	756.800.000	7.375	756.800.000	6.680	3.784.000.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	Ekor	2.713	2.824	340.000.000	2.916	340.000.000	2.998	340.000.000	3.184	340.000.000	3.184	340.000.000	2.713	1.700.000.000
		Jumlah populasi ternak unggas (ayam ras+ayam broiler+itik)	Ekor	3.012.120	3.014.446	198.768.000	3.015.781	198.768.000	3.018.429	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.019.791	198.768.000	3.012.120	993.840.000
	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	Terkendalinya kasus zoonosis	Ekor	6.937	7.037	62.200.000	7.137	62.200.000	7.237	62.200.000	7.337	62.200.000	7.437	62.200.000	6.937	311.000.000
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	Persen	2	3,00	27.900.000	5,00	27.900.000	5,50	27.900.000	6,00	27.900.000	7,00	27.900.000	7,00	139.500.000
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pengurangan hasil	Persen	0	0	201.279.200	0	201.279.200	0	201.279.200	0	201.279.200	0	1.006.396.000	0	201.279.200
		Penambahan jumlah alat pasca panen	buah	5	5		10		15		20		25		25	
	Program Peningkatan Kesejahteraan	Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Kelas	0	4	263.534.900	4	267.460.000	4	271.450.000	4	275.510.000	4	279.620.000	4	1.357.574.900



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Petani																
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan optimasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah	Ha	6.760	6.937	62.200.000	7.037	62.200.000	7.137	62.200.000	7.237	62.200.000	7.337	62.200.000	7.437	311.000.000	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.959	4.791	766.980.000	5.270	766.980.000	5.797	766.980.000	6.376	766.980.000	7.014	766.980.000	7.014	3.834.900.000	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	8.454	9.579	1.580.894.000	10.058	1.580.894.000	10.863	1.580.894.000	12.057	1.580.894.000	13.625	1.580.894.000	13.625	7.904.470.000	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	Persen	1	1	16.551.600	7	16.551.600	9	16.551.600	12	16.551.600	15	16.551.600	15	82.758.000	
		18. Persentase koperasi sehat	Persen	1,18	2,35	142.669.000	3,18	142.669.000	3,82	142.669.000	4,46	142.669.000	5,10	90.000.000	5,10	660.676.000	
	Sasaran 9. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19. Jumlah peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	21,10 Milyar	24,84 Milyar	1.110.908.000	25,34 Milyar	1.110.908.000	25,84 Milyar	1.110.908.000	26,34 Milyar	1.110.908.000	27 Milyar	1.110.908.000	28 Milyar	5.554.540.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan BPHTB	Rupiah	19.720.730.875	23,9 M	389.573.000	24,42 M	389.573.000	24,9 M	389.573.000	25,6 M	389.573.000	26,6 M	389.573.000	26,6 M	1.947.865.000
	Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	Rupiah	1.392.134.426	1,4 M	721.335.000	1,42 M	721.335.000	1,44 M	721.335.000	1,46 M	721.335.000	1,47 M	721.335.000	1,47 M	3.606.675.000
	Sasaran 10. Meningkatnya investasi PMDN	20. Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	3,00	4,80	124.113.000	5,00	124.113.000	5,50	124.113.000	6,00	124.113.000	7,00	124.113.000	7,00	620.565.000
	Program Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	57.151.000.000	580.000.000.000	124.113.000	600.000.000.000	124.113.000	650.000.000.000	124.113.000	700.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	124.113.000	770.000.000.000	620.565.000
	Program Penguatan Iklim Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap per Undang-undangan.	Persen	20	55	152.055.000	75	700.000.000	90	550.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	2.102.055.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sasaran 11. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21. Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rupiah	3.223.750.000	4.224.480.000	6.395.765.000	5.374.026.000	7.888.059.000	6.687.744.000	8.788.059.000	7.873.326.000	9.398.059.000	9.073.800.000	9.868.059.000	9.073.800.000	42.338.001.000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/ wisatawan	243.305	255.470	2.700.415.000	268.244	2.000.000.000	281.045	2.750.000.000	295.739	3.200.000.000	310.526	3.5000.000	310.526	14.150.415.000
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/ wisatawan	243.305	255.470	217.170.000	268.244	700.000.000	281.045	800.000.000	295.739	900.000.000	310.526	1.000.000.000	310.526	3.617.170.000
	Program Pengembangan Kemitraan	Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	malam	1	1,5	867.915.000	1,7	902.170.000	2	952.170.000	2,5	1.012.170.000	2,7	1.082.170.000	2,7	4.816.595.000
	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase tingkat pengembangan seni dan budaya	Persen	34,78	42,26	1.585.474.000	52,28	1.585.474.000	62,57	1.585.474.000	71	1.585.474.000	84,1	1.585.474.000	84,1	7.927.370.000
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	85,62	97,45	52.669.000	98,09	52.669.000	98,73	52.669.000	99,37	52.669.000	100	0	100	210.676.000
		persentase SDM Koperasi aktif yang berkualitas	Persen	30,50	31,21	90.000.000	41,63	90.000.000	52,05	90.000.000	62,46	90.000.000	72,88	90.000.000	72,88	450.000.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase SDM Usaha Kecil yang Berkualitas	Persen	9,1	10,5	90.737.000	23,00	90.737.000	30,5	90.737.000	38,00	90.737.000	45,5	90.737.000	45,5	453.685.000
Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian																
		Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen	67,49	49,64	103.176.464.475	51,00	181.035.097.500	50,38	165.535.097.500	51,31	150.535.097.500	50,90	140.535.097.500	50,90	740.816.854.475
		Sasaran 12. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen	74,00	62,45	42.382.391.975	63,6	49.500.000.000	64,75	44.000.000.000	65,8	44.000.000.000	67	44.000.000.000	67	223.882.391.975
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Km	629,91	536,7	24.486.571.500	0,3	7.500.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	2.000.000.000	0,8	37.986.571.500
		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Km	629,91	536,7	42.178.173.475	-	-	-	-	-	-	-	-	536,7	42.178.173.475
		Program Rehabilitasi Jalan	Km	629,91	-	-	546,58	59.164.744.975	556,46	59.164.744.975	565,44	59.164.744.975	575,77	59.164.744.975	575,77	236.658.979.900,00



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dan Jembatan															
		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	persen	93,33	92,86	864.544.000	94,29	864.544.000	94,88	864.544.000	95,19	864.544.000	95,45	864.544.000	95,45	4.322.720.000
			Persentase angkutan umum yang laik jalan		85,42	88,27		89,69		91,12		92,54		96,81		96,81	
		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar	persen	54,79	57,53	362.979.700	60,27	362.979.700	63,01	362.979.700	65,75	362.979.700	68,49	362.979.700	68,49	362.979.700
			23. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	80,00	62,68	10.078.240.000	65,6	10.078.240.000	67,35	10.078.240.000	69,1	10.078.240.000	71,43	10.078.240.000	71,43	50.391.200.000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	80	62,68	28.769.767.000	65,6	28.769.767.000	67,35	28.769.767.000	69,1	28.769.767.000	71,43	28.769.767.000	71,43	143.848.835.000
		Program Pengembangan Pengelolaan dan	Persentase jaringan irigasi	Persen	30	49,71	3.867.250.000	55,44	3.867.250.000	60,22	3.867.250.000	65	3.867.250.000	69,78	3.867.250.000	69,78	19.336.250.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	dalam kondisi baik															
		24. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	10	24	21.221.855.500	48	91.962.880.500	67	81.962.880.500	86	66.962.880.500	100	56.962.880.500	100	319.073.377.500	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	Buah	4	5	14.258.975.000	5	85.000.000.000	4	75.000.000.000	4	60.000.000.000	3	50.000.000.000	3	284.258.975.000	
	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	59	59	8.808.384.601	63	8.808.384.601	66	8.808.384.601	69	8.808.384.601	73	8.808.384.601	73	44.041.923.005	
		Persentase KK yang terlayani air limbah domestik	Persen	79,68	6,98		7,1		7,18		7,27		7,35		7,35	-	
	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat	Persen	1,09	1,81	74.806.250	3,63	74.806.250	5,44	74.806.250	7,26	74.806.250	9,07	74.806.250	9,07	374.806.250	
		25. Persentase Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas															



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	Persen	53	53,05	15.066.726.000	59,98	15.066.726.000	67,43	15.066.726.000	74,88	15.066.726.000	82,32	15.066.726.000	82,32	75.333.630.000
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	40,16	23,97	6.962.880.500	28,98	6.962.880.500	33,99	6.962.880.500	39	6.962.880.500	44,01	6.962.880.500	44,01	34.814.402.500
		26. Persentase kecukupan RTH publik	Persen	24,82	24,84	14.427.251.000	24,85	14.427.251.000	24,86	14.427.251.000	24,87	14.427.251.000	24,87	14.427.251.000	24,87	72.136.255.000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Persentase kecukupan RTH Publik	Persen	24,82	24,84	3.523.951.000	24,85	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	17.619.755.000
	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	Persen	0	12	10.903.300.000	24	10.903.300.000	36	10.903.300.000	48	10.903.300.000	60	10.903.300.000	60	54.516.500.000
Misi 4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan																



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tujuan 4 Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	1.202.202.500
	Sasaran 13. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,64	240.440.500	0,65	240.440.500	0,67	240.440.500	0,69	240.440.500	0,71	240.440.500	0,71	1.202.202.500
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	70,00	73,63	201.275.500	77,32	201.275.500	81,01	201.275.500	84,7	201.275.500	88,38	201.275.500	88,38	1.006.377.500
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Persen	4,16	13,88	39.165.000	21,52	39.165.000	29,16	39.165.000	36,8	39.165.000	44,44	39.165.000	44,44	195.825.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan & pemuda berprestasi bidang	Persen	66,67	77,78	479.681.000	88,89	479.681.000	88,89	479.681.000	100	479.681.000	100	479.681.000	100	2.398.405.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		kepaskibrakaan															
	Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi	Persen	31,25	31,25	952.815.750	43,75	952.815.750	53,13	952.815.750	59,38	952.815.750	71,88	952.815.750	71,88	4.764.078.750	
		6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,07	90,27	165.232.800	90,58	165.232.800	90,81	165.232.800	90,91	165.232.800	91,27	165.232.800	91,27	826.164.000	
	Sasaran 14. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,07	90,28	48.542.500	90,58	48.542.500	90,81	48.542.500	90,91	48.542.500	91,27	48.542.500	91,27	242.712.500	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	36,84	36,84	38.497.500	52,63	38.497.500	68,42	38.497.500	84,21	38.497.500	100	38.497.500	100	192.487.500	
	Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan	Persen	8,11	8,11	10.045.000	21,08	10.045.000	33,51	10.045.000	45,41	10.045.000	52,97	10.045.000	52,97	50.225.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		perempuan yang aktif															
		29. Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	0,68	2,03	116.690.300	3,38	116.690.300	4,73	116.690.300	6,08	116.690.300	7,43	116.690.300	7,43	583.451.500	
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Institusi/lembaga yang mengimplementasikan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	77,55	77,55	92.724.300	83,67	92.724.300	89,8	92.724.300	95,92	92.724.300	100	92.724.300	100	463.621.500	
	Program Peningkatan Pelindungan Anak	Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis kluster	Persen	18,52	27,78	23.966.000	55,56	23.966.000	79,63	23.966.000	98,15	23.966.000	100	23.966.000	100	119.830.000	
		7. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	55,08	9.028.264.200	55,27	9.028.264.200	55,44	9.028.264.200	55,6	9.028.264.200	55,77	9.028.264.200	55,77	45.141.321.000	
	Sasaran 15. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	55,08	9.028.264.200	55,27	9.028.264.200	55,44	9.028.264.200	55,60	9.028.264.200	55,77	9.028.264.200	55,77	45.141.321.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Persentase indeks kualitas Udara titik pantau yang memenuhi	Persen	85	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	2.203.478.200	85	11.017.391.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Lingkungan Hidup	standar															
		Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen		51		51,5		52		52,5		53		53	-	
		Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan	Persen		35,34		35,49		35,63		35,78		35,93		35,93	-	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52	52,53	6.824.786.000	48,38	6.824.786.000	46,97	6.824.786.000	45,59	6.824.786.000	44,06	6.824.786.000	44,06	34.123.930.000	
		Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	27	27,47		26,63		27,02		27,41		27,94		27,94	-	
		Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72	72,6		80,82		87,67		94,52		100		100	-	
	Tujuan 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	68	34.493.888.946	72	34.820.013.946	78	35.853.513.946	83	35.331.013.946	88	36.276.013.946	88	176.774.444.730	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi																
	Sasaran 16. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31. Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	924.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	1.304.396.260	A	6.141.981.300	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP pada komponen pelaporan	Nilai	10,66	12,06	255.731.260	12,4	255.731.260	12,52	255.731.260	13,45	255.731.260	14,38	255.731.260	14,38	1.278.656.300	
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,0356	3,1173	272.800.000	3,1746	272.800.000	3,2100	272.800.000	3,2376	272.800.000	3,264	272.800.000	3,264	1.364.000.000	
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Persen	100	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	350.095.000	100	1.750.475.000	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem	Persentase SOP Sesuai Standar.	Persen	100	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	79.325.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dan Prosedur															
		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				394.116.850		394.116.850		394.116.850		394.116.850		394.116.850		1.970.584.250	
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03	81,89			82,55		83,79		86,42		89,02		89,02	
		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100	100			100		100		100		100		100	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Daha Sejahtera	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	82	6.212.383.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Daha Sejahtera	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	82	372.759.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya dilaksanakan dengan baik.	persen	100	100	5.852.330.200	100	5.852.330.200	100	5.852.330.200	100	5.852.330.200	100	5.852.330.200	100	29.261.651.000
	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan kemitraan dengan kelembagaan organisasi masyarakat yang terdaftar	Persen	70	71	112.395.000	72	112.395.000	73	112.395.000	74	112.395.000	75	112.395.000		561.975.000
		32. Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	20.481.619.536	A	102.408.097.680
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	3	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	285.715.900	3	1.428.579.500
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal baik (B)	Nilai	3,90	4,51	167.075.000	4,60	167.075.000	4,65	167.075.000	4,80	167.075.000	5,00	167.075.000	5,00	835.375.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	Persentase Pemenuhan Aspek Sarana IPP RSUD	Persen	0,71	0,89	17.025.339.636	0,98	17.025.339.636	1,07	17.025.339.636	1,25	17.025.339.636	1,43	17.025.339.636	1,43	85.126.698.180
	Program Pembangunan/Pe meliharaan Gedung Layanan	Persentase Pemenuhan Aspek Prasarana IPP RSUD	Persen	2,86	3,57	42.405.095.400	3,93	42.405.095.400	4,29	42.405.095.400	5,00	42.405.095.400	5,71	42.405.095.400	5,71	212.025.477.000
	Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	Persen	98	98	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	1.717.805.000	99	8.589.025.000
	Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Validitas database kependudukan	Persen	80	95	245.978.000	96	245.978.000	97	245.978.000	98	245.978.000	99	245.978.000	99	1.229.890.000
	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	90	90	197.010.000	91	197.010.000	91	197.010.000	92	197.010.000	92	197.010.000	92	985.050.000
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	1.088.674.000	100	5.443.370.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase OPD yang mengelola Arsip	Persen	26,00	39,47	102.096.000	52,63	388.959.500	65,78	388.959.500	78,95	388.959.500	92,10	388.959.500	92,10	1.657.934.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	56.850.192.689	100	56.850.192.689	100	56.850.192.689	100	56.850.192.689	100	56.850.192.689	100	284.250.963.445
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	21.751.194.361	100	21.751.194.361	100	21.751.194.361	100	21.751.194.361	100	21.751.194.361	100	108.755.971.805
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Persen	61,11	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	274.828.125	100	1.374.140.625,00
	Program Peningkatan Pelayanan Perundang - Undangan dan Hubungan Masyarakat	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	100	100	455.885.000,00	100	455.885.000	100	455.885.000	100	455.885.000	100	455.885.000	100	2.279.425.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan	Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	17.638.260.000,00	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	19.241.560.000	100	96.207.800.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengawasan																
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	316.100.000,00	100	316.100.000	100	316.100.000,00	100	316.100.000	100	316.100.000	100	1.580.500.000	
	Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	Persen	100	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	490.404.800	100	2.452.024.800.	
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	200.640.000	100	1.003.200.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Tingkat kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	791.400.000,00	100	791.400.000,00	100	791.400.000,00	100	791.400.000,00	100	791.400.000,00	100	3.975.000.000	
	Program Pelayanan Keprotokolkan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	2.319.742.500,00	100	2.319.742.500,00	100	2.319.742.500,00	100	2.319.742.500,00	100	2.319.742.500,00	100	11.598.712.500	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentasi PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100	100	618.089.000	100	718.089.000	100	758.089.000	100	789.089.000	100	789.089.000	100	3.672.445.000
		Persentase Pemenuhan Peningkatan standardisasi Sistem LPSE	Persen	58,82	70,59	541.115.000	88,24	758.089.000	100	789.089.000	100	841.115.000	100	891.115.000	17	3.820.523.000
	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Persentase policy brief bidang perekonomian dan Pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	50	75	113.625.000	100	113.625.000	100	113.625.000	100	113.625.000,00	100	113.625.000	100	568.125.000
	Program Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang diimplementasikan	Persentase	10	20	62.250.000,00	40	62.250.000,00	60	62.250.000,00	80	62.250.000,00	100	62.250.000,00	100	62.250.000,00
		33. Persentase kualitas aspek perencanaan	Persen	54,33	60,29	2.817.875.000	62,82	2.764.000.000	63,81	3.322.500.000	65,45	3.100.000.000	67,09	4.045.000.000	67,09	16.049.375.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan terhadap dokumen	Persen	100	100	1.067.150.000	100	539.000.000	100	1.075.000.000	100	800.000.000	100	1.330.000.000	100	4.811.150.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		perencanaan															
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80	86.800.000	90	100.000.000	95	110.000.000	95	120.000.000	100	120.000.000	100	536.800.000	
	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	90	209.100.000	90	270.000.000	90	275.000.000	90	280.000.000	90	280.000.000	90	1.314.100.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	211.050.000	100	290.000.000	100	292.500.000	100	325.000.000	100	335.000.000	100	1.453.550.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100	100	598.125.000	100	815.000.000	100	820.000.000	100	825.000.000	100	980.000.000	100	4.038.125.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					2019		2020		2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Tingkat kesesuaian RTRW dengan pelaksanaan pembangunan	Persen	0	9,09	645.650.000	18	750.000.000	27	750.000.000	36	750.000.000	55	1.000.000.000	55	3.895.650.000		
	Sasaran 17. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	4.549.098.000	WTP	22.745.490.000		
	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Persen	100	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	244.038.000	100	1.220.190.000		
	Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Persen	100	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	3.096.475.000	100	15.482.375.000		
	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56	36	1.208.585.000	25	1.208.585.000	23	1.208.585.000	20	1.208.585.000	18	1.208.585.000	18	6.042.925.000		



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	Persen	100	100		100			100		100		100		100	-
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	75,79	64		75			77		80		82		82	-
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	93,75	100		100			100		100		100		100	-
	Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Bulan	7	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	7	470.524.000	2.352.620.000
	Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang	Persen	100	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	100	58.100.000	290.500.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Berlaku															
		35. Indeks profesionalisme ASN	Indeks	48,63	69,77	3.214.993.150	73,17	3.214.993.150	74,42	3.214.993.150	78,12	3.214.993.150	81,33	3.214.993.150	81,33	16.074.965.750	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Persen	21,87	37,5	558.660.000	19	558.660.000	9	558.660.000	19	558.660.000	28	558.660.000	28	2.793.300.000	
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Persen	50,89	64,43	390.000.000	67,67	510.000.000	71	630.000.000	72,67	510.000.000	74,50	570.000.000	74,50	2.610.000.000	
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Persen	28,1	43,55	1.378.463.000	46,78	7.186.249.600	50,37	1.378.463.000	54,32	1.378.463.000	56,32	1.378.463.000	56,84	12.700.101.600	
	Program Pembinaan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Persen	Kenaikan 22%	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000	20	117.063.000,00	100	585.315.000	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawain	Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Persen	88,4	91	623.394.400	93	623.394.400	96	623.394.400	98	623.394.400	100	623.394.400	100	3.116.972.000
		Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Persen	86,8	89,5		92		95		98		100		100	-
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	147.412.750	100	737.063.750
	Sasaran 18. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	13.16	2.285.070.000	39.47	2.285.070.000	65.79	2.760.070.000	92.11	2.460.070.000	100	2.460.070.000	100	12.250.350.000
	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0	1	1.460.070.000	9	1.460.070.000	19	1.460.070.000	29	1.460.070.000	38	1.460.070.000	38	7.300.350.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0	5	825.000.000	15	825.000.000	25	1.300.000.000	35	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	4.950.000.000
	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen	0	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	124.345.000	100	621.725.000
		Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	4.224.875.000	100	21.124.375.000
	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	100.145.000	100	500.725.000
		78. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	0,60	8,33	220.837.000	15,97	220.837.000	23,61	220.837.000	31,25	220.837.000	38,88	220.837.000	38,88	1.104.185.000



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	Persen	10,41	25,69	220.837.000	33,33	220.837.000	40,97	220.837.000	48,61	220.837.000	56,25	220.837.000	56,25	1.104.185.000
	Sasaran 19. Meningkatnya Kehidupan Sosial Keagamaan	38.Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	7	8	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000).	9	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000)	10	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000)	11	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000)	12	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000)	12	102.263.800.350 (323.250.000)
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah (Pada Setda Kab. HSS)	Tingkatn Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	20.452.760.070(Pada Setda Kab.HSS 65.650.000)	100	20.452.760.070(Pa da Setda Kab.HSS 65.650.000)	100	20.452.760.070(Pa da Setda Kab.HSS 65.650.000)	100	20.452.760.070(Pa da Setda Kab.HSS 65.650.000)	100	20.452.760.070(Pa da Setda Kab.HSS 65.650.000)	100	102.263.800.350 (323.250.000)
JUMLAH						618.815.655.834		696.759.914.284		678.518.481.705		666.842.954.266		662.108.561.589		3.323.045.567.678



D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Tahun 2021 merupakan yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembangunan daerah pada tahun 2021 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Sektor Unggulan Pertanian, Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif”**

Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk dana Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan	12	47	274.467.205.541,00
2	Dinas Kesehatan	12	51	142.395.390.616,00
3	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	5	8	175.497.746.995,00



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12	28	113.897.667.775,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	9	26	45.547.265.516,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7	16	10.423.997.147,00
7	Dinas Sosial	7	18	41.182.856.550,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian	9	22	7.476.932.866,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9	19	8.066.655.400,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	6	16	7.196.522.197,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	15	5.313.808.725,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	17	4.877.595.800,00
13	Dinas Perhubungan	6	17	6.844.963.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	16	13.231.391.200,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	16	7.267.334.525,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	8	22	18.000.734.990,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	16	5.359.700.100,00
18	Dinas Perikanan	8	21	7.399.131.600,00
19	Dinas Pertanian	11	29	25.173.545.500,00



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
20	Dinas Perdagangan	6	17	9.929.402.500,00
21	Kecamatan Sungai Raya	4	19	3.185.584.700,00
22	Kecamatan Padang Batung	4	18	3.668.004.160,00
23	Kecamatan Telaga Langsat	4	17	3.118.817.250,00
24	Kecamatan Angkinang	4	19	4.195.826.000,00
25	Kecamatan Kandangan	4	29	14.245.363.900,00
26	Kecamatan Simpur	4	19	4.416.900.500,00
27	Kecamatan Daha Selatan	4	19	3.588.905.520,00
28	Kecamatan Daha Utara	4	18	3.351.705.000,00
29	Kecamatan Kalumpang	4	19	3.381.693.020,00
30	Kecamatan Loksado	4	17	3.048.569.100,00
31	Kecamatan Daha Barat	4	18	2.718.029.600,00
32	Inspektorat	7	22	10.032.215.000,00
33	Sekretariat DPRD	6	24	37.749.754.425,00
34	Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	1	3	713.369.500,00
35	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	1	3	1.479.177.500,00



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
36	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	3	10.512.393.750,00
37	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	3	887.024.000,00
38	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Kehumasan	1	3	2.204.880.000,00
39	Sekretariat Daerah Bagian Umum	3	11	9.850.851.230,00
40	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	3	3	718.993.972,00
41	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Tata Usaha	4	10	19.547.093.940,00
42	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	8	23	6.451.319.700,00
43	Badan Keuangan Daerah	9	31	245.206.378.400,00
44	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik	6	18	6.389.328.800,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	21	15.267.157.490,00
JUMLAH		259	826	1.345.479.185.000,00

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan, 2021

E. INOVASI DAERAH

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021 melalui Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 2,93495 (kategori tinggi/warna hijau).

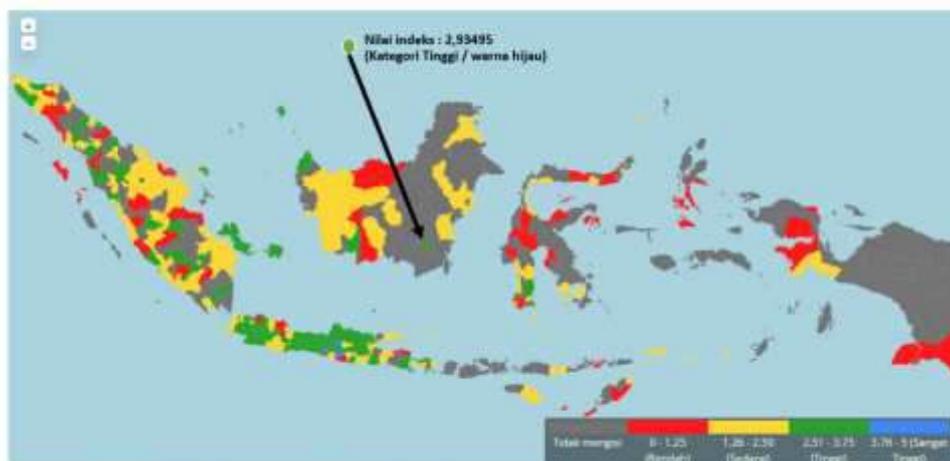


Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021 mengalami penurunan nilai indeks sebesar 0,13985, kalau dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mendapat nilai 3,0748. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, serta adanya kebijakan perubahan oleh BRIN terkait nilai indikator pembentuk nilai indeks.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak di semua sektor. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pertanian, pariwisata dan UMKM serta industri. Sektor-sektor inilah yang salah satunya menjadi *point policy brief* dalam hal pemulihan ekonomi daerah.

Dengan nilai indeks sebesar 2,93495 (kategori tinggi / warna hijau) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam 4 besar Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi di Pulau Kalimantan.

Gambar 1.15
Peta Daya Saing Daerah Tahun 2021



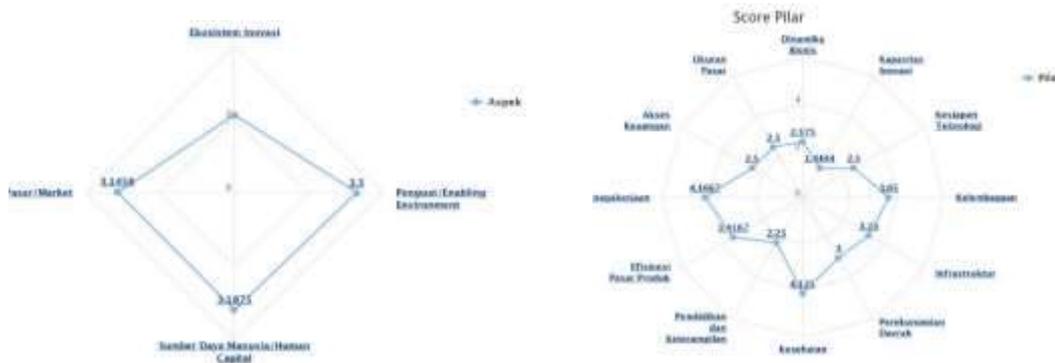
Sumber : <https://indeks-inovasi.brin.go.id>



IDSD menampilkan nilai dari 4 aspek, 12 pilar dan 23 dimensi. Dari nilai indeks ini terlihat dimana yang kuat dan potensial, serta sektor mana yang mengalami kelemahan dan membutuhkan fokus serta intervensi dari Pemerintah Daerah. Hasil IDSD ini juga menjadi bagian dari evaluasi secara makro dan umpan balik terhadap proses perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah.

Gambar 1.16

Nilai IDSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dalam Aspek dan Pilar



Sumber : <https://indeks-inovasi.brin.go.id>

Aspek Faktor Penguat/*Enabling Environment* mendapatkan indeks sebesar 3,30000, Sumber Daya Manusia/*Human Capital* sebesar 3,18750, Faktor Pasar/*Market* sebesar 3,14583 dan Ekosistem Inovasi sebesar 2,10648. Dari hasil pengukuran ini Ekosistem Inovasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten untuk mendongkrak daya saing daerah. Serta seraya mengoptimalkan modal serta peluang yang ada pada aspek Faktor Penguat/*Enabling Environment*, Sumber Daya Manusia/*Human Capital* dan Faktor Pasar/*Market*.



Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021 ini baik secara aspek dan pilar kemudian dikalsifikasi dalam 2 kategori, Pertama ; aspek dan pilar yang menjadi peluang dan modal dalam penguatan IDSD (berwarna hijau), dan Kedua ; aspek dan pilar yang menjadi kendala dan kelemahan dalam penguatan IDSD (berwarna kuning) dan ini akan menjadi fokus dan perhatian dalam proses perencanaan dan pembangunan ke depan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 1.12
Klasifikasi Nilai Indeks Aspek dan Pilar IDSD 2021

Hasil Pemetaan Aspek			Hasil Pemetaan Pilar		
No.	Aspek	Indeks	No.	Pilar	Indeks
1	Ekosistem Inovasi	2,10648	1	Dinamika Bisnis	2,375
2	Sumber Daya Manusia/Human Capital	3,18750	2	Kapasitas Inovasi	1,444444333
3	Faktor Pasar/Market	3,14583	3	Kesiapan Teknologi	2,5
4	Faktor Penguat/Enabling Environment	3,30000	4	Kelembagaan	3,65
			5	Infrastruktur	3,2500005
			6	Perekonomian Daerah	3,0000005
			7	Kesehatan	4,125
			8	Pendidikan dan Keterampilan	2,25
			9	Efisiensi Pasar Produk	3,416666667
			10	Ketenagakerjaan	4,166667
			11	Akses Keuangan	2,5
			12	Ukuran Pasar	2,5

Aspek dan Pilar yang menjadi Pelua
Aspek dan Pilar yang menjadi Kendala

Salah satu unsur penyumbang dalam membentuk Indeks Daya Saing Daerah adalah Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana pada tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 61,83 (Kategori Sangat Inovatif) dan Kembali masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif secara Nasional di Innovative Government Award 2021, yang mana pada tahun 2019 dan 2020 juga masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif.



Gambar 1.17

Nilai Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>

Gambar 1.18

Penghargaan Innovative Government Award 2021 untuk
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : <https://mediakalimantannews.com> dan <https://apahabar.com>

Pencapaian ini dilakukan dengan melakukan beberapa terobosan yaitu Pembuatan SK Tim Kabupaten, Terintegrasi, pelaksanaan Lomba Inovasi Kabupaten (HSS Innovation Awards



2021) dan membangun Sistem Informasi Inovasi Daerah – SENADA di <https://senada.hulusungaiselatankab.go.id/>

Gambar 1.19
Terobosan Pengembangan Inovasi di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan



Pelaksanaan lomba HSS Innovation Awards 2021 merupakan ajang dokumentasi, seleksi dan apresiasi serta penghargaan bagi inovasi-inovasi yang tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari hasil lomba ini selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan yang memenuhi syarat serta kriteria diikutsertakan dalam ajang Innovative Government Award (Kemendagri), Sinovik (Kemenpan RB), Inovasi Desa (Kemendes), Inagara (LAN) dan PPD – Penghargaan Pembangunan Daerah (Bappenas).

Secara rinci tujuan pelaksanaan lomba HSS Innovation Awards 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan



- peningkatan kualitas pelayanan publik, indeks daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Memotivasi penyelenggara Inovasi Daerah untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme.
 3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovasi yang ditetapkan sebagai Top Inovasi dan kepada seluruh inovator;
 4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik, indeks daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi;
 5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran.

Gambar 1.20

Proses Pelaksanaan HSS Innovation Awards 2021



Dari pelaksanaan HSS Innovation Awards 2021 terdapat 154 Inovasi yang terbagi dalam 5 kelompok peserta yaitu SKPD, Kecamatan, Desa, Umum dan Teknologi Tepat Guna.

154 inovasi masuk dalam tahapan verifikasi dan evaluasi, 30 inovasi terbaik masuk dalam tahapan presentasi dan wawancara di hadapan Tim Independen dari BRIN, Kemendagri, KemenPAN RB, Badan Litbang Provinsi Kalimantan Selatan dan Tokoh

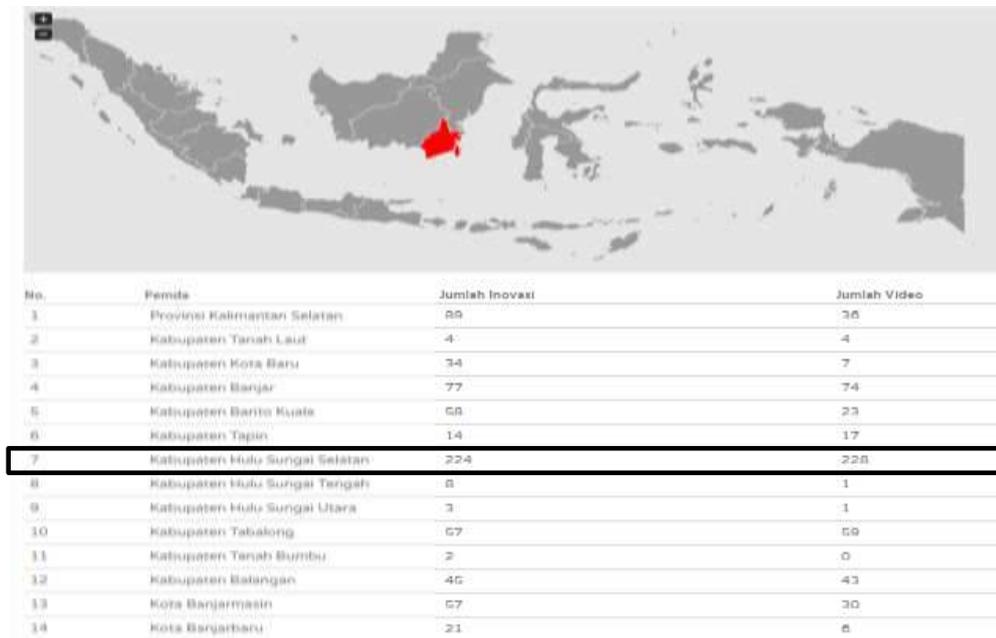


Masyarakat dan pada tahapan akhir adalah penganugerahan bagi 15 Inovasi terbaik Tahun 2021 oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

Perkembangan inovasi di Hulu Sungai Selatan juga terlihat dari kuantitas/jumlah Inovasi yang terdata aplikasi Kemendagri di <https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> yang mana secara jumlah inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan jauh lebih banyak kalau di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 1.21

Jumlah Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan



1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penerapan SPM guna memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terdiri dari empat tahapan, sebagai berikut:



1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam penerapan SPM tersebut ketentuan utamanya adalah pemda wajib memprioritaskan Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Hal ini dapat diketahui dengan baik berdasarkan hasil pengumpulan data.

Pertama, tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah:

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
2. Khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan di daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.
3. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
4. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Pengumpulan dan pendataan ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018.



6. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah perlu diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pada tahapan ini beberapa langkah yang mesti dilakukan adalah:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
2. Ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana di atas diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil penghitungan pada poin (1) di atas digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia, karena: (a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; (c) kondisi bencana; dan/atau (d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.



Ketiga, tahapan penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar (RPPD). RPPD ini merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahapan ini beberapa langkah yang mesti dilaksanakan adalah:

1. Pemda menyusun RPPD sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang telah dibuat di atas, yang juga termuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Perangkat Daerah (PD) memprioritaskan penyusunan RPPD berdasarkan penghitungan kebutuhan di atas, ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Penyusunan RPPD yang dimuat dalam dokumen RPJMD, meliputi: (a) gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemda; (b) gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; (c) permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; (d) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar; (e) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan (f) kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Penyusunan RPPD yang dimuat dalam dokumen RKPD, meliputi: (a) gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; (b) kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; (c) sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan; (d) rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan (e) kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Penyusunan RPPD yang dimuat dalam dokumen Renstra PD, meliputi: (a) gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar; (b) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; (c) tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; (d) strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; (e) rencana



program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan (f) kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Penyusunan pencapaian RPPD yang dimuat dalam dokumen Renja PD, meliputi: (a) hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; (b) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan (c) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
8. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
10. Kepastian besaran anggaran untuk program dan kegiatan tersebut didasarkan pada RPPD sebagaimana terurai di atas.



Keempat, tahapan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pada tahapan ini beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah:

1. Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan RPPD.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan beberapa hal berikut: (a) membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (b) memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

2.1.1 Indek Pembangunan Manusia

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan maupun penurunan besaran persen dari komponen pembentuk IPM, seperti umur harapan hidup, harapan sekolah, rata-rata lama sekolah atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perubahan dari masing-masing komponen tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Perkembangan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara perlahan bergerak naik mencapai 69,21 di tahun 2021 (masuk dalam kategori sedang), atau meningkat sekitar 0,36 poin dari tahun sebelumnya (68,85). Peningkatan IPM tahun 2021 ini lebih tinggi dari peningkatan IPM tahun 2020 yang meningkat hanya sebesar 0,05 poin.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan yang digunakan



sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 494.203,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya perbulan kurang dari Rp. 494.203,- dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Besaran garis kemiskinan tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan dari tahun 2020. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,466 ribu orang atau sekitar 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,385 ribu orang atau 5,17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1.3 Angka Pengangguran

TPT (Tingkat pengangguran terbuka). Merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja. TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah 2,44 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 2 orang. Ditengah pandemi Covid 19 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menahan laju peningkatan angka pengangguran, hal ini ditunjukkan dengan indikator TPT yang mengalami peningkatan hanya sebesar 0,20 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 2,24 persen.

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian dan



merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku (adhb) maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 (adhk), secara agregat menunjukkan perkembangan yang terus meningkat selama periode 2016 – 2020. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan adhb sebesar 6,60 Triliyun rupiah, sementara adhk sebesar 4,65 Triliyun rupiah. Angka yang dicapai pada tahun 2020 ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya.



Secara kuantitas, ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 tetap stabil walaupun ditengah pandemic Covid 19.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Tahun 2019 PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 27.611.900 dan tahun 2020 sebesar 27.323.226.

2.1.6 Gini Ratio

Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif



merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 gini rasionya sebesar 0,275. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Demikian juga pada tahun 2021 menjadi 0,275 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (0,300). Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

Capaian Kinerja makro Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indek Pembangunan Manusia	68,85	69,21	0,52
2	Angka Kemiskinan	5,17	4,84	(6,38)
3	Angka Pengangguran	2,24	2,44	8,93
4	Pertumbuhan Ekonomi	(1,19)	4,18	(451,26)
5	Pendapatan Perkapita	28.833	30.497	5,77
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,30	0,28	(8,33)



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Keluaran (Output)

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	160 Buah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7310 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima Pembebasan biaya pendidikan	7310 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	889 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	889 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain ataupsikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	431 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari Lembaga pemerintah	116 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	278 SD & SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17.787 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.391 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	17.346 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima embebasan biaya pendidikan	5391 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1191 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	254 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.849 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	464 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	968 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	259 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	650 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	205 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	735 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	246 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	31 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	28 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	22 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	82 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	278 SD & SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17787 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5391 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17346 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5391 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1191 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	254 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.849 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	464 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	968 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	259 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	650 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	205 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	735 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	246 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	31 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	176 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	28 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	82 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.409 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.409 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	364 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	364 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	324 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	31 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.	15 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5 RS	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	208 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk persalinan sesuai standar	208 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal	208 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	208 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan anak usia dini dasar sesuai standar	105 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	72 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	21 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	72 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	72 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	53 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	92 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	68 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan abupaten/kota (ha)	23,021 Ha	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	522.957 m	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS wewenangan kabupaten /kota (m)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan	0	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	23,021 Ha	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang sungai di Kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	522.957 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kabupaten/ kota (ha)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rencana Teknis tata	ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	82, 58 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	72,38 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	60,10 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	10 Kerjasama	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	10 Izin	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	46.286 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	754 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	47.087 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	294 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	294 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa	294 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengolahan air limbah domestik			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0,52 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	4,96 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1,39 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	83,18 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100,00 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan Prasarana pengolahan lumpur tinja	83,64 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100,00 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,52 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	71 IMB	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	9	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	17 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2677 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2677 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	859,36 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang dibangun	0,30 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang dibangun	128,60 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	7,05 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	128,60 M	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	12,94 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	169,60 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang dipelihara	12,86 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang dipelihara	169,60 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	2 Kali	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kerja perator /teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	150 Orang	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi analisis di wilayah kabupaten/kota	137 Orang	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		wilayah Kab/Kota			
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	532	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0 Rumah	Dinas Perumahan	Tidak ada bencana



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0 RT, KK dan Jiwa	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0 RT, KK dan Jiwa	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Belum ada lokasi Pencadangan lahan
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	171,95 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	856 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	92,05 Ha	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah di kab/ kota	69.181 Buah Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	856 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah tidak layak huni	5.817 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Semua Rumah dihuni
		Rasio rumah dan KK	82,78 %	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah pembangunan baru	33 Buah	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	47 Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1.418 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1.418 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	1.418 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1.418 Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1.418 Rumah	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	1 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	6 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	35 Pelanggaran	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1100 Orang	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	14 Perda	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	18	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	75 %	BPBD Kab. HSS	Draft Dokumen KRB
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100,00 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	75 %	BPBD Kab. HSS	Draft Dokumen RBP
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100,00 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,24 %	BPBD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,18 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	33,33 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Tidak ada korban	BPBD Kab. HSS	Pernyataan bahwa tidak ada Korban bencana
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran	5	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	Pernyataan bahwa tidak ada penyelamatan dan evakuasi kondisi yang



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan Penyelamatan di kabupaten /kota			mambahayakan manusia.
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	58	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	57	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	5	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1309	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	5	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Layanan	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2300 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	76 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	52 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 Buah	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	518 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Buah	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	63 orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	15 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	11 alat bantu	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	17 Paket	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	17 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	330 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	21 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	100 kali	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	237 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	21 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	26 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	31 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	205 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	207 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Tempat	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	17 Paket	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	207 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan	330 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan Tenaga kerja kabupaten /kota.	1 Dokumen	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	79 Perusahaan	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rasio jumlah instruktur Terhadap peserta pelatihan	12,79 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase LPK yang terakreditasi	67,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah penganggur yang dilatih	16 Orang	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penyerapan lulusan	33,62 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Belum ada pelatihan CPMI/CTKI
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Belum ada pelatihan CPMI/CTKI
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	100,50 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	142,86 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat,	2843	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	85,71 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai eserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah mogok kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada Mogok kerja
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada penutupan perusahaan
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan kepentingan
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan antar serikat
		Jumlah perselisihan PHK	3	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	249 Pekerja	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2 Perselisihan	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	693 Lowongan	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	676 Pencaker	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3 BKK	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	37 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	73 Prog/kegiatan	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	14 Media Massa	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	118 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	4 Organisasi	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	36 kader	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	4 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada	2 Kebijakan	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00 Persen	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tertanganinya kerawanan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/ Wali kota	75 Izin Lokasi	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Kab. HSS hanya mempunyai Penetapan Objek Tanah Landreform yang berasal dari pelepasan (enclove)
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada penetapan dan pelaksanaan ganti rugi kepada bekas pemilik kelebihan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					maksimum /absentee
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Belum ditetapkan aturan izin membuka tanah negara di Kab. HSS
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100,00 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	a. 54,80 b. 89,26 c. 49,38	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 4% 2. 90.000 Ton 3. 12.184 ton/hari	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	99,00 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Belum ada pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten, sementara di tangani oleh pelaksana di LH
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	100%	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Baru Usulan MHA
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100,00 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100,00 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penerbitan akta perceraian	96,9%	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penerbitan akta kematian	100,00 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penyajian data kependudukan	100,00 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas PMD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	2 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	14 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	36 Lembaga	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19,65	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25,80	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	50,00 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	8 Stakeholders	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100,00%	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6,93 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	11 Kelompok	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	74,79%	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	64,52 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	82,93 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	25,00 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	107,17 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-	Dinas Perhubungan Kab. HSS	Pernyataan Tidak ada penetapan tarif angkutan
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	20,00 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	61,61 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	54,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	19,00%	Dinas Kominfo Kab. HSS	Surat Keterangan Bahwa Dinas Kominfo menajukan permohonan Analisis kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	81,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	64,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	64,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	64,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	62,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	54,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	75,00%	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100,00%	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada kantor cabang



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	52 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada pelatihan karena Pandemi Covid-19



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada pelatihan karena Pandemi Covid-19
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-		Tidak Perlu Diisi
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18,52 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	59,26 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	78,22 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	27,22 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	67,48 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	40,29 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	18,14 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Draft Perda	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Draft SOP	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Kegiatan pameran penanaman modal	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	36 Konsultasi	Dinas PMPTSP Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.696 Perizinan	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 231.060.423.174	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3 Orang	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	35 Pembinaan	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten /kota	9 Data dan Informasi	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	58 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	37 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	56 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	124 Orang	Disporapar Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	37 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 event	Disporapar Kab. HSS	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	66 Sektoral	Dinas Kominfo Kab. HSS	Pernyataan Bahwa Dinas Kominfo selama tahun 2020 belum melakukan survey statistik sektoral
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	101 sektoral	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Rekomendasi	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Dinas Kominfo Kab. HSS	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding	0	Dinas Kominfo Kab. HSS	Surat pernyataan bahwa Kominfo belum memiliki



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			alat pembatas sinyal/akses komonikasi (jammer)
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	93,33 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase system elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	93,33 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa tidak ada



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		provinsi dengan dukungan data			cagar budaya yang diberikan izin keluar Kab. HSS
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	5 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	5 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	404	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	606	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	606	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Tidak Perlu diisi



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan belum ada Ahli Cagar Budaya
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Tidak ada ahli CB yang disertifikasi
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	28 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Belum ada Peningkatan Kompetensi CB dan Permesiuman
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	29 Buah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	14 Kali	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9,29 %	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	22,07 %	Dispersip Kab. HSS	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,90 %	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	14 Kegiatan	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	6 Naskah	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	6 Naskah	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	46 Koleksi	Dispersip Kab. HSS	
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	71,77 %	Dispersip Kab. HSS	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5.079 arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	8.323	Dispersip Kab. HSS	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten /Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	1,063 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	5.005 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	105 Arsip	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	6 Izin	Dispersip Kab. HSS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.229 Orang	Dinas Perikanan Kab. HSS	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Perikanan Kab. HSS	Surat Keterangan
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	4 IUP	Dinas Perikanan Kab. HSS	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1.910 Orang	Dinas Perikanan Kab. HSS	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.348.500 Ekor	Dinas Perikanan Kab. HSS	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	657 Destinasi	Disporapar Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	27 Infrastruktur	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	12Daftar Usaha	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0 Wisman	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3 Event	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	1	Disporapar Kab. HSS	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	31,12 %	Disporapar Kab. HSS	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	98,51 %	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 Lokasi	Disporapar Kab. HSS	
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	27 Buah	Dinas Pertanian Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Prasarana pertanian yang digunakan	11 Buah	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Penerbitan izin usaha pertanian	16 Izin	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase prasarana yang digunakan	100,00 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100,00 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	85,33 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
28	Kehutanan	-	-	-	-
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. 92,16 % b. 90,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase penerbitan TDG	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. 60,00 % b. 71,00 % c. -	Dinas Perdagangan Kab. HSS	Poin C. Surat Keterangan
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	91,75%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	11 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	33.745,05	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	89,69%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	80,28%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa Penetapan IUKI dan IPKIdi Kab. HSS tidak ada
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa tidak ada IPUI yang



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					diterbitkan instansi terkait
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Belum dilaksanakan pendataan perusahaan industri di Kab. HSS yang masuk dalam Sistem Informasi Nasional
32	Tranmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-		



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Hasil (Outcome)

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	84,041 %	Dinas Pendidikan dan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Kebudayaan Kab. HSS	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,181 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	33,33 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,19 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,79 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,40 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,73 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang	99,43 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,12 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,89 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,89 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	77,11 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	93,22 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	81,24 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS tidak mempunyai Pantai
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan	80,63 %	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	92,77 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,64 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100,00 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,38 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	81,55 %	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	Dinas PUTR Kab. HSS	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	0	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana di Kab. HSS
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada rumah masyarakat terdampak reokasi.
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	53,53 %	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,41%	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 %	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	208.644 Orang	BPBD Kab. HSS	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	975 Orang	BPBD Kab. HSS	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4 Orang	BPBD Kab. HSS	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	Tidak ada kejadian korban kebakaran yang



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					memerlukan evakuasi
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00%	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%	Dinas Sosial Kab. HSS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00%	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	11,64 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	88,39 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	88,61 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	68,34 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	37,34 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,03 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,31 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	603,61 %	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Hanya tersedia TOL yg berasal dari pelepasan (enclave)



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada Sengketa
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	62,97 Indeks	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	77,18 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	12,50 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	98,14 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,46 %	Disdukcatpil Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kepemilikan akta kelahiran	95,61 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	85,19 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100 %	Dinas PMD Kab. HSS	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	24,59 %	Dinas PMD Kab. HSS	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,27	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,91 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,79 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,47	Dinas Perhubungan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,61	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	1 (satu) layanan publik masih menunggu berbagi pakai yang disediakan oleh Kementerian Kominfo (Si Cantik) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran	72,19 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	78,40 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	80,04 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	10,61 %	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6,71 %	Disporapar Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	13,06 %	Disporapar Kab. HSS	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Medali	Disporapar Kab. HSS	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	88,89 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	88,89 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	26,36 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	Penyesuaian dengan indeks KAMI versi 4.1
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00 %	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,96	Dispersip Kab. HSS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	35,34	Dispersip Kab. HSS	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	92,94	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	3264,50 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	18005,25 Ton	Dinas Perikanan Kab. HSS	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(100) %	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0,76%	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19
		Tingkat Hunian Akomodasi	9,82 %	Disporapar Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,76%	Disporapar Kab. HSS	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,01%	Disporapar Kab. HSS	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,44 Ton/Ha	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100,00%	Pertanian Kab. HSS	
28	Kehutanan	-	-	-	Bukan kewenangan Kabupaten
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	-	-	Bukan Kewenangan Kabupaten
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95,04 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	83,74 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,76 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100,00%	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perizinan yang dikeluarkan instansi terkait (terlampir Surat Pernyataan Kadis)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perizinan yang dikeluarkan instansi terkait (terlampir Surat Pernyataan Kadis)
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		Belum mendapatkan User id Sistem Informasi Nasional
32	Tranmigrasi	-	-	-	Tidak ada



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan dungsi penunjang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan penunjang

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13.867 %	BPKPD Kab. HSS	
		Rasio PAD	3,99 %	BPKPD Kab. HSS	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kab. HSS	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kab. HSS	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	65,25 %	BPKPD Kab. HSS	
		Opini Laporan Keuangan	1. 2019 WTP 2. 2018 WTP 3. 2017 WTP 4. 2016 WTP	Inspektorat Daerah Kab. HSS	



NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			5. 2015 WTP 6. 2014 WTP 7. 2013 WTP 8. 2012 WDP 9. 2011 WDP 10. 2010 WDP		
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Tidak ada	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	Surat Pernyataan tidak ada proyek multiyears
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	10,00 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	89,135 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,061 %	BKPSDM Kab. HSS	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk	7,53 %	BKPSDM Kab. HSS	



NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		guru dan tenaga kesehatan)			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	93,33 %	BKPSDM Kab. HSS	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,05 %	BPKPD KAB. HSS	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,42 %	BPKPD KAB. HSS	
		Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. YA 2. YA 3. YA 4. YA	BPKPD KAB. HSS	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	20,75 %	BPKPD KAB. HSS	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	91,04 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Laporan ini merupakan Laporan Kedua Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Periode RPJMD 2018-2023 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja 2020.



Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih



transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

- Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperjanjikan pada Tahun 2021 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	13,08
		2	Rata-rata lama sekolah	8,33
		3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	6,87%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,87%
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	71,35
		6	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (87,51)
		7	Persentase fasilitas Kesehatan terakreditasi paripurna	8,7%
	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	8	PPH Ketersediaan	86,33
	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	9	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	67,00
	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	10	Persentase angka PMKS yang mandiri	71,19
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	11	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,8
		12	Indeks Gini	0,308
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	13	Tingkat pengangguran terbuka	1,96



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	14	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,27
		15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,61
		16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,86
		17	Persentase koperasi sehat	3,82
	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	18	Indeks Kemandirian Daerah	18
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	25 milyar
	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5,50
	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp 6.687.744.000



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64,75
		23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	67,35
		24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	67,00
		25	Persentase kecukupan RTH publik	24,86
		26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	67,43
Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67
	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,81
		29	Persentase desa/ kelurahan layak anak	4,73
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,44
Meningkatkan tata kelola	Meningkatnya akuntabilitas	31	Predikat AKIP	A (80,01)



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,65)
		33	Kualitas aspek perencanaan	63,81
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		35	Indeks profesionalisme ASN	74,42
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	65,79
		37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	23,61
	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	10,00

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian indikator makro pembangunan sampai dengan tahun 2021 dan perbandingannya dengan Provinsi Kalsel seperti terdapat dalam gambar di bawah ini:

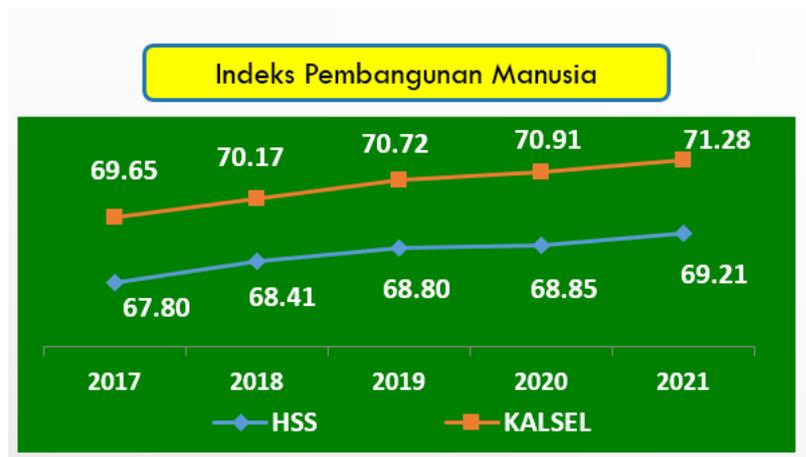


Capaian indikator Makro Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN PROVINSI
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	70,03	69,21	71,28
2	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,45%	-	3,48%
3	ANGKA KEMISKINAN	5,10%	4,84%	4,83%
4	INDEKS GINI	0,280	0,275	0,330
5	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2,15%	2,44%	4,95%

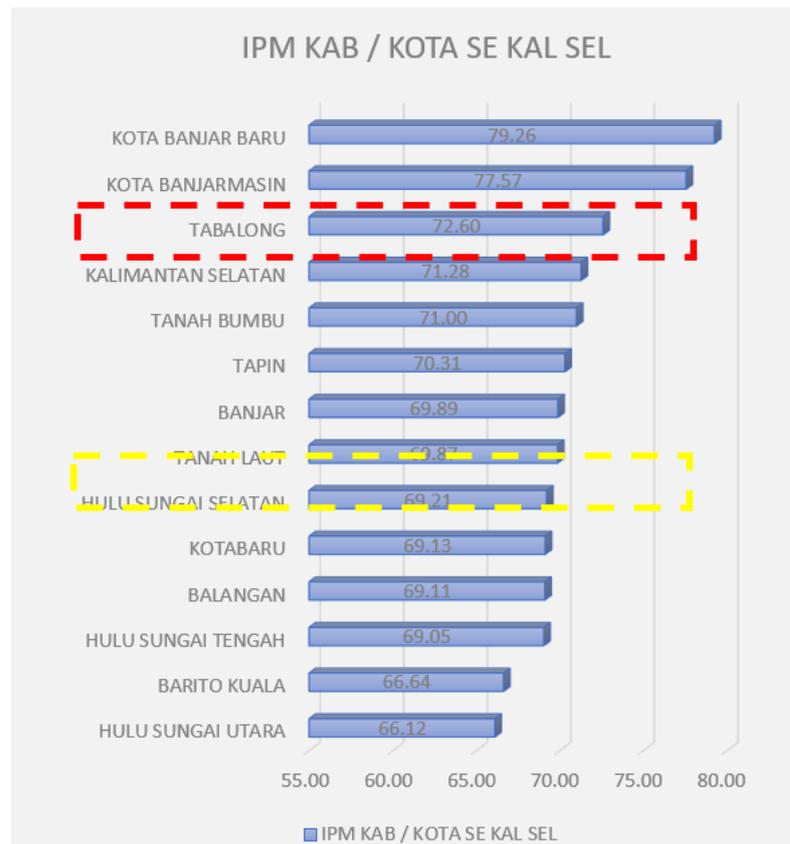
a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan peningkatan yang konsisten, walaupun masih berada di bawah IPM provinsi Kalsel.



Sumber data BPS

Dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Kalsel, Kab.Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat ke 8.

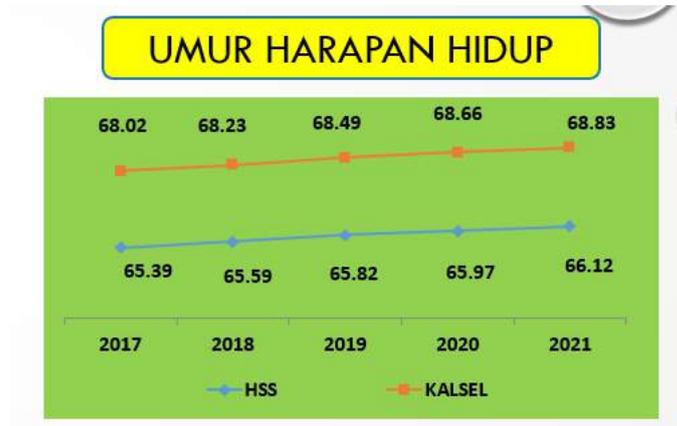


Sumber data BPS

IPM merupakan indikator komposit yang terbentuk dari 3 komponen. 1) Dimensi Kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). 2) Dimensi Pendidikan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 3) Dimensi Pengeluaran yang diukur dengan angka pengeluaran perkapita.

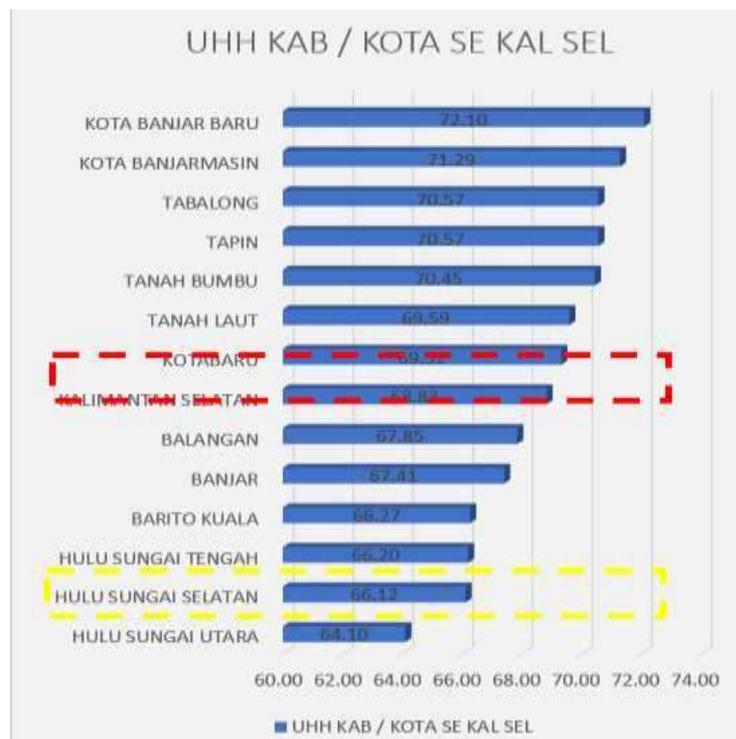


Dimensi Kesehatan



Sumber data BPS

AHH masyarakat di Kab.Hulu Sungai Selatan data tahun 2017 hingga tahun 2021 terus menunjukkan peningkatan walaupun masih di bawah angka provinsi Kalsel. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel, Kab.Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 13.





Dinas Kesehatan selaku leading sector, dalam rangka peningkatan AHH, melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mengintervensi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap AHH. Bersinergi dengan

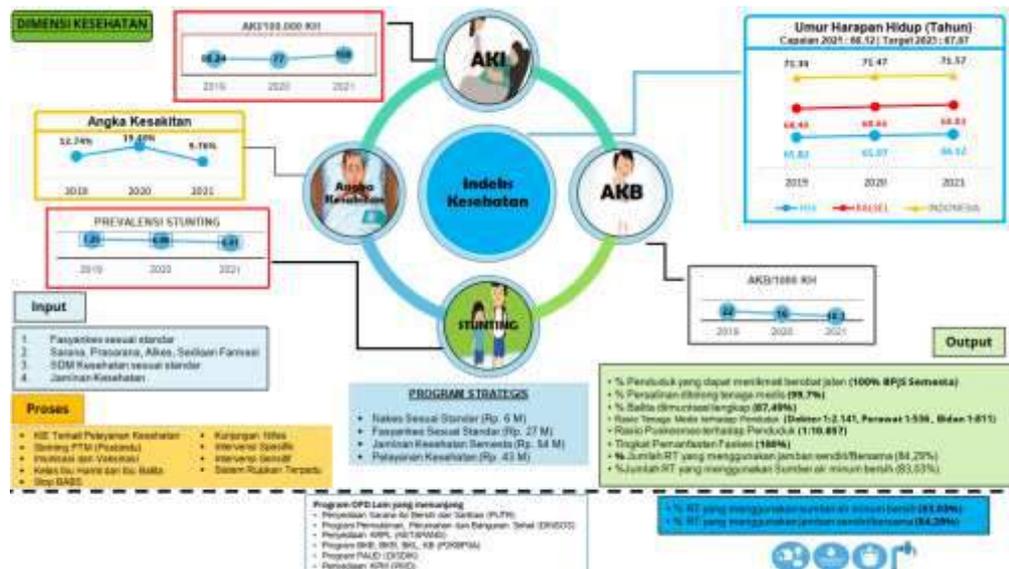
sektor-sektor lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Khusus untuk penurunan angka stunting, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah desa, Dukun Kampung dan kader Kesehatan dengan inovasi Si Midun Chatting ke Faskes (Strategi Kemitraan Dukun Kampung dan Bidan Cegah Stunting Ke Fasilitas Kesehatan). Tracking balita stunting untuk dilakukan intervensi gizi dan perbaikan sarana sanitasi dasar melalui kerjasama dengan Dinas PUTR.





Dinas Kesehatan bersinergi dengan Dinas Sosial untuk penyediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin, dan dengan Dinas PPKBPPPA untuk Program Keluarga Berencana dan Pencegahan perkawinan usia < 20 tahun. Dinas PMD melalui kader Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan dalam bentuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yakni, mengedukasi keluarga memanfaatkan pekarangan untuk ditanami tanaman penghasil pangan bagi keluarga, bahkan bisa menambah penghasilan keluarga.

Hasil berbagai upaya diatas dapat dilihat dari menurunnya angka kesakitan dari 19.40% tahun 2020 menjadi 9.74% tahun 2021, prevalensi stunting dari 6.86% tahun 2020 menjadi 6.01% tahun 2021, angka kematian bayi dari 16 permil kelahiran hidup tahun 2020 menjadi 10.3 permil kelahiran hidup tahun 2021.





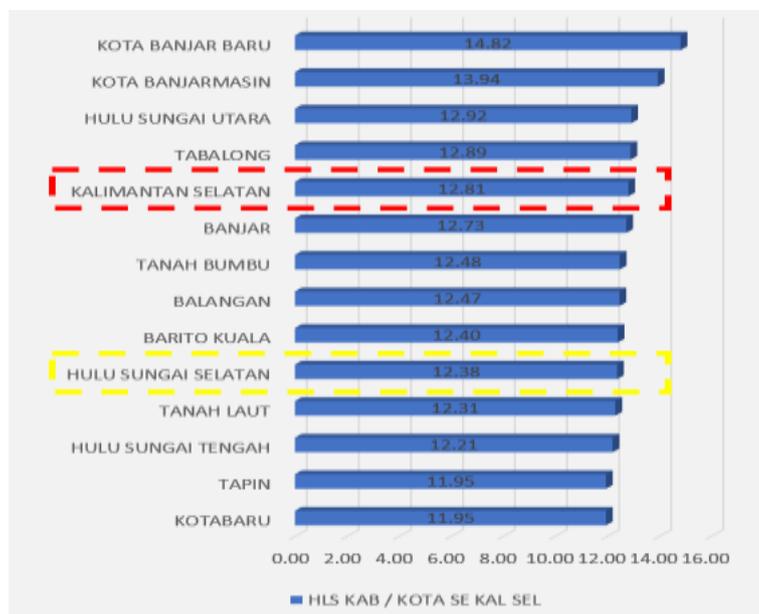
Dimensi Pendidikan

Indikator dimensi pendidikan adalah harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (RLS). Perkembangan HLS dari tahun 2017 sampai 2021, menunjukkan peningkatan, hanya terpaut 0,43 tahun di bawah HLS provinsi Kalsel.



Sumber data BPS

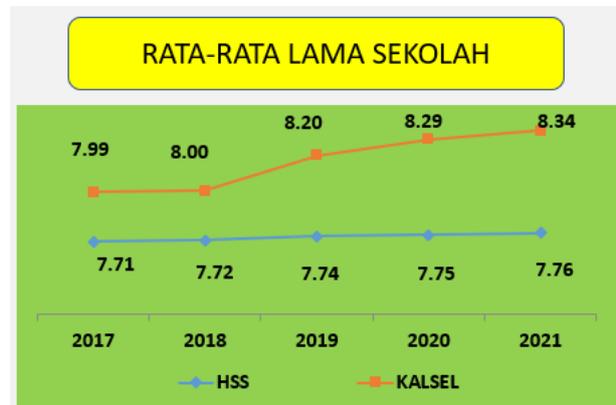
Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel, Hulu Sungai selatan berada pada peringkat ke 9.



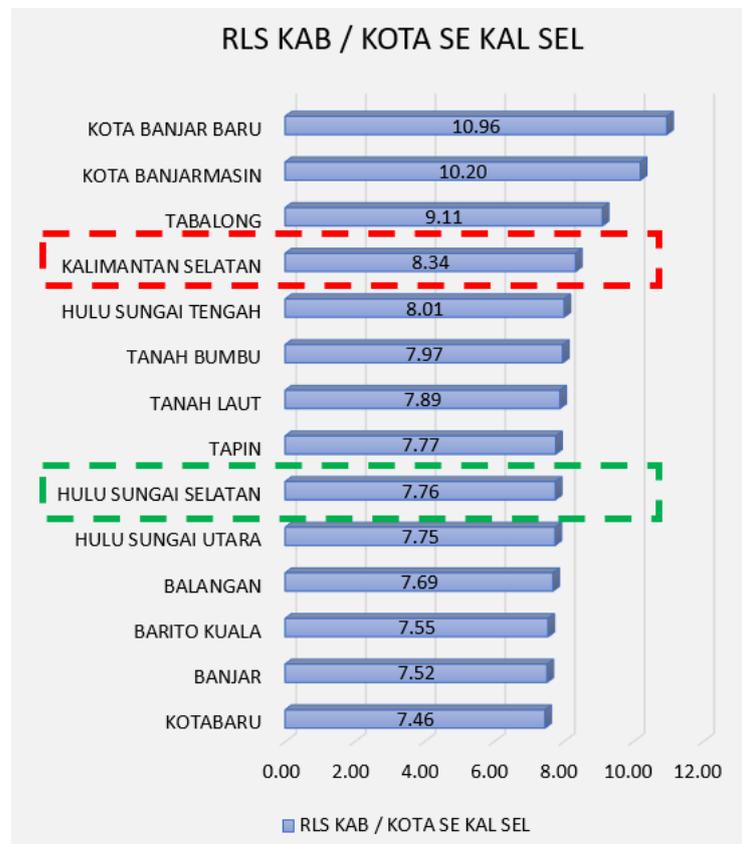
Sumber data BPS



Rata-rata lama sekolah sejak tahun 2017 sampai tahun 2021, mengalami peningkatan meskipun kecil.



Dibanding kabupaten/kota lain di Kalsel, capaian ini berada di urutan ke 8.





Dinas Pendidikan yang menjadi leading sektor pembangunan pendidikan, telah melaksanakan berbagai upaya untuk perbaikan sistem pendidikan. Terkait input, telah diupayakan penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana. Terkait proses, telah dilakukan pemerataan penyebaran guru, penguatan manajemen data terpadu melalui website SATUNIK <https://satunik.hulusungaiselatankab.go.id> dan tracking anak usia sekolah bekerja sama dengan aparat dan sarjana pendamping desa.

Berikut perbandingan rasio murid terhadap guru, kelas dan sekolah pada tingkatan SD dan SLTP.

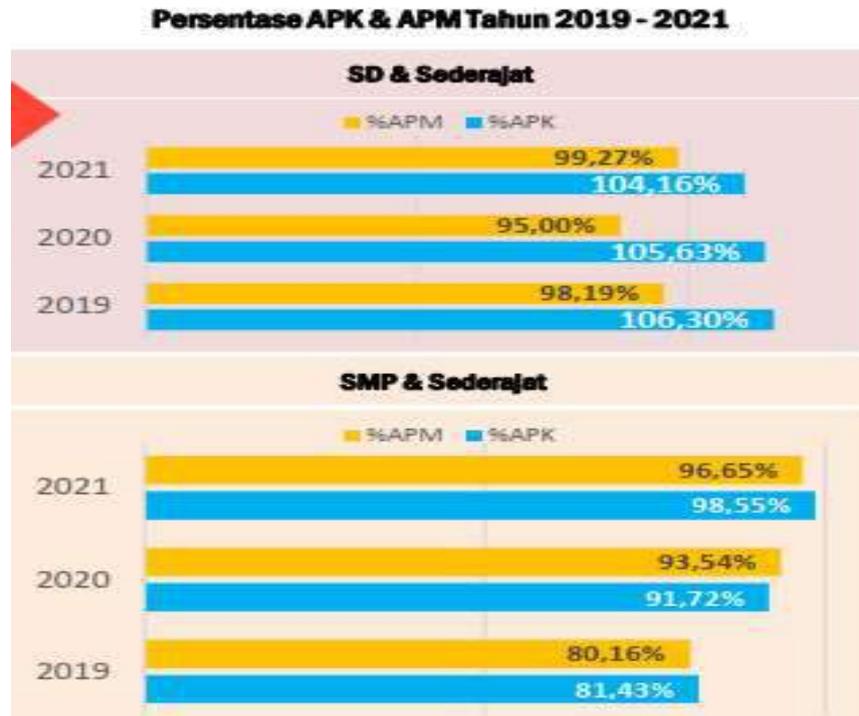
NO	RASIO	SD	SLTA
1.	Rasio Murid terhadap Guru	1 : 9,96	1 : 12,21
2.	Rasio Murid terhadap Kelas	1 : 15,36	1 : 26,31
3.	Rasio Murid terhadap Sekolah	1 : 76,25	1 : 142,92

Dari data tersebut diketahui maka kebijakan kedepan yang harus dilakukan adalah peningkatan mutu pendidikan.





Capaian program pendidikan menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.



Sumber data Dinas Pendidikan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,19% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalsel sebesar -1,81%. Dalam rangka penanganan Covid-19 pemulihan ekonomi daerah (PC-PED) tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 64,27 miliar, saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dipengaruhi dua sektor unggulan yaitu pertanian 24,87% (termasuk tanaman pangan, hultikultura, perikanan, peternakan,



perkebunan) dan lainnya 23,4% (akomodasi makan minun, pariwisata, perdagangan dan UMKM).

Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) juga selalu mengalami peningkatan dari Rp.22.613.000 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.27.323.000 pada tahun 2020 (meningkat 20,83% dibandingkan 2016).

Pertumbuhan ekonomi tentu sangat dipengaruhi oleh laju inflasi suatu daerah sehingga laju inflasi perlu dikendalikan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi inflasi adalah ketersediaan stok ikan. Ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah ikan gabus haruan. Agar ketersediaan stok ikan gabus tetap terjaga maka dilakukan budidaya ikan gabus haruan pada kawasan Kampung Gabus Haruan di Desa Asam Kecamatan Sungai Raya.

Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi Kawasan unggulan adalah daerah Kecamatan Loksado yang didukung dengan potensi alam yang eksotis. Selain itu juga triangle wisata religi yang terletak pada Kecamatan Simpur (Makam Guru Kapuh), Kecamatan Kalumpang (Makam Datu Ahmad Balimau), Kecamatan Angkinang (Makam Datu Taniran) dengan tingkat kunjungan wisatawan 268.244 orang pada tahun 2020.

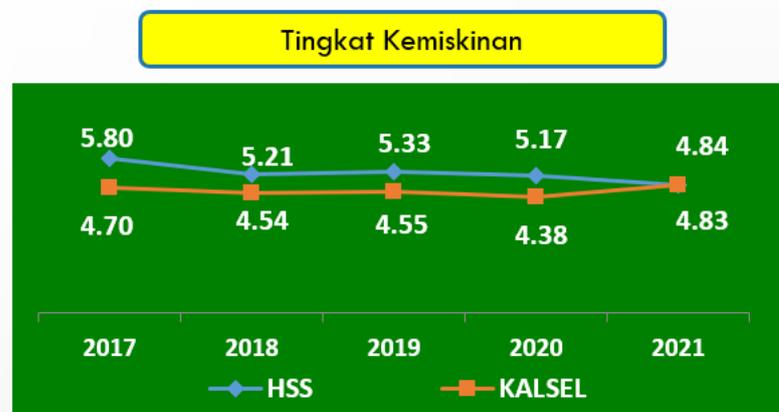
Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia, apalagi di tengah pandemi. Dalam rangka untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibangun Mall Pelayanan Publik yang di dalamnya bergabung 16 instansi dengan total 116 jenis pelayanan.



c. Tingkat kemiskinan

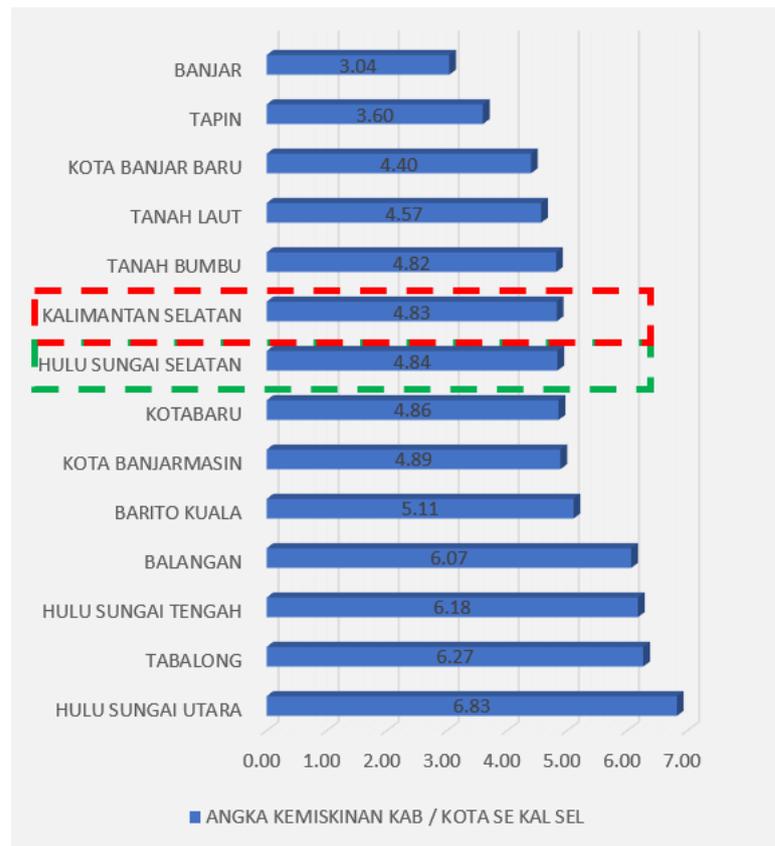
Garis kemiskinan menurut BPS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah penduduk dengan pengeluaran sebesar Rp.494.203 per bulan. Dinas sosial pada hari ini sangat berperan untuk menahan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tidak jatuh ke keparahan dan kedalaman kemiskinan bagi masyarakat yang rentan.

Tingkat Kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Dari 5,8 menjadi 4,84. Angka ini tidak berbeda jauh dari tingkat kemiskinan provinsi Kalsel.



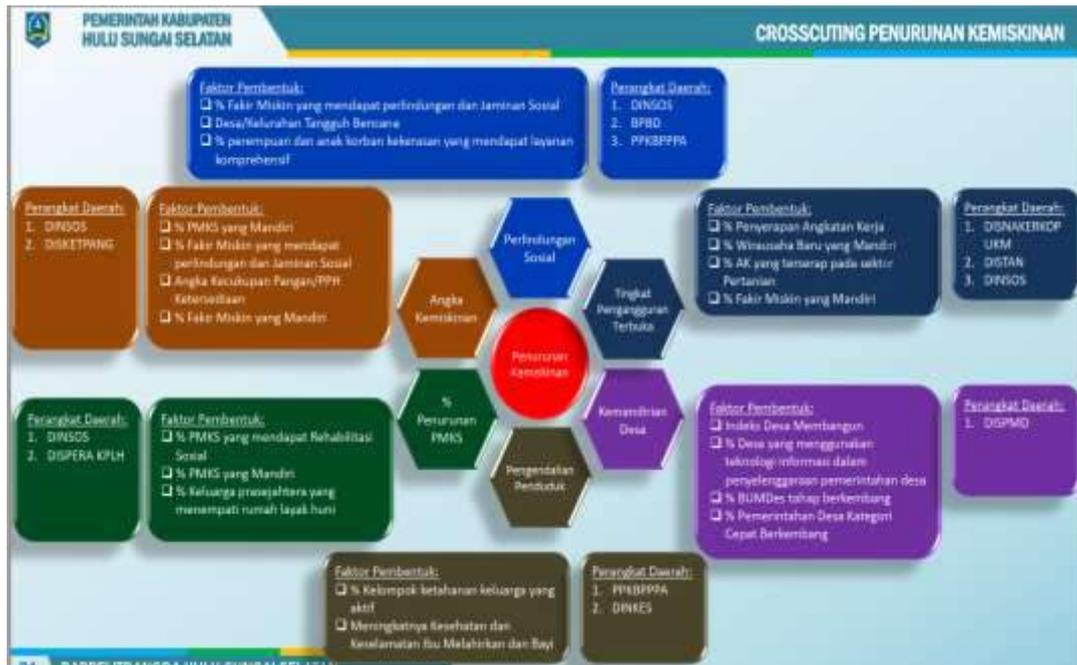
Sumber data BPS

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalsel, Tingkat Kemiskinan Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2021 berada pada urutan ke 6.



Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya Kabupaten yang mengalami penurunan angka kemiskinan di masa pandemi dari 5,17% tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan sinergitas banyak instansi, yang berperan pada peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial.

Penurunan tingkat kemiskinan, adalah sinergitas banyak instansi, yang berperan pada peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial.



Dinas sosial berperan untuk meningkatkan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi lebih mandiri. Mencegah keparahan dan kedalaman kemiskinan bagi masyarakat yang rentan, terlebih lagi pada masa pandemic covid 19, melalui pelaksanaan berbagai bantuan sosial.

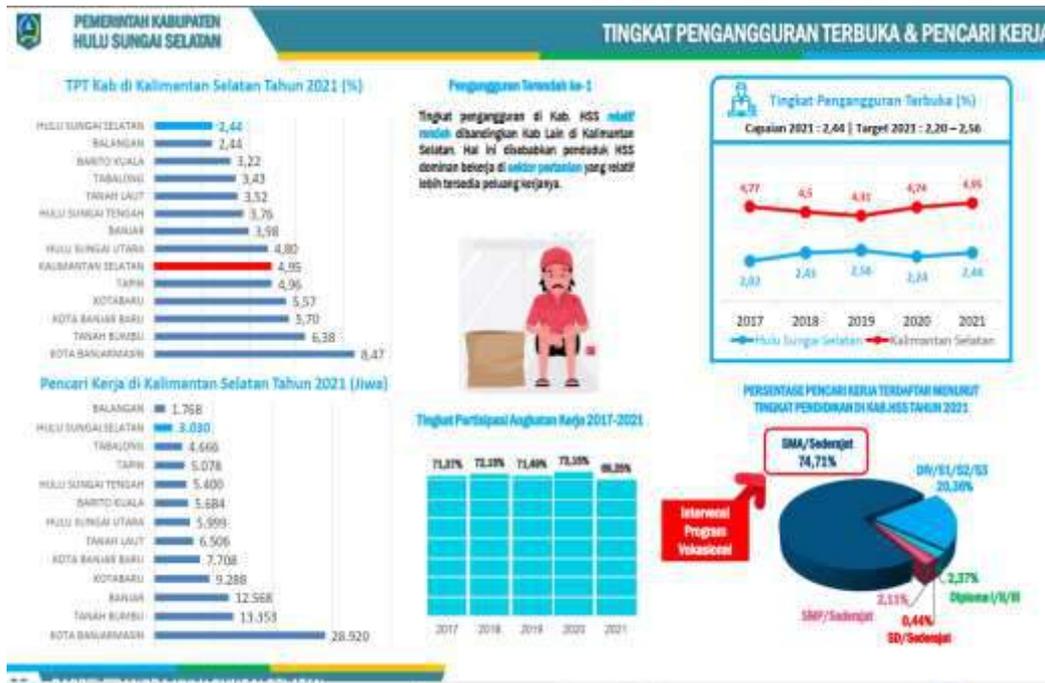


Sumber data Dinas Sosial 2021



Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2020.

Dinas Tenaga Kerja UKMP, berkinerja untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, bersinergi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Perdagangan. Sektor pertanian adalah penyerap utama tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Disnakerkop UKMP juga berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan, bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Pertanian. Mengembangkan UMKM yang bergerak pada pengolahan produk pertanian dan perikanan.

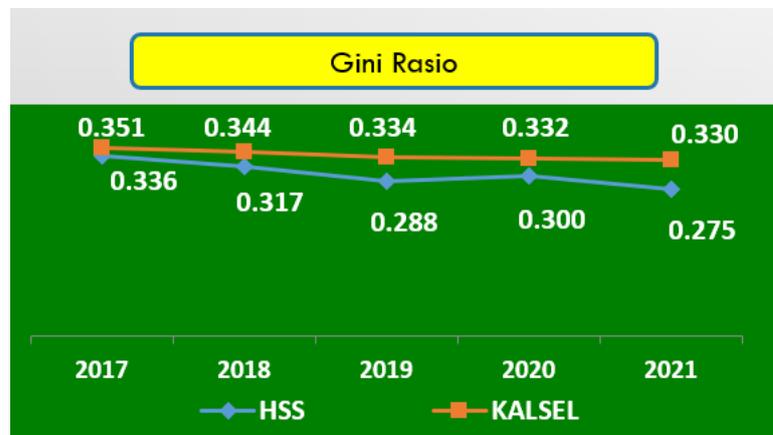
Capaian Kinerja Disnkerkop UKPM tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	6.5%	Data BPS belum rilis
2	Persentasi Koperasi Sehat	3.18%	12.96%



d. Indeks Gini/Gini Ratio

Ratio gini adalah gambaran distribusi pendapatan penduduk. Semakin kecil Gini ratio di suatu wilayah, semakin merata distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut. Ratio Gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2017 sampai 2020 cenderung tetap di angka 0,3 dan turun menjadi 0,275 tahun 2021. Angka ini masuk kategori tingkat ketimpangan rendah. Angka ini menggambarkan distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup merata.



Sumber data BPS

Demikian gambaran capaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut adalah capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021.

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan sebagaimana dalam tabel berikut:



No	Capaian	Jumlah Indikator	Keterangan
1	0<20	2 (dua)	- Indikator terkait Penilaian akreditasi fasilitas Kesehatan sejak tahun 2020 sampai 2021, tidak dilaksanakan oleh tim akreditasi nasional, mengingat kondisi pandemic covid 19. - Indikator terkait akreditasi PAUD; terkendala dengan terbatasnya pengajar yang memiliki sertifikasi
2	20<40	0 (nol)	-
3	40<60	0 (nol)	-
4	60<90	9 (sembilan)	-
5	>90	24(dua puluh tiga)	Indikator tidak lagi menjadi isu
6	Belum ada nilai	3 (empat)	Belum diterima nilainya, penilaian dari pihak eksternal
Jumlah Indikator		38 (tiga puluh delapan)	

Rincian capaian misi, tujuan, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Capaian Misi I dalam Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	13,08	12,38	94,65
				2	Rata-rata lama sekolah	8,33	7,76	93,16
				3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	6,87	1,25	18,20
				4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	10,99	12,90	100%
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	67,04	66,12	98,63
				6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	71,35	70,54	100%
				7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (87,51)	AA (80,75)	92,28%
				8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	0	0
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang	9	PPH Ketersediaan	86,31	86,33	100%



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
			beragam dan aman					
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	67,00	67,00	100%
		5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	71,19	54,09	93,21

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

Capaian Misi II dalam Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,80	4,84	99,19
				13	Indeks Gini	0,308	0,275	100%
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	1,96	2,44	75,51%
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan	15	Laju pertumbuhan ekonomi	4,98	-3,60	-72,29



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
			ekonomi sektor unggulan		kategori industri pengolahan			
				16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,50	3,94	70,23
				17	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,86	3,46	71,19
				18	Persentase koperasi sehat	3,82	12,96	100
		9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	25 milyar	20,10 milyar	80,40
		10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5,50	12,43	100
		11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp. 6.687.744.000	Rp. 7.204.500.000	136,53



Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian.

Capaian Misi III dalam Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Fisik dan Sosial yang Menunjang Sektor perekonomian Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA		
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64,75	68,37	100
				23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	67,35	68,49	100
				24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	67,00	66,67	99,50
				25	Persentase kecukupan RTH publik	24,86	28,45	100
				26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	67,43	58,35	86,53



Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

Capaian Misi IV dalam Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67	0,70	100
		14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,81	89,30	98,34
				29	Persentase desa/ kelurahan layak anak	4,73	4,73	100
		15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,44	67,93	100

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

Capaian Misi V dalam Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis Tahun 2021 sebagai berikut:



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31	Predikat AKIP	A (80,12)	BB (2020)	Belum ada hasil penilaian dari Kepmen PANRB
				32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A	BB (2020)	Belum ada hasil penilaian dari Kepmen PANRB
				33	Kualitas aspek perencanaan	63,81	62,95	98,65
		17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP (2020)	Belum ada hasil penilaian dari BPK th 2021
				35	Indeks profesionalisme ASN	74,42	75,00	100
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	65,79	65,79	100
				37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	23,61	23,61	100
		19	Meningkatnya kehidupan	38	Persentase peningkatan	10,00	13,43	134,3



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA
		sosial keagamaan	penerimaan zakat			

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	12,17	12,38	Realisasi th 2021 naik sebesar 0,21 dibanding th 2020
		2. Rata-rata Lama Sekolah	7,75	7,76	realisasi th 2021 naik sebesar 0,01 dibanding th 2020
		3. Persentase PAUD Formal terakreditasi A	3,75	1,25	Realisasi th 2021 sama dengan tahun 2021
		4. Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	13,21	12,90	Penurunan realisasi sebesar 0,31 dibanding capaian th 2020
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas	5. Angka Harapan Hidup	65,97	66,12	Realisasi th 2021 naik sebesar 0,15



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
	Pelayanan Kesehatan					dibanding th 2020
		6.	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	66.15	70.54	Realisasi th 2021 lebih tinggi 4.39 dibanding tahun 2020 (indikator bersifat negatif)
		7.	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	A (77.13)	AA (80.75)	Realisasi th 2021 meningkat sebesar 3.62 dibanding th 2020. Dengan peringkat AA
		8.	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	0	0	Survey akreditasi fasilitas Kesehatan th 2021 masih tidak dilaksanakan terkendala covid 19
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	9.	PPH Ketersediaan	85.48	86.33	Kenaikan capaian sebesar 0,85 dibanding tahun 2020
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	10.	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	61,00	67,00	Kenaikan capaian cukup besar yakni 6% dibanding tahun 2020



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11.	Persentase angka PMKS yang mandiri	55,93	54,09	Penurunan capaian sebesar 1,84%.
6	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	12.	Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,17	4,84	Terjadi penurunan angka kemiskinan dibanding tahun 2020 yakni sebesar 0,33 (indikator bersifat negatif)
		13.	Indeks Gini	0.300	0.275	Terjadi penurunan indeks Gini dibanding tahun 2020 yakni sebesar 0,025 (indikator bersifat negatif)
7	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,24	2.44	Terjadi kenaikan angka pengangguran terbuka dibanding tahun 2020 yakni sebesar 0,2 (indikator bersifat negatif)
8	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	15.	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	-3,60	3,76	Terjadi kenaikan yang besar, yakni 7,36



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
						dibanding tahun 2020
		16.	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-2,39	3,94	Terjadi kenaikan yang besar, yakni 6,33 dibanding tahun 2020
		17.	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	0,03	3,46	Terjadi kenaikan sebesar 3,43 % dibanding tahun 2020
		18.	Persentase koperasi sehat	3,18	12,96	Kenaikan realisasi dibanding tahun 2020 sebesar 9,78
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.	Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	20,50 Milyar	20,10 Milyar	Terjadi penurunan sebesar 4 M disbanding th 2020 (dampak ekonomi Pandemi Covid 19)
10	Meningkatnya investasi PMDN	20.	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	8,51	12,43	Terjadi kenaikan sebesar 3,92% dibanding tahun 2020
11	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi Masyarakat	21.	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Rp. 7.337.250.000	Rp. 7.204.500.000	Terjadi penurunan sebesar Rp132.750.000, akibat



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
						berkurangnya jumlah dan lama tinggal wisatawan karena pembatasan / penerapan protocol kesehatan
12	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	22.	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	66,04	68,37	Terjadi peningkatan sebesar 2,33% dibanding tahun 2020
		23.	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	65,60	68,49	Terjadi peningkatan 2,88%
		24.	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik	52,38	66,67	Terjadi kenaikan sebesar 28.57 poin dibanding tahun 2019
		25.	Persentase Kecukupan RTH Publik	24,88	24,84	Kenaikan capaian cukup besar, yakni 14,29% dibanding tahun 2020
		26.	Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	53,24	58,35	Kenaikan sebesar 5,11% dibanding tahun 2020
13	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	27.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67	0,70	Kenaikan capaian sebesar 0,03 poin



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
						dibanding tahun 2020
14	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	28.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	89,30	Kenaikan sebesar 0,7 % dibanding tahun 2020
		29.	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	3,38	4,73	Kenaikan sebesar 0.35 dibanding tahun 2020
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	30.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	67,93	Kenaikan sebesar yakni 0,89 poin dibanding tahun 2020
16	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	31.	Predikat AKIP	77,05		Capaian th 2021 belum diterima
		32.	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	3.97 (B)		Capaian th 2021 belum diterima
		33.	Kualitas aspek perencanaan	62,95	62,95	Peningkatan yang besar dibanding tahun 2019 yakni 22.91 persen.
17	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	34.	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP		Hasil th 2021 belum diterima (target th 2020 optimis bisa dicapai) pengalaman Kab.HSS 7



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
						kali WTP sejak tahun 2014-2020
		35.	Indeks profesionalisme ASN	72	75	Capaian th 2021 meningkat 3 poin dibanding tahun 2020
18	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	36.	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan baik	60,53	65,79	Kenaikan sebanyak 5,26% dibanding tahun 2020
		37.	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	15,97	23,61	Kenaikan sebanyak 7,64% dibanding tahun 2020
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38.	Persentase peningkatan penerimaan zakat	23,62	13,43	Terjadi penurunan capaian di banding tahun 2020

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Dalam tabel berikut adalah perbandingan capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD, yakni 2023 sebagai berikut :



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah	12,38	94,65	13.52	Selisih realisasi th 2021 dengan target 2023 sebesar 1.14 (optimis bisa dicapai)
		2.	Rata-rata Lama Sekolah	7,76	93,16	8.53	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 0.77 (optimis bisa dicapai)
		3.	Persentase PAUD Formal terakreditasi A	7,76	93,16	12,50	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 13,77% perlu kaji ulang strategi
		4.	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	12,90	18,20	15,02	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 2,12 (optimis bisa dicapai)
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	5.	Angka Harapan Hidup	66,12	98,63	67,87	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 1.75



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa	
						(optimis bisa dicapai)	
		6.	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	70,54	100	69.68	Capaian tahun 2021 telah melampaui target RPJMD
		7.	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	A (75,30)	AA (87,19)	AAA (97,51)	Capaian tahun 2021 AA (85) selisih dengan target akhir RPJMD sebesar 10,32 poin dg predikat AAA
		8.	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	0	0	17.39	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 17.39 Perlu kaji ulang strategi/indikator
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	9.	PPH Ketersediaan	86,33	100	88.04	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 2.56 (optimis bisa dicapai)



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	10.	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	67,00	100	75,00	Selisih realisasi th 2021 sebesar 8 % dibanding target tahun 2023
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11.	Persentase angka PMKS yang mandiri	54,09	75,98	76,35	realisasi 2021 dengan target th 2023 cukup besar yakni 22,26. (kaji ulang strategi)
6	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	12	Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,84	99,17	4,28	Selisih capaian th 2021 dengan target th 2023 sebesar (0,56)
		13.	Indeks Gini	0,275	100	0.284	Realisasi tahun 2021 melebihi target 2023 (indikator bersifat negative)
7	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	75,51	1.86	Selisih capaian th 2021 dengan target th 2023 sebesar (0,58) Optimis bisa dicapai



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
8	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	15. Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	3,76	71,35	5,85	Capaian th 2021 dibanding target th 2023, terdapat selisih sebesar 2,09, dengan strategi yang tepat bisa dicapai
		16. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,61	70,23	5,83	Capaian th 2021 dibanding target th 2023, terdapat selisih sebesar 0,22%. Optimis bisa dicapai
		17. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,46	71,19	5,63	Capaian th 2021 dibanding target th 2023, terdapat selisih sebesar 2,17% . Optimis bisa dicapai
		18. Persentase koperasi sehat	3,82	100	5,10	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 1.28 (optimis bisa dicapai)



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.	Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	20,10 Milyar	80,40	28 Milyar	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 7,9 M optimis bisa dicapai
10	Meningkatnya investasi PMDN	20.	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	12,43	100	7,00	Capaian th 2021 telah melampaui target th 2023. Perlu kaji ulang target/indikator
11	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi Masyarakat	21.	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Rp. 7.204.500.000	136,53	Rp. 9.073.800.000	Selisih capaian th 2020 dengan target 2023 sebesar 1.8 M (optimis bisa dicapai)
12	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	22.	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	68,37	100	67,00	realisasi 2021 telah melampaui target 2023
		23.	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	68,49	100	71,43	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 2,94 (optimis bisa dicapai)



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
		24. Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik	66,67	99,5	100	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 0,5%%
		25. Persentase Kecukupan RTH Publik	28,45	100	24.87	Capaian th 2021 telah melampaui target 2023
		26. Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	58,35	86,53	82.32	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 23,97 (perlu kaji ulang strategi mengingat selisih yang cukup besar)
13	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	27. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7	100	0.71	Selisih capaian th 2021 dengan target 2023 sebesar 0.01 (optimis bisa dicapai)
14	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	28. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,30	98,34	91,27	Selisih realisasi th 2021 dibanding target 2023 sebesar 1,97 (optimis



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa	
						bisa dicapai)	
		29.	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	4,73	100	7.43	Capaian th 2021 selisih 2,7% dibandingkan target th 2023. Optimis bisa dicapai
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	30.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,93	100	55.77	Capaian th 2021 telah melebihi target th 2023. Perlu kaji ulang target/indikator
16	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	31.	Predikat AKIP	BB (77,05) (2020)	88,3	A	Capaian th 2021 belum diterima Target 2023 optimis bisa dicapai
		32.	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	3.97 (BB) Th.2020	B (87,9)	A	Capaian th 2021 belum diterima
		33.	Kualitas aspek perencanaan	62,95	98,65	67,09	capaian th 2021 telah melebihi target th 2023. Diperlukan penargetan kembali atau kaji



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
							ulang indikator
17	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	34.	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP (2020)	-	WTP	Hasil th 2021 belum diterima (target th 2023 optimis bisa dicapai) pengalaman an Kab.HSS 7 kali WTP sejak tahun 2014-2019
		35.	Indeks profesionalisme ASN	75	100	81,33	Capaian th 2021 dibanding target th 2023, ad selisih sebesar 6,33. Optimis bisa dicapai
18	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	36.	Persentase Perangkat Daerah yang mengimple mentasikan Teknologi Informasi dengan baik	65.79	100	100	Capaian th 2021 dibanding target th 2023 ada selisih yang cukup besar yakni 34.71. diperluka n pengkajia n Kembali strategi pencapaian n target



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	% Capaian Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD 2023	Analisa
		37. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	23.61	100	38.88	Capaian th 2021 dibanding target th 2023 ada selisih 15.27 Diperlukan pengkajian Kembali strategi pencapaian kinerja.
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38. Persentase peningkatan penerimaan zakat	13.43	134.3	12,00	Capaian tahun 2021 telah melebihi target th 2023. Kaji ulang target/indikator

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Berikut ini disampaikan rincian penggunaan sumber daya dalam hal ini, anggaran yang disediakan dan telah digunakan untuk pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.

Sasaran Strategis 1; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Capaian Kinerja sasaran startegis 1 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Harapan lama sekolah	13,08	12,38	94.65
Rata-rata lama sekolah	8,33	7,76	93.16
Persentase PAUD formal terakreditasi A	6,87	1,25	18.20
Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	10,99	12,90	100
Rata-rata Capaian			76.5%

Sasaran ini didukung program Pengelolaan Pendidikan dengan total anggaran sebesar Rp.58.437.914.275,00, dan realisasi sebesar Rp.51.482.649.664,00 (88.09%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini hanya sebesar 76,5%, tidak bisa dinilai efisiensi anggarannya.

No	Program (2021)	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp58,437,914,275	Rp.51.482.649.664,00	88.09

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Capaian Kinerja sasaran startegis 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	67,04	66,12	98.63
Persentase wanita pernah kawin usia	71,35	70,54	100



INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
(15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun			
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (87,51)	AA (87,19)	97.51
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	0	0
Rata-rata Capaian			98.7

Sasaran ini didukung oleh program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp.103,598,764,575, dan realisasi sebesar 242,878,056,662.00 (88,23%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 98.7% (kinerja tinggi) dapat disimpulkan ada efisiensi anggaran sebesar 11,77%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.598.764.575	4,498,747,419.00	91.55
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.450.271.883	2.903.787.499	96.76
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	190.843.500	47,199,934,951.00	96.97
4.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 28,178,100.00		
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 260,310,225.00		
6.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 48,848,800.00	49,449,000.00	85.08
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan	Rp 27,452,800.00		



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Pemberdayaan Perempuan			
8.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 352,118,500.00		
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 97,123,500.00		
10.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 11,342,300.00		
11.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 17,162,400.00		

Sasaran Strategis 3 Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman.

Capaian sasaran strategis tiga adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
PPH Ketersediaan	86.31	86.33	100
Rata-rata Capaian			100

Sasaran ini didukung oleh empat program dengan total anggaran sebesar Rp1.725.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1,473,030,200.00 (85.36%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%, (kinerja sangat tinggi) dapat disimpulkan ada efisiensi anggaran sebesar 14.64%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 873,525,000	709,450,000	81.22
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Rp 814,892,500	734854800	90.18
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 2,825,000	750000	26.55
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten /Kota	Rp 34,397,500	27975400	81.33



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	TOTAL	Rp 1,725,640,000	1,473,030,200	85.36

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat

Capaian sasaran strategis tiga adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM	71.19	54.09	75.98
Rata-rata Capaian			75.98

Sasaran ini secara tidak langsung didukung banyak program yang tersebar di beberapa dinas yang berkewajiban melaksanakan SPM.

SASARAN 5: Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

Capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase angka PMKS yang mandiri	71.19	54.09	75.98
Rata-rata Capaian			75.98%

Sasaran ini didukung oleh empat program dengan total anggaran sebesar Rp28,120,435,745.00 dan realisasi sebesar Rp. 23,987,408,102 (85.3%) Dibandingkan dengan rata-rata



capaian kinerja sasaran ini sebesar 75.98%, tidak bisa dinilai efisiensi anggarannya.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% realisasi
1	Program Pemberdayaan Sosial	4,674,681,700	4,445,586,784	95.10
2	Program Rehabilitasi Sosial	20,165,138,344.50	17,421,392,718	86.39
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,796,165,900	1,662,014,600	59.44
4	Program Penanganan Bencana	484,449,800	458,414,000	94.63
TOTAL		28,120,435,745	23,987,408,102	85.30

Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal

Sasaran Strategis 6: Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah

Capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4.80	4.84	99.17
Indeks Gini	0,308	0.275	100
Rata-rata			99,59%

Sasaran ini didukung oleh program yang sama seperti sasaran strategi lima.



SASARAN 7: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Capaian sasaran ini merupakan capaian dari indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat pengangguran terbuka	1.96	2.44	75.51
Rata-rata			75.51

Sasaran ini didukung oleh program dengan total anggaran sebesar 101.049.000.00, dan realisasi sebesar 84.789.000.00 (83,91%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 75.51% (kinerja sedang), tidak dapat dinilai efisiensi anggarannya.

SASARAN 8: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dari capaian indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5.27	3.76	71.35
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.61	3.94	70.23
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4.86	3.46	71.19
Persentase koperasi sehat	3.82	12.96	100
Rata-rata			78.2



Sasaran ini didukung oleh tiga program dengan total anggaran sebesar Rp.374421450 dan realisasi sebesar Rp.344441700 (91.9%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 78.2% (kinerja sedang). Capaian ini jauh melampaui capaian tahun 2020 (-3). Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tengah Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung.

Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui berbagai program berupaya memberikan perlindungan dan bantuan terutama bagi masyarakat yang paling terdampak pandemi. Bantuan beras, rehabilitasi rumah, bantuan biaya pendidikan diberikan bagi masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Berbagai program yang telah dilaksanakan mampu mengurangi dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan berkurang dibanding tahun 2020. Secara umum situasi kemiskinan relatif lebih terkendali dan tidak terlalu parah, dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	29.530.500	27.886.500	94,4
2.	Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	66.280.000	0	



No	Program	Anggaran	Realisasi	%
3.	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	344.890.950	316.555.200	91.8
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.022.057.500		
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.281.077.160		
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	242.044.450		
7.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.447.981.500		
8.	Program Perizinan Usaha Pertanian	291.936.000		
9.	Program Penyuluhan Pertanian	553.148.900		
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	67.500.000		
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	919.489.728		
	TOTAL	374.421.450	344.441.700	91.9

SASARAN 9: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2020	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	25 milyar	20,10 milyar	80,4
Rata-rata			80,4



Sasaran ini didukung oleh satu program dengan total anggaran sebesar Rp.460.491.125 dan realisasi sebesar Rp.318.061.386 (80.4%) Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 80.4% (kinerja tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 19.6%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%realisasi
2	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	460.491.125	318.061.386	65,64
	TOTAL			

SASARAN 10: Meningkatnya investasi PMDN

Kinerja sasaran ini diukur dengan capaian indikator berikut ini:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5.5	12.43	100
Rata-rata			100

Sasaran ini didukung oleh dua program dengan total anggaran sebesar Rp. 23.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.17.480.000,00 (74.38%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 27,62%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	335.173.000,00	106.971.700,00	31,92



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2	Program Promosi Penanaman Modal			
	Total	23,500,000	17,480,000	74.38

SASARAN 11: Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat.

Capaian sasaran ini diukur melalui capaian indikator berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp.6.687.774.000	Rp.7.204.500.000	100
Rata-rata			100

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp. 5.374.026.000,00 Rp.5.485.275.052,00 dan realisasi sebesar 599.165.700,00 (93,28%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,72%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 3,195,901,000	3.124.825.608	97.78
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 1,667,032,707	585.914.700	35.15
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 129,375,000	30.167.500	23.32
	TOTAL		3.740.907.808	



Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Fisik Dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian

Capaian Misi 3 dijabarkan Tujuan 3 dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tujuan 3: Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Berkualitas

Sasaran 12: Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator berikut ini:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64.75	68.37	100
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	67.35	68.49	100
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	67.00	66.67	99.5
Persentase kecukupan RTH publik	24.86	28.45	100
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	67.43	58.35	86.53
Rata-rata Capaian			97.2

Sasaran ini didukung oleh 6 (enam) program dengan total anggaran sebesar Rp.53,853,204,000,00 dan realisasi sebesar Rp.49,244,693,054,00 (91,44%). Dibandingkan dengan rata-rata



capaian kinerja sasaran ini sebesar 97.2% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,56%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	3.279.219.000	1.067.135.338	32,54
2	Pengembangan Jasa Konstruksi	78.636.583.475	45.790.670.413	58,23
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	68.261.612.400	35.331.545.128	51,76
4	Penataan Bangunan Gedung	296.880.000	135.438.550,00	58,23
5	Program Pengembangan Perumahan	78.750.000,00	2.465.000,00	3,13%
6	Program Kawasan Permukiman	8.273.767.000,00	5.567.786.900,00	67,29%
	TOTAL	151.045.107.875	82.419.772.679	

Misi 4: Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Dan Berwawasan Lingkungan

Capaian Misi 4 dijabarkan dalam Tujuan 4 dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tujuan 4: Meningkatkan Sumber Daya Daerah Dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

SASARAN 13: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat

Capaian sasaran 13 diukur melalui indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,67	0,7	100,00
Rata-rata Capaian			100,00



Sasaran ini didukung oleh tiga program dengan total anggaran sebesar Rp.1,131,622,000,00 dan realisasi sebesar Rp.1,054,440,640,00 (93.18%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 103,37% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,82%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan	28.131.000	6.364.000	22.62
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	23.325.000	22.825.000	97.86
3	Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakata n Olahraga	1.080.166,000	1.025.251.640	94.92
TOTAL		1,131,622,000	1,054,440,640	93.18

SASARAN 14: Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,81	89.30	98.34
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	4.73	4.73	100
Rata-rata Capaian			99,25%



Sasaran ini didukung oleh lima program dengan total anggaran sebesar Rp. 4,473,772,625.00 dan realisasi sebesar Rp3,787,223,764.00 (75,93%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,25% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 24,07%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	27,452,800.00	25,979,000.00	94.63%
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	353,118,500.00	217,588,900.00	61.62%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	97,298,500.00	92,566,700.00	95.14%
4	Program Perlindungan Perempuan	11,342,300.00	9,841,550.00	86.77%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	25,262,400.00	20,270,400.00	80.24%
	Total	4,473,772,625.00	3,787,223,764.00	84.65

SASARAN 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,44	67.93	100

Sasaran ini didukung oleh empat program dengan total anggaran sebesar Rp.6.635.548.441,00 dan realisasi sebesar 3.972.490.311,00 (64,06%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 35,94%.



No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp785.995.441,00	Rp 576.452.700,00	73,34%
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp4.527.299.000,00	Rp 2.942.297.611,00	64,99%
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Rp 1.090.744.000,00	Rp376.765.000,00	34,54%
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 231.360.000,00	Rp76.975.000,00	33,27%
5.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 150.000,00	Rp0,00	0,00%
	Total	Rp.6.635.548.441,00	Rp.3.972.490.311,00	

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Misi 5 diuraikan dalam Tujuan dan sasaran kinerja berikut:

Tujuan 5: Meningkatkan Sumber Daya Daerah Dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

SASARAN 16: Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Capaian sasaran 16 diukur dengan indikator sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Predikat AKIP	A (80,01)	Belum ada nilai	-
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	B (3,95)	79.60
Kualitas aspek perencanaan	62,82	69.95	98.65
Rata-rata Capaian			89.13%

Sasaran ini didukung oleh dua program dengan total anggaran sebesar Rp. 1,720,939,100,00 dan realisasi sebesar Rp.1,361,261,445,00 (79,10%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 89.13% (kinerja tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,9%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	225.975.000		
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.214.859.850		
	Total			

SASARAN 17: Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi

Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP (2020)	100
Indeks Profesionalisme ASN	74.42	75.00	100
Rata-rata Capaian			100

Sasaran ini didukung oleh empat program dengan total anggaran sebesar Rp. 3,869,944,700,00 dan realisasi sebesar Rp. 2,903,513,831,00 (75,03%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 98,4% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 24,97%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	213.901.267.600	64,237,281,241	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.211.892.900	314,976,000	
3	Program Kepegawaian Daerah	3,489,929,750		
4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp2,641,918,250		



Sasaran 18: Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah

Capaian sasaran ini, diukur melalui indikator berikut ini:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	65.79	65.79	100
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	23.61	23.61	100
Rata-rata Capaian			100

Sasaran ini didukung oleh empat program dengan total anggaran sebesar Rp10,030,573,500 dan realisasi sebesar Rp3,390,936,789 (33.8%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 63.5%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Aplikasi Informatika	5.660.440.000	782.377.000	14
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.795.093.000	2.204.051.789	58
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.817.000	23.508.000	31
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	500.223.500	381.000.000	76



	Pengamanan Informasi			
	Total	10,030,573,500	3,390,936,789	33.8

Sasaran 19: Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator berikut ini:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Persentase peningkatan penerimaan zakat	10,00	13.43	100%
Rata-rata Capaian			100%

Sasaran ini didukung oleh satu program dengan total anggaran sebesar Rp. 4.856.672.500,00 dan realisasi sebesar Rp.2.386.340.072,00 (48,77%). Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% (kinerja sangat tinggi), terdapat efisiensi anggaran sebesar 51,23%.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	4.856.672.500	2.386.340.072	48,77

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Strategi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mendukung tercapaian Kinerja adalah dengan melaksanakan program-program prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah, yaitu:



Sasaran I: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Faktor pembentuk HLS dan RLS adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang bersekolah ditingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Upaya meningkatkan HLS dan RLS dengan meningkatkan partisipasi peserta didik, dengan memanfaatkan aplikasi SATUNIK. Aplikasi berbasis web ini merupakan manajemen terpadu data kependudukan dan pendidikan (DAPODIK dan EMIS Kemenag). Penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak bersekolah terdata *by NIK by Adress*, sehingga dapat dilacak keberadaanya.

Para penilik Di Dinas Pendidikan melakukan tracking ke rumah-rumah penduduk sesuai data yang diperoleh untuk dilakukan pendataan dan pendekatan kepada keluarga. Anak diajak untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B dan C. Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah.

Rincian program dan kegiatan beserta anggaran dan realisasinya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

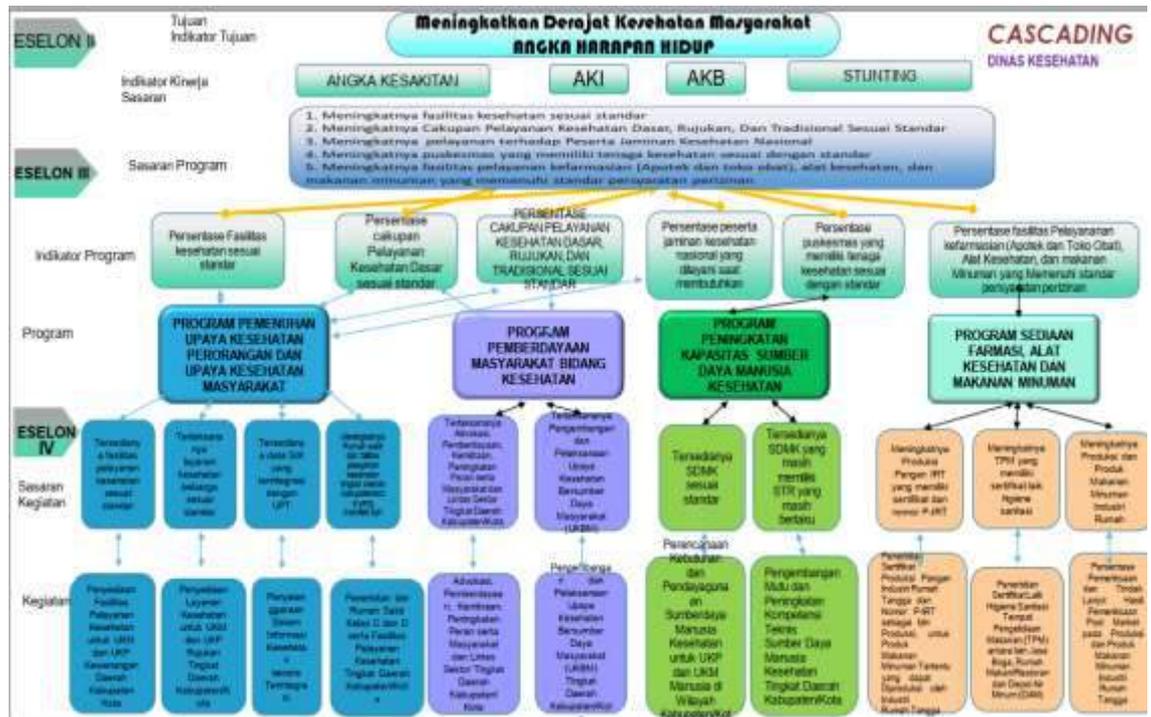


no	program	kegiatan	sub kegiatan	indikator sub kegiatan	target tahun 2021	realisasi tahun 2021	anggaran sub kegiatan			
							anggaran	realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGLOLAAN Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Dibangun Sekolah	1 paket	1 paket	305.150.000	302.681.000	99,26		
			Jumlah Pembangunan Teras, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Peror	3 paket	3 paket	1.130.810.000	1.121.499.800	98,65		
			Jumlah Ruang Kelas yang Dirubah	2 paket	2 paket	1.763.118.000	1.752.476.600	99,40		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	3 paket	3 paket	195.700.000	194.402.000	99,34		
			Jumlah Mebelur yang Dibeli	1 paket	1 paket	200.900.000	198.504.000	98,81		
			Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4 paket	4 paket	1.402.120.000	1.380.552.000	97,98		
			Jumlah Lomba-lomba yang Dilaksanakan	4 lomba	4 lomba	531.288.000	502.990.500	94,67		
			Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	3 bulan	3 bulan	7.038.920.000	7.478.308.754	97,89		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis PTK/Karya Ilmiah	5 kegiatan	4 kegiatan	749.571.550	455.570.550	60,75		
			Jumlah Sekolah Penerima BOS SD	342 sekolah	342 sekolah	17.767.015.288	16.412.753.851	92,38		
			Jumlah Pembinaan (dan pembinaan sekolah yang tidak ada)	1 kegiatan	1 kegiatan	182.773.500	184.060.200	79,91		
			Jumlah Sekolah Penerima BOS SMP	37 sekolah	37 sekolah	5.967.583.277	2.504.587.999	42,33		
			PENGLOLAAN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah	2 paket	2 paket	156.050.000	155.009.208	99,35
					Jumlah Ruang Kelas yang Dirubah	3 ruang	3 ruang	408.338.000	405.416.725	99,28
Jumlah Ruang Kelas yang Dirubah	1 paket	1 paket			40.000.000	39.572.288	98,93			
Jumlah Mebelur Sekolah	8 set	8 set			37.740.000	36.633.800	96,74			
Jumlah kegiatan Lomba-Lomba	10 lomba	10 lomba			290.000.000	267.110.000	92,11			
Jumlah Lembaga Penyelenggara PAUD	3 bulan	3 bulan			1.712.880.000	1.585.511.712	92,56			
Meningkatnya Partisipasi Dasar bagi Masyarakat	160 orang	260 orang			320.650.000	308.042.500	96,07			
Jumlah Peserta Sosialisasi Daopdik PAUD dan Diawas	60 lembaga	60 lembaga			172.000.000	171.000.000	99,43			
Jumlah Sekolah Penerima BOP PAUD	290 sekolah	290 sekolah			4.801.200.000	4.314.218.680	89,86			
Jumlah gedung Pasat Kegiatan Masyarakat	1 paket	1 paket			197.000.000	195.257.495	99,17			
Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Non Formal	16 lembaga	16 lembaga			1.448.375.000	1.013.054.510	70,33			
Jumlah pelatihan tutor ketertaraan	100 orang	100 orang			300.772.500	210.162.500	69,87			
Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Non Formal	35 sekolah	35 sekolah			4.046.500.000	4.024.718.180	99,46			
PENGLOLAAN Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1 lahan	1 lahan	294.905.000	178.675.500	60,61	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah dalam kondisi baik	1 ruang	1 ruang	234.850.000	233.527.011	99,44			
		Jumlah Pagar Sekolah	4 paket	4 paket	862.800.000	858.888.823	99,55			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah	2 paket	2 paket	2.071.841.500	2.038.692.141	98,39			
		Jumlah Prasarana Pendidikan	1 ruang	1 ruang	99.950.000	99.080.120	99,26			
		Jumlah Pembangunan Teras, Lapangan Upacara dan Fasilitas Peror	1 ruang	1 ruang	86.900.000	86.322.178	99,34			
		Jumlah Pembangunan Teras, Lapangan Upacara dan Fasilitas Peror	2 paket	2 paket	317.865.450	340.589.468	87,99			
		Jumlah Pengadaan Komputer/Laptop, PC Server, UPS, dan Perincir UHF	3 set	3 set	707.000.000	679.397.000	96,20			
		Jumlah Lomba-lomba yang Dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	258.085.950	123.588.908	48,27			
		Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	3 bulan	3 bulan	1.560.096.000	1.546.063.936	98,20			
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis PTK/Karya Ilmiah	1 kegiatan	1 kegiatan	89.795.000	90.083.000	96,20			



Sasaran II : Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:



Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan, dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu Angka harapan hidup dengan target 2021 sebesar 67.04 dan target 2023 sebesar 67,87. Tentunya indikator ini hanya bisa dicapai pada akhir tahun. Untuk mendukung capaian indikator tersebut perlu disusun beberapa sasaran, indikator sasaran, program, dan kegiatan.

Salah satu indikator sasaran tersebut juga tidak dapat dicapai per triwulan, yaitu Angka morbiditas, tercapainya indikator



sasaran ini memerlukan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dimana kegiatan itu terdiri dari pelayanan kesehatan dasar SPM dan Non SPM.

Untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran, disusun program sebanyak 4 (empat) program yakni 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dan 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Target yang hendak dicapai adalah 1) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar, 2) Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Yang Dilayani Saat Membutuhkan, 3) Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Standar, 4) Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek Dan Toko Obat), Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Standar Persyaratan Perizinan, dan 5) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar. Pengampu program tersebut adalah Bidang Kesehatan Masyarakat dan SIK, Pelayanan Kesehatan.

Secara ringkas uraian program dan kegiatan dalam tabel berikut ini:



Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Program Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kesalcitan (morbiditas)		16.94	9.76	140.49
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	persen	76.85	73.89	96.14
	Persentase Calcupan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar	persen	100%	100%	100%
	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Yang Dilayani Saat Membutuhkan	persen	100%	100%	100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	persen	76.85	73.89	96.14
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100%	100%	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar	persen	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai dengan standar	persen	11.36	11.36	100
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar	persen	23.81	23.81	100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan toko obat), alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar perayaraan perizinan	persen	60%	73.28%	122
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persen	100%	100%	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR	persen	3.57%	3.57%	100
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100%	100%	100

capaian IKU tahun 2021 sudah tercapai maksimal meskipun ada satu indikator yakni cakupan Fasilitas Pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna yang tidak tercapai karena Pada tahun 2020 karena terjadi pandemi covid-19, maka kegiatan survey akreditasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga pada tahun 2021 fasilitas kesehatan yang terakreditasi dengan status paripurna menjadi 0%. Hasil capaian pengukuran terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja

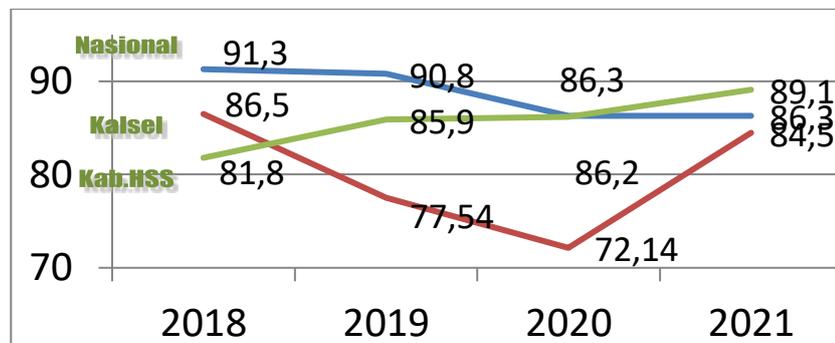


Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET	CAPAIAN KNERJA	PERSEN CAPAIAN
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan (morbiditatas)	16.4	9.76	140.49%
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	76/100.000 KH	117 per 100.000 KH	46.60%
		Angka Kematian Bayi per 1000 KH	15/1000 KH	12 per 1000 KH	120.33%
		Persentase balita stunting	4.69	6.01%	71.80%

Sasaran III : Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam Dan Aman.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.



DisKP Prov.Kalsel



PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak 2018 dan 2021 secara konsisten terus meningkat lebih baik disbanding PPH Provinsi Kalsel bahkan Nasional.

Dibandingkan tahun 2019 dan 2020, capaian tahun 2021 lebih tinggi.

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2019		Capaian 2020		Capaian 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergisi, seimbang dan aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,61	83,94	85,46	85,48	86,31	86,33
		PPH Konsumsi	Skor	-	-	83,65	86,20	84,48	89,1
		Nilai Tukar Petani	Rasio	-	-	-	-	106	106,35

Dalam pencapaian sasaran strategis tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman didukung oleh program sebagai berikut:

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, dimana dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan penyuluhan, lomba cipta menu, pemanfaatan lahan pekarangan dan penilaian skor PPH Konsumsi.

Untuk meningkatkan Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2021 ditargetkan sebesar 86,31 dan realisasi sebesar 86,33 Hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.



Sejak tahun 2021 ini ada penambahan indikator kinerja sasaran yakni Nilai Tukar Petani (NTP), dalam rangka mengukur (proxy) tingkat kesejahteraan masyarakat petani. NTP adalah Indeks harga yg diterima petani (It) dibanding dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Kita menargetkan NTP >100, yang berarti petani mengalami surplus, dalam arti harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Tahun 2021 target NTP 106 dan berhasil direalisasikan 106,35, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja sebesar 100,33%.

Upaya yang telah dilakukan dengan Pembangunan lumbung pangan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan sarana/prasarana guna pelaksanaan sistem tunda jual di lumbung pangan masyarakat yaitu kegiatan menyimpan gabah pada saat harga anjlok akibat panen raya, kemudian menjualnya pada saat harga telah naik agar didapatkan keuntungan lebih dari selisih harga untuk menaikkan pendapatan petani yang berujung kepada kenaikan nilai tukar petani. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat saat ini berjumlah 22 buah yang tersebar di beberapa kecamatan.

Salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan adalah mengawasi dan memeriksa komoditi pangan segar tanaman pangan dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, beras, dan palawija). Adapun Program yang mendukung indikator terjaminnya 4 komoditi pangan segar yang tercemar adalah Program Pengawasan dan Keamanan Pangan. Kegiatannya adalah Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan mutu dan kewanitaan pangan telah dilakukan penyuluhan/sosialisasi tentang keamanan pangan serta



melakukan pengawasan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap pangan segar. Untuk tahun 2021 target indikator terjaminnya 4 komoditi pangan segar yang tercemar $\leq 13\%$ atau minimal 87% pangan segar dalam keadaan Aman.

Dalam kegiatan keamanan pangan sangat diperlukan adanya beberapa cara/metode untuk pengawasan dan pemeriksaannya, agar dihasilkan pangan segar yang aman dan layak untuk di konsumsi. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat).

Pengujian dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan dengan menggunakan rapid test kit. Untuk Mengetahui adanya cemaran pada produk pangan segar maka perlu dilakukan pemeriksaan, baik secara Organoleptik (untuk pemeriksaan fisik Ph, suhu, dan adanya pembusukan/kualitas produk), pemeriksaan cepat dengan menggunakan screening tes antara lain untuk pemeriksaan zat pengawet (formalin borak dll), pemutih (klorin, hydrogen peroksida/H₂O₂) dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa cemaran mikroba, residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan logam berat.

Keamanan pangan menjadi isu penting dalam perdagangan bebas. Jaminan keamanan pangan merupakan syarat dalam memenangkan persaingan di pasar bebas. Indikator ini penting karena indikator ini mendukung Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan.



Pada tahun 2021 capaian indikator terjaminnya 71 komoditi pangan segar yang tercemar, dengan target $\leq 13\%$. Realisasinya 5,63%, atau bisa dinyatakan tingkat capaian kinerja sebesar 108,47%. Hasil pengujian tidak ditemukan zat-zat kimia yang berbahaya pada pangan segar yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi anggaran Program dan Kegiatan yang mendukung diuraikan dalam tabel berikut:

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	873.525.000,00	862.398.000,00	98,73
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	873.525.000,00	862.398.000,00	98,73
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	733.525.000,00	722.500.000,00	98,50
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	140.000.000,00	139.898.000,00	99,93
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	814.892.500,00	766.881.300,00	94,11
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	180.942.500,00	159.862.000,00	88,35
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10.150.000,00	0	0,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	90.701.000,00	84.702.500,00	93,39
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	80.091.500,00	75.159.500,00	93,84
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	115.075.000,00	100.483.500,00	87,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4.175.000,00	2.509.250,00	60,10
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105.900.000,00	93.974.250,00	88,74
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	518.875.000,00	506.535.800,00	97,62
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	512.600.000,00	500.260.800,00	97,59
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	6.275.000,00	6.275.000,00	100,00
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.825.000,00	2.825.000,00	100,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.825.000,00	2.825.000,00	100,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.825.000,00	2.825.000,00	100,00
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	34.397.500,00	33.152.900,00	96,38
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	34.397.500,00	33.152.900,00	96,38
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.050.000,00	3.400.000,00	83,95
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.847.500,00	4.847.500,00	100,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.500.000,00	24.905.400,00	97,67
JUMLAH	4.764.117.146,00	4.272.290.892,00	89,68



**Sasaran IV : Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat.
Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya**

Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan Dasar;
2. Program Pemenuhan Upayan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih.

Program nomor 1 telah dijelaskan pada sasaran 1 dan Program nomor 2 juga telah dijelaskan pada sasaran 2, sedangkan program nomor 3 akan dijelaskan pada sasaran 12 di misi 3.

Sasaran V : Meningkatnya Perlindungan Sosial Dan Masyarakat.

Capaian kinerja dinas social terkait perlindungan sosial sangat baik. Perlindungan bagi masyarakat yang berpenghasilan minimal, agar tidak bertambah buruk perekonomiannya selama masa pandemic covid 19.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian 2021
1	2	6	5	7	8
Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Persentase Angka PMKS yang mandiri	4,97	5,65	5,52	97,68
Menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,51	0,50	0,45	111,11
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,09	0,06	150



Capaian indikator ***Persentase Angka PMKS yang Mandiri*** diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung memiliki sasaran yang menargetkan peningkatan kemandirian Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Praktek Belajar Kerja untuk Disabilitas dan Pelayanan Rujukan Keterampilan. kegiatan-kegiatan seperti Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pratek Belajar Kerja untuk Disabilitas dan yang terakhir kegiatan Pelayanan Rujukan Keterampilan yang kegiatan ini juga bergantung pada kouta yang ditentukan oleh Panti Sosial yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Bidang Rehabilitasi Sosial dengan indikator sasaran persentase disabilitas terlantar yang mandiri dengan target 17,26% terealisasi 17,36%, persentase anak terlantar yang mandiri dengan target 24,12% terealisasi 24,25%, persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang mandiri dengan target 4,52% terealisasi 3,90% dan persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dengan target 39.18% terealisasi 31.31%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sebanyak 2.037 orang;
- b) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebanyak 100 orang;
- c) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan



dan Kesehatan Dasar sebanyak 69 orang;

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial pada:

- a) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebanyak 117 orang;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebanyak 15 orang.
- c) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebanyak 75 orang.
- d) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 9 orang.

Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana telah melaksanakan bantuan tanggap darurat bencana kepada korban banjir, kebakaran dan pohon tumbang atau angin putting beliung pada tahun 2021 sebanyak 4.270 jiwa

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Dan Masyarakat didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni 2021	APBD Perubahan 2021	Realisasi Anggaran	Total Serapan Anggaran (%)
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.644.731.700	4.674.681.700	4.445.586.784	95.10
2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.644.731.700	4.674.681.700	4.445.586.784	95.10
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120.374.900	120.374.900	99.750.000	82.87
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	194.184.800	194.184.800	177.527.300	91.42
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.309.370.300	4.339.320.300	4.157.509.484	95.81
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.801.700	20.801.700	10.800.000	51.92
4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.620.173.600	2.796.165.900	1.662.014.600	59.44
4.1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	672.473.000	672.473.000	324.891.400	48.31
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	14.100.000	14.100.000	-	0.00
Rujukan Anak-Anak Terlantar	636.173.200	636.127.200	302.691.600	47.58
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	22.199.800	22.199.800	22.199.800	100.00
4.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	947.700.600	2.123.738.900	1.337.123.200	62.96
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	488.222.000	850.660.300	672.684.000	79.08
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	459.478.600	459.478.600	456.539.200	99.36
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	813.600.000	207.900.000	25.55
5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	454.569.900	484.449.800	458.414.000	94.63
5.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	454.569.900	484.449.800	458.414.000	94.63
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	454.569.900	484.449.800	458.414.000	94.63

Sasaran VI : Menurunnya Kemiskinan Dan Kesenjangan Antar Wilayah

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah didukung oleh program sebagai berikut:



3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.156.225.613	20.165.138.344,50	17.421.392.718	86.39
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	7.887.615.113	11.601.777.844,50	10.375.547.918	89.43
	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.116.991.825	10.893.343.300	9.755.219.200	89.55
	Penyediaan Alat Bantu	46.600.000	46.600.000	46.375.000	99.52
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	102.350.825	103.880.200	73.240.600	70.50
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	621.672.463	557.954.345,50	500.713.118	89.74

Program Pemberdayaan Sosial dengan target Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan sebesar 32,43% terealisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada:
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 11 orang
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 148 orang Samping Desa, 76 anggota Tagana dan 16 buah LKSA.
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 lembaga.



Sasaran VII : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung caapaian kinerja sasaran VII sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi Penempatan Tenaga Kerja	3,54%	100%
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terserap	40 <u>orang</u>	40 <u>orang</u>
2	Program Hubungan Industrial	Persentasi Hubungan Industrial	100%	57,14
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselasaikan melalui perjanjian bersama	7 kasus	4 Kasus
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentasi tenaga kerja yang dilatih kompetensi	100%	62,5%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensi	132	20

Capaian kinerja program dan kegiatan belum maksimal, kendalanya adalah sebagai berikut:

Proses seleksi penerimaan pegawai pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang memerlukan spesifikasi pendidikan dan keahlian tertentu yang masih sulit untuk di penuhi; Ketidaksiapan tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja yang ada masih jauh dari yang di persyaratkan oleh perusahaan. Terbatasnya perusahaan swasta yang berinvestasi di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berikut ini kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :



Melaksanakan Pelatihan-pelatihan kerja yang berbasis unit kompetensi, hal ini dilaksanakan untuk melatih Angkatan kerja yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Melaksanakan Pemagangan bagi Angkatan kerja yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih Angkatan kerja dalam menghadapi suasana kerja sesungguhnya serta apabila berprestasi dan memenuhi syarat dari pihak perusahaan peserta pemagangan dapat direkrut menjadi karyawan dan pada akhirnya ikut serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja yang terserap	Program Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	29.530.500	
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	29.530.500	27.886.500
		Program Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	66.280.000	-
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	66.280.000	-
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensi	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	344.890.950	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Unit Kompetensi	308.480.350	280.624.600
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Peenyediaan Instruktur seerta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	36.410.600	35.930.600	
J U M L A H				



Sasaran VIII : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan didukung oleh program sebagai berikut:

Sektor unggulan perdagangan, dilaksanakan Dinas Perdagangan dengan indikator kinerja Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Capaian Tahun 2021 sampai laporan ini dibuat, belum rilis oleh BPS. Capaian Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentasi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	8.14 %	-
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentasi Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8.14 %	-



No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.14 %	-
3	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan



No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	13 %	6,5 %
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Koperasi	21 Koperasi
5	Program Pengembangan UMKM	Persentasi Pengembangan UMKM	18%	-
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	60 UMKM	60 UMKM

Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat dalam bidang Perindustrian melalui Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Mutu sebagai bentuk kepedulian



pemerintah terhadap Industri Kecil dan Menengah di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pendidikan Pelatihan Perkoperasian dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.

Pada sector perdagangan, Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi indikator utama. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas Perdagangan, maka disusun program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Ekspor dengan target :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) kali. Dilaksanakan pada triwulan IV dikarenakan masih berlangsungnya pandemi covid yang menyebabkan banyaknya jadwal pameran yang diundur bahkan dibatalkan.
- 2) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan target:
 - a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berupa aplikasi yaitu sebanyak 3 aplikasi yang digunakan sepanjang tahun.
- 3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan target :
 - a) Program Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan pengukuran berupa persentase barang beredar yang sesuai standar di Kab. HSS yaitu 71,42 kali. Pada Triwulan I dengan target 10%, Pada Triwulan II 25%, Pada Triwulan III sebesar 45% , Pada Triwulan IV sebesar 71,42%.



- 4) Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target :
 - a) Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan persentase 2,0%. Pada Triwulan I 3%, Pada Triwulan II 2,5%, Pada Triwulan III 2,0% , Pada Triwulan IV 2,0%
 - b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota = 80% . Pada Triwulan I 20%, Pada Triwulan II 40%, Pada Triwulan III 60% , Pada Triwulan IV 80%
- 5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target:
 - a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak 11 pasar selama tahun 2021.
 - b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yaitu pemutakhiran data pedagang sebanyak 2102 orang. Pada Triwulan I 500 pedagang, Pada Triwulan II 500 pedagang, Pada Triwulan III 500 pedagang dan Pada Triwulan IV 612 pedagang.
- 6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan target :

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan meningkatkan PAD dari kemetrolgian dimana dilakukan tera/tera ulang terhadap potensi 11.100 UTTP. Pada Triwulan I ditargetkan sebanyak 2775 UTTP , Pada Triwulan II 2775 UTTP , Pada Triwulan III 2775 UTTP dan ada Triwulan IV sebanyak 2775 UTTP. Berikut perbandingan capaian program dan kegiatan tahun 2021



Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran	target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja	anggaran kegiatan		Persentase Realisasi Anggaran
						Anggaran	Realisasi	
Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor sektor pertanian dan perkebunan	4080000000	3684000000	90.29%	381,375,000	19,763,800	5.18%
		nilai ekspor sektor perikanan	4373500000	4373500000	100.00%			
		nilai ekspor industri kecil	1284200000	1284200000	100.00%			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran	3	1	33.33%			

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pelayanan	100	100	100.00%	1,068,505,100	948,128,714	88.73%
Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan	12	3	100.00%	435,309,100	405,531,354	93.16%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12	3	100.00%	220,430,000	202,951,500	92.07%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai standard	12	3	100.00%	173,984,000	155,433,252	89.34%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	12	3	100.00%	238,782,000	184,212,608	77.15%



Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	jumlah pelaku usaha melalui aplikasi	70	70	100.00%	10,000,000	5,000,000	50.00%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Dagang melalui e-commerce	3	2	66.67%	10,000,000	5,000,000	50.00%	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar	71,42	71,42	100.00%	55,261,120	40,358,100	73.03%	
	pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah kegiatan pengawasan barang beredar yang sesuai standar di Kab. HSS	10	10	100.00%	55,261,120	40,358,100	73.03%	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perdagangan	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	2	3		13,825,000	6,282,000	39.70%	
	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pantau Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	25	25		15,825,000	6,282,000	39.70%	
		Jumlah Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah	33	11					
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Berubaidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Pupuk dan Pestisida Berubaidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran	Persentase Penyuluhan Pupuk berubaidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran	100	40		139,686,400	65,083,800	46.59%
			Jumlah kios yang menyediakan pupuk berubaidi dan pestisida	6	-				
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Berubaidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Pupuk dan Pestisida Berubaidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran	Jumlah distributor yang menyediakan pupuk berubaidi dan pestisida	2	-		139,686,400	65,083,800	46.59%	

Sektor lain yang berperan dalam Peningkatan produksi sector unggulan adalah pertanian. Pertanian adalah penyumbang utama pendapatan masyarakat. Dinas Pertanian selaku penyandang urusan, bertanggung jawab untuk peningkatan produksi pertanian sekaligus peternakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk capaian target adalah sebagai berikut:



no	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	target tahun 2021	realisasi tahun 2021	Program	anggaran program		
						anggaran	realisasi	%
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi padi	147.236	162.357,68	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,022,057,500.00	3,820,970,863.00	95.00
		Produksi Cabe	6,096	2,197.81				
		Produksi Kelapa	90,240	98,405.56				
		Jumlah produksi ternak kecil : Kambing	585	595.00				
		Jumlah produksi ternak unggas : Itik	245,000	249,900.00				
					Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,281,077,160.00	4,043,832,459.00	94.46
					Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	117,733,000.00	82,609,800.00	70.17
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,447,981,500.00	1,006,297,320.00	69.50
					Program Perizinan Usaha Pertanian	199,311,000.00	194,037,800.00	97.35
					Program Penyuluhan Pertanian	553,148,900.00	520,362,324.00	94.07

Untuk produksi Tanaman Pangan terutama padi, Tahun 2021 produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 162.357,68 ton gabah kering giling, dan pada tahun 2020 total produksi 159.074 ton, mengalami kenaikan sebesar **3.283,68 ton** gabah kering giling atau kenaikan **2,06 %**. Untuk **pertumbuhan kenaikan produksi** komoditas tanaman pangan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat kondisi alam / anomaly iklim, untuk komoditas hortikultura dan perkebunan rata-rata mengalami kenaikan akibat kenaikan harga.

Untuk produksi ternak kecil : kambing dan unggas : itik mengalami kenaikan sebesar 2,41% dan 2,17% karena perkembangan distribusi perdagangan / meningkatnya rumah makan / kuliner, yang menjadi pasar yang baik bagi peternak.

Pada Dinas Perikanan, capaian kinerja tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2020.



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	5,347,47 Ton	5,800 Ton	6,140,25 Ton	100 %
		Produksi Perikanan Tangkap	10.359,69 Ton	11,600 Ton	10.359,69Ton	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Produk Hasil Olahan	Persentase Produk Hasil Olahan Perikanan yang berkualitas yang diserap pasar	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja tahun 2021 merupakan tahun ketiga pembangunan jangka menengah 2018-2020, dimana capaian realisasi produksi perikanan pada tahun 2020 telah mencapai 15.707,16 Ton yang telah melewati target akhir periode renstra 2018-2023 sebesar 21,123 ton dengan capaian 100%. Dengan demikian untuk tahun 2021 ini telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap target dengan melihat capaian pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini tentu saja berkat komitmen yang tinggi dari pimpinan, dan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

Telah dilakukannya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi Dinas Perikanan yang dilakukan secara berkala sehingga memudahkan dalam melaporkan hasil yang dicapai. Promosi yang dilakukan secara terus menerus baik lewat brosur/ leaflet maupun media sosial online. Adanya kebijakan pelayanan dengan menerapkan pelayanan di tempat sehingga memudahkan para pemohon. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan proposal dalam pengajuan bantuan social / hibah.

Peningkatan produksi perikanan budidaya dilaksanakan dengan pembinaan pembudidaya ikan. Khusus perikanan



budidaya, telah dikembangkan budidaya ikan gabus haruan pada sentra pengembangan di Desa Asam Kec.Sungai Raya. Ini dilakukan karena ikan gabus haruan adalah salah satu komidi penyumbang inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diharapkan dengan budidaya ini, ikan gabus haruan akan selalu tersedia dalam jumlah cukup di pasaran dengan harga yang stabil.



Peningkatan produksi perikanan tangkap dilaksanakan dengan pemberian sarana dan prasarana panangkapan ikan.





Program dan kegiatan yang mendukung beserta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Program/kegiatan/subkegiatan	Realisasi Anggaran 2021	Realisasi Anggaran (Rp) dan (%)
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.476.937.500,00	1.392.670.150.000	99,95 %
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.451.950.000,00	1.368.022.850,00	95,05%
	2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.987.500,00	24.647.300,00	98,05%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	725.528.250,00	700.826.500,00	99,89%
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	111.464.000,00	108.548.500,00	97,45%
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	613.864.250,00	592.278.000,00	100%
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3.093.250,000	2.994.911.000,00	96,98 %
	1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	3.093.250,000	2.994.911.000,00	96,98 %
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	37.419.72800	32.067.667,00	85,98%
	1. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.039.728,00	24.687.667,00	82,85%
	2. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	7.380.000,00	7.380.000,00	100%
	Jumlah	8.977.043.862,00	8.045.629.968,00	99,89 %

Sektor lain yang berperan untuk peningkatan produksi sector unggulan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pengembangan UMKM. Program yang mendukung capaian adalah:

No	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
5	Program Pengembangan UMKM	<u>Persentasi Pengembangan</u> UMKM	18%	-
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	60 UMKM	60 UMKM

Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat dalam bidang Perindustrian melalui Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Mutu sebagai bentuk kepedulian



pemerintah terhadap Industri Kecil dan Menengah di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi izin P-IRT bagi IKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat bersaing dengan IKM dari Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Selatan dan juga memenuhi persyaratan kesehatan bagi IKM yang mengolah pangan.

Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Industri (IUI) berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha Industri. Kegiatan Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan dan Pertanggung jawaban bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kegiatan Klinik UMKM berupa pendampingan UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Lembaga keuangan/Bank yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sasaran IX : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terkait peningaktan PAD, Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah bertanggung jawab untuk pencapaiannya. IKU BPKPD dalam hal ini adalah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5		
1.	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Daerah	Indeks Kemandirian Daerah	Persen	18,00	28,87	160,38



Tingkat Kemandirian Daerah adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat/propinsi antara lain bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus, dana darurat dan dana pinjaman. Besaran angka rasio kemandirian keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Kemandirian Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi indeks kemandirian mengantung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan sebaliknya. Selain itu Indeks Kemandirian Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi indeks kemandiran daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Pola Hubungan Tingkat kemandirian Daerah :

Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
25-50	Konsultatif
>50 – 75	Partisipatif
>75 – 100	Delegatif

Pengukuran Indeks Kemandirian Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 dengan target 18,00 dan realisasi mencapai 28,87. Capaian Indeks kemandirian Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 melebihi dari nilai yang ditargetkan serta dari kriteria kemandirian daerah juga meningkat,



yang berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Realisasi PAD sd Desember 2021 sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.275.769.551.357,00	1.332.509.903.001,73	104,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202.239.285.720,00	244.605.008.972,73	120,95
4.1.1	Pajak Daerah	14.310.773.000,00	13.537.227.571,00	94,59
4.1.2	Retribusi Daerah	8.675.139.600,00	6.567.597.051,00	75,71
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.004.500.000,00	6.091.259.048,00	101,44
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	173.248.873.120,00	218.408.925.302,73	126,07
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.049.834.045.637,00	1.072.252.216.279,00	102,14
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	974.878.765.637,00	1.003.434.645.997,00	102,93
4.2.1.01	Dana Perimbangan	803.056.832.637,00	831.612.712.997,00	103,56
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	53.518.401.000,00	53.518.401.000,00	100,00
4.2.1.05	Dana Desa	118.303.532.000,00	118.303.532.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.955.280.000,00	68.817.570.282,00	91,81
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	74.955.280.000,00	68.817.570.282,00	91,81
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.696.220.000,00	15.652.677.750,00	66,06
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.025.200.000,00	53.883.750,00	5,26
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.671.020.000,00	15.598.794.000,00	68,80

Sumber Data : Smda 2021 per tanggal 4 Januari 2022

Indeks kemandirian daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan pada tahun 2020, adapun kenaikan realisasi sebesar 11,29 dengan rincian berikut :

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Lain-Lain Pendapatan yang sah	Tingkat Kemandirian Daerah	Kriteria
2020	202.439.457.513	1.126.819.545.005	17,58	Instruktif
2021	244.605.008.972,73	847.265.340.747	28,87	Konsultatif



Indeks kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pendapatan asli daerah yang masih belum dapat diandalkan bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah itu terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang didalam pemungutan/pengenaannya berdasarkan undang-undang/ peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja program/kegiatan /Sub kegiatan (th)	Realisasi Kinerja program/kegiatan/Sub kegiatan (2021)	Capaian
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%
1.1	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%



1.2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 kali	12 kali	100%
1.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dok	1 lap	100%
1.2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 dok	4 dok	100%
1.3	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%

Sasaran X : Meningkatnya investasi PMDN

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan PMDN	4,80%	5,00%		9,08%	14,12%	
2	Nilai Realisasi Investasi			204 M			205,89 M

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Persentase Peningkatan PMDN untuk tahun 2019 sudah mencapai 9,08% dari target sebesar 4,80% sehingga capaian sudah melebihi 100%, demikian juga pada



tahun 2020 dengan target 5,00% diperoleh realisasi sebesar 14,12% dan capaian ini malah melebihi 200%.

Untuk tahun 2021 telah diadakan revisi indikator kinerja sesuai dengan telah diadakannya penyesuaian renstra perangkat daerah menjadi Nilai Realisasi Investasi sehingga target yang semula hanya 5,50% berubah menjadi 204 Milyar Rupiah dengan melihat kondisi kenyataan di lapangan yang masih sangat memungkinkan realisasi dapat tercapai.

Pada tahun 2021 target kinerja Nilai Realisasi Investasi dengan target sebesar 204.000.000.000,- yang mana realisasi capaian sebesar 205.890.473.821,- atau sebesar 100,93%. Pada tahun lalu nilai investasi dapat terealisasi dengan peningkatan yang cukup signifikan hal tersebut tidak terlepas dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi penanaman modal yang secara berkala dilakukan sebagai inventarisasi kegiatan operasional PMDN di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga para pelaku usaha/investor rutin melaporkan realisasi investasinya.

Nilai Realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 1.655.870.000.000,- sedangkan realisasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 1.479.140.000.000,- sehingga perolehan realisasi investasi untuk tahun 2020 adalah 176,73 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2021 yaitu triwulan I diperoleh investasi senilai 21,16 M dengan target 10 M yang mana berarti untuk target triwulan sebenarnya telah tercapai. Demikian juga untuk triwulan II ditarget sebesar 40 Milyar dengan realisasi sebesar 51,75 Milyar.

Indikator ini didukung oleh 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi



pemantauan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Program kedua adalah promosi penanaman modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota dan sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota.

Adapun pagu indikatif dan penyerapan anggaran masing-masing kegiatan adalah : 1) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan target anggaran sebesar Rp. 16.206.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.623.000,- atau sebesar 59%. 2) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan target anggaran sebesar Rp. 294.447.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.940.171,- atau sebesar 73,68%. 3) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan target anggaran sebesar Rp. 24.520.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.137.500,- atau sebesar 86,21%.

Sasaran XI : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Dan Kebudayaan Bagi Masyarakat

Hasil evaluasi internal menunjukkan jumlah kunjungan dan tingkat pengeluaran wisatawan pada tahun 2020 sebanyak 27.175 wisatawan dengan tingkat rata-rata pengeluaran Rp 250.000, (spending of money) berkontribusi sebesar 8,8 milyar, dan turun pada tahun 2021 sebesar 19.212 dengan tingkat rata-rata pengeluaran Rp 250.000, (spending of money berkontribusi sebesar



7,2 milyar). Potensi yang bagus adalah meningkatnya length of stay (rata-rata lama tinggal) wisatawan dari sebelumnya 1,4 hari di tahun 2020, meningkat menjadi 1,5 hari pada tahun 2021.

TAHUN	KUNJUNGAN WISATAWAN	LAMA TINGGAL	RATA-RATA PENGELUARAN	SPENDING OF MONEY
2019	15.219	1,2	250.000	Rp 5.326.650.000
2020	27.175	1,3	250.000	Rp 8.831.875.000
2021	19.212	1,5	250.000	Rp 7.204.500.000

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*) didukung oleh program sebagai berikut:

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian		Target Indikator	Realisasi
		2019	2020	2021	2021
Kunjungan dan Rata-rata lama tinggal serta nilai tambah ekraf (semakin) meningkat	Jumlah Kunjungan wisatawan	338.867	267.029	281,656	269.004

Penurunan kunjungan wisatawan dikarenakan kondisi wabah pandemi Covid-19 yang berimbas kepada pariwisata secara global, tidak terkecuali Hulu Sungai Selatan. Pemkab Hulu Sungai Selatan menerapkan langkah pencegahan dengan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang bersifat mengumpulkan kerumunan, termasuk ditutupnya beberapa obyek wisata pada moment-moment liburan/hari besar.

Penurunan jumlah kunjungan juga terpengaruh dari tidak dilaksanakannya event-event pariwisata Penurunan minat



kunjungan pada wisata alam, tertutupi dengan meningkatnya kunjungan di beberapa tempat wisata religi, diantaranya ke makam Syekh H. Ahmad (Datu Balimau) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Kalumpang, Tuan Guru Haji Muhammad Thaib alias Haji Sa'duddin (Datu Taniran) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Angkinang, Sayyid Abu Bakar (Habib Lumpangi) di Kecamatan Loksado, dan yang menjadi magnet kunjungan wisata religi terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 adalah Makam Tuan Guru H Muhammad Riduan Baseri (Guru Kapuh) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 8.000 peziarah yang berasal dari dalam dan luar provinsi.

Sasaran XII : Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Berkualitas

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 km/jam didukung oleh program pada Dinas PUTR, khususnya Bidang Bina Marga seperti tergambar dalam baan di bawah ini:





Indikator lain yang digunakan untuk menilai infrastruktur adalah Persentase Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik. Capainnya pada tahun 2021 seperti dalam tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik	-	-	-	23,80%	42,86%	66,67%

Kinerja penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 sebesar 66,67%, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan semula yakni 66,66%.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja diuraikan dalam tabel berikut.

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	78.636.583.475	68.969.629.724	87,71	100
	1. Penyelenggara an Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),	85.444.000	60.372.000	70,66	70



No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				
2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (DAU & DAK)	78.551.139.475	68.909.257.724	87,73	100

Sasaran XIII : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk menilai kapasitas Pemberdayaan Kelompok masyarakat adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini menjadi indikator utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Capaian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Capaian IDM terhadap Target Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata IDM	0,6725	0,7004	104,15%

IDM merupakan komposit dari nilai indeks ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi



(IKL). Untuk dapat meningkatkan nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu ditingkatkan nilai semua aspek pada IKS, IKE dan IKL.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IDM pada masing-masing komponen yang masih rendah pada aspek ketahanan Ekonomi rata-rata 0,6019 Sedangkan pada aspek ketahanan Sosial dan ketahanan Ekologi masing-masing 0,7545 dan 0,7449. Adapun faktor yang menjadi penunjang pencapaian IDM, sebagai berikut :

1. Pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menggunakan IDM sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kegiatan dalam APBDes.
2. Adanya dukungan program lintas sektor pada SKPD terkait seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sarana pendidikan, kesehatan maupun pusat ekonomi masyarakat, Perbaikan kualitas lingkungan perdesaan dan pemetaan rawan potensi bencana alam.

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan rangka untuk meningkatkan nilai pada aspek-aspek penyusun nilai IDM diperlukan sinergitas program lintas sektor, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Namun Pada Dinas PMD sendiri sebagai leading sector utama yang bertanggungjawab dalam pencapaian nilai IDM, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan upaya peningkatan nilai IDM yaitu Program peningkatan Kerja sama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator ukuran keberhasilan Program peningkatan Kerja sama Desa adalah Persentase Badan Usaha Milik Desa yang



Berkembang dan indikator keberhasilan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Persentase Status Desa Maju.

Salah satu kegiatan dari Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LKD adalah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 1.627 LKD terdiri atas jenis LKD yaitu : 148 LPM Desa/Kel, 148 PKK Desa/Kel, 1.030 RT/RK, 296 Posyandu serta 5 Lembaga Adat.

Pada Program peningkatan Kerja sama Desa untuk mengukur keberhasilan program dengan indikator persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Upaya pembentukan BUMDes melalui fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilaksanakan sehingga pada tahun 2021 ini semua Desa sudah memiliki BUMDesa. Upaya selanjutnya yaitu membina BUMDes yang sudah terbentuk tersebut sehingga tetap eksis dan berkembang.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari tahun



2017 hingga tahun 2021 terdapat 42 BUMDes yang memenuhi kriteria sebagai BUMDes dengan klasifikasi berkembang.

Sasaran XIV : Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender Dan Perlindungan Terhadap Anak

Indikator untuk menilai Pemberdayaan responsive gender dan Perlindungan terhadap anak dimuat dalam tabel di bawah ini, beserta target dan capaiannya di tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,23	99,97
		Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Usia <18 Tahun	21,55	23,05	93,49%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu merupakan salah satu tingkat ukuran keberhasilan capaian pembangunan (sama dengan IPM) tetapi sudah mengakomodasi masalah gender yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diperoleh merupakan hasil Survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 sebesar 89,23 sehingga capaian dengan target pada tahun 2021 sebesar 99,97.

Capaian realisasi kinerja untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 dan tahun 2021 sama, yaitu sebesar 99,98% naik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019



yang sebesar 99,88%. Akan tetapi secara realisasi kinerja terdapat kenaikan Indeks

Pembangunan Gender (IPG) sebesar 0,02 antara tahun 2021 yang sebesar 89,23 dengan tahun 2020 yang sebesar 89,21. Sedangkan capaian realisasi kinerja untuk Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Usia <18 Tahun tahun 2021 lebih rendah 0,61% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 94,1%. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan akan berubah capaiannya dikarenakan realisasi tahun 2021 belum keluar dari Susenas BPS. Untuk sementara dipakai realisasi tahun 2020 yang sebesar 23,05.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan AgamaKandangan dengan PUSPAGA Rakat Mufakat Dinas PPKBPPPA Kab. HSS. Perjanjian Kerjasama ini tentang Layanan Konseling pada PUSPAGA sebagai Syarat Pengajuan Sidang Dispensasi Kawin untuk Pernikahan Usia Anak.
2. Dinas PPKBPPPA Kab. HSS dan Pengadilan Agama Negara melaksanakan kerjasama (MoU) “PALING KOMPPAK” (Pelayanan Konseling sebagai Rekomendasi Terhadap Pencegahan Pernikahan Anak) dengan tujuan pelayanan konseling yang diberikan adalah sebagai syarat pengajuan sidang dispensasi kawin untuk pernikahan usia anak atau usia yang belum berumur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, bahwa



Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

3. PUSPAGA Rakat Mufakat Kab. HSS melaksanakan konseling calon penganten (caten). Dimana pada konseling tersebut calon penganten (caten) diberikan pengetahuan atau pembekalan tentang kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan dibawah 20 tahun, dampak menikah usia anak/muda, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) di Kab.HSS yang bekerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Kabid KHPK Dinas PPPA Prov. Kalsel) Ir.Titik Haryanti, MP, Wakil Ketua Pokja I TP-PKK Prov. Kalsel Hairani, S.AP, Sekretaris TP-PKK Kab. HSS Hj. Murziah, dan SKPD terkait yang berhubungan dengan peningkatan kualitas keluarga di Kab.HSS. Tujuan Rakor ini supaya dinas terkait melakukan pembinaan dan memberikan bantuan sesuai dengan fungsi dan bidangnya. Tahun 2021 ini desa yang terpilih PK2D adalah Desa Badaun

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh 5 program yaitu:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan,
- 2) Program Peningkatan Kualitas Keluarga,
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak dan
- 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2021)	CAPAIAN
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3,74%	3,74%	100%
1.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37 institusi	37 institusi	100%
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	37 institusi	37 institusi	100%
2.	Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	100%
2.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2.1.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100%
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	76 Indeks	90 Indeks	118,42%
3.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 desa	1 desa	100%
3.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
3.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 lembaga	3 lembaga	100%
3.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205 orang	205 orang	100%



4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	100 %	100%
4.1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6 institusi	6 institusi	100%
4.1.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	108 buah	108 buah	100%
4.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 desa	2 desa	100%
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	100 %	100%	100%
5.1	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 layanan	6 layanan	100%
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	3 bulan	100%
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Buah PATBM	2 Buah PATBM	100%

Sasaran XV : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini diukur dengan indikator seperti dalam tabel berikut beserta capaiannya di tahun 2021.

No	Sasaran di RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	Persen	46,54%	50,39%	108,27%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	68,41	67,57	98,77



Indikator Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar 52,29% telah melebihi dari target sebesar 46,54% sehingga capaian kinerja tahun 2021 mencapai 112,35%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan adalah :

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun.
- Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan demi meningkatkan Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021.
- Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- Telah dilaksanakannya rapat evaluasi setiap triwulan pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan social media yang melibatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk peningkatan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait



penyediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 sehingga Target Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas dapat terpenuhi.

- Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembuatan/peningkatan PSU baik di Perumahan maupun Kawasan Permukiman seperti pemenuhan kelengkapan dokumen usulan kegiatan terkait legalitas lahan, proses penyerahan aset dan berkas/ dokumen lainnya yang diperlukan.
- Adanya sinergitas program/ kegiatan yang telah direncanakan dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan, SKPD lain, Pemerintah Provinsi Kalsel maupun Program- Program kegiatan yang dibiayai oleh APBN berkaitan dengan Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja program/kegiatan/ Subkegiatan 2021	Realisasi kinerja program/kegiatan/ Subkegiatan 2021	Capaian 2021
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang berkualitas	%	39,24	43,04	109,68
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	11,63	13,95	119,95
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga pra sejahtera	Unit	9916	9950	100,34
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU (kawasan)	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Kawasan	3	4	133,33



2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang berkualitas	%	53,85	61,54	114,29
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	%	53,85	61,54	114,29
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memanjang Fungsi Hunian	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan	Unit	125	125	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Perumahan yang berkualitas	%	53,85	61,54	114,29
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Perumahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi pertanahan	Perumahan	14	16	114,29
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Perumahan yang memiliki site yang telah di sahkan	Perumahan	2	4	200,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100,00	100,00	100,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persen	100	100	100,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program	Kegiatan	20	20	100,00

Sumber Data Disperakph tahun 2021

Sasaran XVI : Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator untuk menilai sasaran ini ada dua. Pertama predikat/nilai akip Pemkab Hulu Sungai Selatan dengan target A (80,12). Sampai dengan laporan ini disusun hasil evaluasi Kementerian PAN RB belum rilis. Indikator yang kedua adalah Inovasi yang lolos seleksi nasional dengan target 2 inovasi. Capaian tahun 2021 hanya 1 inovasi yang lolos nasional.



Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target nilai AKIP A adalah, 1) meningkatkan fasilitasi baik tatap muka, maupun lewat media, kepada perangkat daerah dalam menetapkan indikator kinerja, menyusun cascading dan crosscutting serta menyusun laporan kinerja sesuai standar. 2) mengembangkan inovasi e-report untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah bersinergi dengan Bappelitbangda, BPKPD, Inspektorat Daerah dan BKPSDM.

Melakukan pendampingan yang intensif dengan narasumber dari kementerian PANRB, untuk menilai implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari awal di tahap perencanaan, penyusunan cascading dan crosscutting, hingga evaluasi.

Untuk meningkatkan fasilitasi inovasi perangkat daerah dilakukan dengan pendampingan yang intensif untuk menggali, menjangkau dan mengembangkan inovasi. Bersinergi dengan Dinas Kominfo dan Bappelitbangda.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas



pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur



berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan serta terdapat Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama) dan dari APBD (Dana Daerah Urusan Bersama). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009.

Berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan dan urusan bersama.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Target Kinerja

Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan dasar pelaksanaan penugasan (TP) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2021 Satker 018.08.159114 pada Program Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu Rp. 3.103.560.000,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang diterima

NO	PEKERJAAN	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
1	Embung Pertanian	1	unit
2	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	11	unit
3	Irigasi Perpompaan	2	unit
4	Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	11	Kecamatan
5	Optimasi Lahan	200	Ha

3.1.2. Realisasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Tahun 2021 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana program dan kegiatan di atas dapat dirincikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2021 Satker 018.08.159114	Program Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Penerima bantuan parasarana dan sarana : Pembangunan Embung Pertanian	Desa Panjampang Bahagia Kec. Simpur	Dinas Pertanian Kab. HSS	120.000.000	120.000.000	100	1 unit	100	
			RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Kec. Sungai Raya, Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsung		825.000.000	825.000.000	100	11 unit	100	



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Irigasi Perpompaan	Kec. Daha Barat		274.000.000	273.100.000	99,7	2 unit	100	
			Optimasi Lahan -perbaikan infrastruktur -pengolahan lahan	Kec. Daha Barat dan Kandangan		941.000.000	941.000.000	100	200 Ha	100	
			Rekomendasi Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian	11 Kecamatan		598.000.000	499.381.676	84	11 Kecamatan	100	



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Target Kinerja

Tugas Pembantuan yang diterima dari Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kawasan Padi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya menerima barang dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat penerima. Target dari penerimaan barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Target Kinerja Penerimaan Tugas Pembantuan
dari Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PEKERJAAN	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
1	Budidaya Rawa	2.188	Ha
2	IP 400	30	Ha
3	P3BTP (Korporasi)	50	Ha
4	Padi Inbrida Sawah	5.245	Ha
5	Padi Khusus	100	Ha



3.2.2. Realisasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Tahun 2021 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana program dan kegiatan di atas dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Penerimaan Tugas Pembantuan Dari Provinsi Kalimantan Selatan

No	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pertanian dan Tanaman Pangan	Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida Kawasan Padi Belanja Barang Bantuan Langsung Untuk Diserahkan Kepada :		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel						



LPPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Budidaya Rawa	Kec. Daha Barat, Daha Utara, Daha Selatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provisi Kalimantan Selatan		2.118 Ha	100	2.188 Ha	100	1 Ha menerima bantuan 25 kg Benih Padi
			IP 400	Kec. Padang Batung			30 Ha	100	30 Ha	100	
			P3BTP (Korporasi)	Kec. Kandangan, Angkinang, Sungai Raya			50 Ha	100	50 Ha	100	
			Padi Inbrida Sawah	Kec. Angkinang, Daha Barat, Telaga Langsung, Padang Batung, Simpur, Kalumpang, Kandangan, Sungai Raya			5.245 Ha	100	5.245 Ha	100	
			Padi Khusus	Kec. Loksado			100 Ha	100	100 Ha	100	



3.3. Permasalahan dan Kendala

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya dilapangan. Permasalahan yang lebih krusial yaitu beberapa DIPA turunnya terlambat. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak Target/Sasaran yang belum bisa dicapai.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat menurunkan DIPA lebih awal, serta dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas 6 Jenis Pelayanan Dasar (6 SPM) sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Bidang Urusan Sosial.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM-nya) oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 meliputi :

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar
3. Pemenuhan SPM urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah



1.1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2.1 Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar urusan Pendidikan, meliputi :

A. Standar Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa

1). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta Didik per semester	100	100



NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester	100	100

2). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi :

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester	100	100

3). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru	100	100



NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
	per Peserta Didik per Semester		

4) Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester	100	100

B. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi :

1). Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, meliputi :

a. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, meliputi :

NO	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Tenaga pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	100	100

b. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, meliputi :



NO	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	100	100
2	Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	100	100

c. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan PAUD, meliputi:

NO	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	100	100

2). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, meliputi :

a. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD



NO	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SD meliputi:

NO	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100
3	Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100

c. Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SD, meliputi:

NO	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100

3). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

a. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, meliputi :



NO	Uraian	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SMP meliputi:

NO	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100
3	Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100

c. Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SMP, meliputi:

NO	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100

4).Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

a. Kualitas Tenaga Pendidik (tutor) Kesetaraan, meliputi :



NO	Uraian	Target penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	100

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan meliputi:

NO	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100

c. Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan meliputi:

NO	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100

2.3 Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan telah ditentukan (lihat tabel 2.1) yaitu :



Tabel 4.1

Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian SPM
1	2	3	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar (SD)	Jumlah Warga Negara Usia 7-13 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%
	Pendidikan Dasar (SMP)	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82,09%

4.1.3 Realisasi

1 Mutu Pelayanan Dasar, meliputi :

A. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- 1). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :



No	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)		Realisasi Penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta Didik per semester	100	100	100	100
2	1 (satu set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	100	100	100

2). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi:

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)		Realisasi Penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	100	100	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	100	100	100

3). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, meliputi:



NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)		Realisasi Penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	100	100	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	100	100	100

4). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi:

NO	Jenis Barang dan Volume	Target penerima SPM (%)		Realisasi Penerima SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	100	100	100	100
2	1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	100	100	100

B. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan



1). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

a. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, meliputi :

NO	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Tenaga pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	100	100	48.48	48.48

b. Kualitas Tenaga Pendidik PAUD, meliputi :

NO	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	100	100	70.20	70.20
2	Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	100	100	11.13	11.13

c. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan PAUD, meliputi :



No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah	100	100	38.67	38.67

2). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar , terdiri

atas :

a. Kualitas Tenaga Pendidik SD, meliputi :

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat	100	100	39.75	39.75

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SD, meliputi :



No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjan (S1)	100	100	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100
3	Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	98.87	98.87

c. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Tenaga Penunjang Lainnya Sekolah Dasar, meliputi :

No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100	100	100

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

a. Kualitas Tenaga Pendidik SMP, meliputi :

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat	100	100	100	100



No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
	(DIV) atau Sarjana (S1)				
2	Memiliki sertifikat Pendidik	100	100	53.01	53.01

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SMP, meliputi :

No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100	100	100
2	Memiliki sertifikat pendidik	100	100	83.78	83.78
3	Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	83.78	83.78

c. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Tenaga Penunjang Lainnya Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100	85.85	85.85

4). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan, terdiri atas :



a. Kualitas Tenaga Pendidik (tutor) kesetaraan, meliputi:

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100	89.01	89.01

b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Realisasi Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (DIV) atau Sarjana (S1)	100	100	100	100

c. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Kualitas Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)		Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	100	100	100



2. Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Pencapaian SPM urusan pendidikan anak usia dini oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini
Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Anak pada Jenjang Usia PAUD		Jumlah	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun	%
		Kewenangan Dinas Pendidikan	Kewenangan Kemenag			
		PAUD	RA			
1	Angkinang	596	81	677	677	100
2	Daha Barat	222	21	243	243	100
3	Daha Selatan	734	369	1103	1103	100
4	Daha Utara	945	412	1357	1357	100
5	Kalumpang	300	0	300	300	100
6	Kandangan	1917	269	2186	2186	100
7	Loksado	431	0	431	431	100
8	Padang Batung	767	88	855	855	100
9	Simpur	549	203	752	752	100
10	Sungai Raya	406	39	445	445	100
11	Telaga Langsat	443	0	443	443	100
Jumlah		5.879	1.482	7.361	7.361	100

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun Yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun}} \times 100$$

$$= \frac{7.361}{7.361} \times 100$$

$$= 100 \%$$



Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, pencapaian pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 100%.

B. Pendidikan Dasar (SD)

Pencapaian SPM pendidikan dasar pada sekolah dasar (SD) oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Jumlah anak pada jenjang usia 7-12 yang sudah tamat atau sudah belajar					Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	%
No	Kecamatan	SD	MI	Jumlah		
1.	Angkinang	1.353	541	1894	1894	100
2	Daha Barat	1.052		1052	1052	100
3	Daha Selatan	2.934	1105	4039	4039	100
4	Daha Utara	2.042	1264	3306	3306	100
5	Kalumpang	492	106	598	598	100
6	Kandangan	4.164	1484	5648	5648	100
7	Loksado	1.023		1023	1023	100
8	Padang Batung	1.560	461	2021	2021	100
9	Simpur	1.035	1318	2353	2353	100
10	Sungai Raya	1.153	145	1298	1298	100
11	Telaga Langsat	979	103	1082	1082	100
Jumlah		17.787	6527	24.314	24.314	100

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Dasar dengan cara:

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun Yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun}} \times 100$$

$$= \frac{24.314}{24.314} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, pencapaian pemenuhan SPM pada Pendidikan Dasar pada Sekolah dasar (SD) Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 100%.



C. Pendidikan Dasar (SMP)

Pencapaian SPM Urusan pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama (SMP) oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Dasar (SMP)
Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Jumlah anak pada jenjang usia 7-12 yang sudah tamat atau sudah belajar						Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	%
No	Kecamatan	SMP	MTs	Pondok Pesantren	Jumlah		
1	Angkinang	307	584	0	891	891	100
2	Daha Barat	246	62	0	308	308	100
3	Daha Selatan	478	605	817	1900	1900	100
4	Daha Utara	248	846	939	2033	2033	100
5	Kalumpang	314	171	0	485	485	100
6	Kandangan	1665	940	268	2873	2873	100
7	Loksado	301	99	0	400	400	100
8	Padang Batung	750	326	51	1127	1127	100
9	Simpur	70	492	0	562	562	100
10	Sungai Raya	230	210	0	440	440	100
11	Telaga Langsat	826	199	0	1025	1025	100
Jumlah		5.435	4.534	2.075	12.044	12.044	100

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 - 15 tahun}} \times 100$$

$$= \frac{12.044}{12.044} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, pencapaian pemenuhan SPM pada Pendidikan Dasar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 100%.



D. Pendidikan Kesetaraan

Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Kesetaraan
Oleh Pemerintah Kab. HSS Tahun 2021

No	Kecamatan	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun	%
1	Angkinang	186	195	95,38
2	Daha Barat	156	172	90,69
3	Daha Selatan	434	670	64,77
4	Daha Utara	379	552	68,65
5	Kalumpang	39	45	86,66
6	Kandangan	395	471	83,86
7	Loksado	79	118	66,94
8	Padang Batung	126	153	82,35
9	Simpur	123	157	78,34
10	Sungai Raya	84	103	81,55
11	Telaga Langsat	74	96	77,08
Jumlah		2296	2732	84,04

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun}} \times 100$$

$$= \frac{2.296}{2.732} \times 100$$

$$= 84,04 \%$$

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, pencapaian pemenuhan SPM pada Pendidikan Kesetaraan Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 79,61 %.

Dengan demikian, Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.6
Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Capaian	Realisasi Capaian SPM
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	$\frac{7.361}{7.361} \times 100$	100%
2	Pendidikan Dasar (SD)	Jumlah Warga Negara Usia 7-13 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	$\frac{24.314}{24.314} \times 100$	100%
	Pendidikan Dasar (SMP)	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	$\frac{12.044}{12.044} \times 100$	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{2.296}{2.732} \times 100$	84,04%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini terdapat pada program Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 36.086.522.925,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 30.743.191.784,00** dengan capaian sebesar **85,17%**.



Tabel 4.7

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
	Program Pendidikan Sekolah Dasar		Bidang SD
1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	305.150.000	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.136.810.000	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.763.118.000	
4	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	195.700.000	
5	Pengadaan Meubeler Sekolah	200.900.000	
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.402.120.000	
7	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	531.288.000	
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.639.920.000	
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	749.971.350	
10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	17.767.015.298	
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Bidang SMP
1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	249.905.000	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
2	Pembangunan Asrama Sekolah	234.850.000	
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	862.800.000	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.071.841.550	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	99.950.000	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	86.900.000	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	357.865.450	
8	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	707.000.000	
9	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	256.035.950	
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.560.096.000	
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	182.773.500	
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.795.000	
13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.987.583.277	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Bidang PAUD & PNF
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	156.050.000	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	408.358.000	
3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	40.000.000	
4	Pengadaan Meubeler PAUD	87.740.000	
5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	290.000.000	
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.712.880.000	
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	320.650.000	
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	172.000.000	
9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.801.200.000	
	Program Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan	197.000.000	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	1.440.375.000	
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	300.772.900	
4	Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan	4.046.500.000	
TOTAL ANGGARAN		36.086.522.925	

Untuk Program Pengelolaan Pendidikan Untuk Seksi Sarana dan Prasarana SD, SMP, PAUD & PNF seluruhnya sudah hampir mencapai 100% dan fisiknya semua sudah 100% terlaksana. Adapun realisasi yang tidak mencapai 100% dikarenakan memang ada sisa anggaran sisa lelang/tender. Untuk Seksi Minat Bakat SD Sudah terlaksana seluruhnya, sedangkan untuk SMP ada sebagian lomba yang tidak dapat terlaksana karena sikon mengingat masih pandemic covid 19. Sama halnya dengan beberapa kegiatan di bidang PNF, ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena terhalang pandemic covid 19 seperti kegiatan tendik pnf dan proses belajar PNF.

Untuk Seksi Tendik SD ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu kegiatan seleksi kepala sekolah & pengawas sekolah ini karena terbentur dengan aturan baru yang mengharuskan seleksinya melalui guru & kepala sekolah penggerak, sedangkan di kab. HSS belum ada yang memenuhi syarat tersebut, sedangkan untuk kegiatan BOS SMP kegiatannya sebenarnya sudah terlaksana, namun untuk hasil realisasinya masih belum semua bisa di tampilkan karena menunggu update simda. Dari hasil realisasi keseluruhan itu belum semuanya dapat ditampilkan karena masih



ada data yang belum update di simda, sehingga hasil realisasi program pengelolaan pendidikan masih belum memenuhi target.

4.1.5. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan :

Tabel 4.8

Personil Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Tidak termasuk Guru)										
Struktural					Fungsional			Jumlah		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana						
-	1	5	16	30	43			95		
Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)										
No	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	Total
1	Kec. Kandungan	25	22	4	4	2	7	139	50	349
2	Kec. Daha Selatan	13	9	0	2	0	0	76	26	144
3	Kec. Padang Batung	17	8	0	2	1	0	85	24	137
4	Kec. Daha Utara	17	10	0	1	0	0	53	19	114
5	Kec. Simpur	16	6	1	0	0	0	62	7	105
6	Kec. Angkinang	13	8	0	0	2	0	59	10	101
7	Kec. Sungai Raya	11	7	0	1	0	0	64	16	100
8	Kec. Telaga Langsat	9	7	0	0	1	0	51	13	83
9	Kec. Loksado	4	12	0	0	1	0	20	11	56
10	Kec. Kalumpang	4	6	0	0	0	0	26	5	41
11	Kec. Daha Barat	3	8	0	0	0	0	9	6	31
TOTAL		132	103	5	10	7	7	644	187	1.261



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Belum terkoneksi data anak usia sekolah antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. HSS sehingga data yang ada hanya untuk SD dan SMP, untuk data siswa MI dan MTs menunggu dari Kementerian Agama Kab. HSS.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan (S1).
3. Tidak meratanya penyebaran guru dimana penumpukan guru di perkotaan dan guru di sekolah pinggiran masih banyak yang kurang
4. Masih ada sekolah yang kekurangan guru bidang studi, sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan guru sehingga menyebabkan terhambatnya sertifikasi.
5. Banyaknya guru yang memasuki usia pensiun dan mutasi sehingga menyebabkan kekurangan guru.
6. Kekurangan guru tersebut dapat tertutupi dengan adanya guru tenaga honor akan tetapi kadang kualifikasi guru yang mengisi tersebut tidak sesuai dengan mapel yang diampu.
7. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi
8. Faktor penghambat yang menyebabkan angka persentase PAUD yang terakreditasi masih belum memenuhi target adalah karena terbatasnya kouta dari Badan Akreditasi Nasional untuk mengikuti akreditasi lembaga PAUD.
9. Belum tercapainya target persentase partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD



▪ **Solusi**

1. Harus ada MoU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kab. HSS untuk saling bersinergi masalah data peserta didik.
2. Agar segera menambah SDM yang memiliki kualifikasi dan memberikan surat edaran tentang penerimaan Pendidik PAUD minimal S1 dan melakukan diklat dasar bagi yang belum S1.
3. Perlunya pemetaan guru melalui penyegaran atau roling.
4. Untuk menutupi kekurangan guru di daerah perkotaan diatasi dengan perputaran, pengangkatan guru PPPK dan atau regrouping sekolah yang memungkinkan dari segi jarak, keadaan bangunan sekolah dan jumlah siswa.
5. Harus ada guru pengganti untuk menggantikan guru yang telah pensiun yaitu dengan cara mengusulkan PPPK pada tahun berikutnya.
6. Perlunya pemetaan terhadap guru untuk menutupi kekurangan guru yang ada.
7. Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk memperoleh nilai akreditasi adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (workshop dan pendampingan)
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNF dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan memberikan pembinaan kepada lembaga secara terus-menerus yang bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka persentase PAUD formal yang terakreditasi.
9. Tenaga kependidikan yang kurang dari SMA diminta untuk sekolah Paket kesetaraan (Paket C).



10. Melakukan pembenahan pada segi sarana dan prasarana baik rehabilitasi, pembangunan maupun pengadaan alat peraga.

4.1.2 Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Dan



- 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 4.9

Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendasarkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

2. Mutu Layanan Dasar

Mutu layanan dasar standar pelayanan minimal urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Kuantitas : Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) ; <ol style="list-style-type: none"> a. Satu kali pada trimester pertama. b. Satu kali pada trimester kedua. c. Dua kali pada trimester ketiga 2) Standar Kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi: Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Lingkar lengan Atas (LILA), Pengukuran Tinggi Fundus Uteri, Penentuan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin, Pemberian Imunisasi sesuai dengan status



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
		Imunisasi, Pemberian Tablet Tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksanaan/Penanganan Kasus dan Temu wicara (konseling)
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan 1) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar : - Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan - Tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang 2) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal : 1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. -Standar kualitas : 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) : ▪ Pemotongan dan perawatan tali pusat ▪ Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ▪ Injeksi vitamin K1 ▪ Pemberian salep/tetes mata antibiotic ▪ Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) : ▪ Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif ▪ Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM ▪ Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita - Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan - menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
		<p>a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun dan Pemberian imunisasi dasar lengkap.</p> <p>b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun dan Pemberian Imunisasi Lanjutan.</p> <p>c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun dan Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</p> <p>d) Edukasi dan Informasi -Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</p>
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Skrining kesehatan.2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. <p>Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah (putus sekolah)</p>
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif - Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut - Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a). Pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas layanan kesehatan, edukasi Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan bila di perlukan b). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c). Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d). Melakukan rujukan jika diperlukan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan terduga TB -Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	-Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining - Kelompok orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu : Ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, Penjaja Seks, LSL, Transgender/Waria, pengguna Napza Suntik dan Warga binanaan Pemasarakatan

3. Target Pencapaian SPM

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar. Berikut adalah tabel mengenai SPM dengan jenis layanan dasar.

Tabel 4.11

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan	Target (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun tahun yang sama}} \times 100$	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan	Target (%)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Jumlah balita usis 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{balita usia 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu 1 tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu yang sama}} \times 100$	100
6	Pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun dalam kurun waktu yang sama}} \times 100$	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga Negara berusia 60 tahun atau lebih dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
8	Pelayanan kesehatan hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan	Target (%)
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia > 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	100

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 yang mengacu pada



Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Capaian	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	$\frac{3.444}{3.618} \times 100$	95,19 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{3.669}{3.714} \times 100$	98,79 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{3.633}{3.692} \times 100$	98,40 %
4	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{13.735}{14.656} \times 100$	93,72 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	$\frac{36.239}{36.445} \times 100$	99,43 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	$\frac{121.913}{144.921} \times 100$	84,12 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	$\frac{25.408}{25.694} \times 100$	98,89 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{53.752}{69.009} \times 100$	77,89 %
9	Pelayanan kesehatan penderita	Persentase penyandang DM yang mendapatkan	$\frac{4.962}{4.962} \times 100$	100 %



No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perhitungan Capaian	Capaian
	diabetes melitus (DM)	pelayanan kesehatan sesuai standar		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{561}{561} \times 100$	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	$\frac{2.998}{3.888} \times 100$	77,11 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	$\frac{4.128}{4.428} \times 100$	93,22 %

4.2.5 Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Adapun total anggaran yang disediakan untuk pencapaian target-target SPM di tahun 2021 sebesar **Rp. 4.773.534.748,00,-**

Hasil realisasi anggaran untuk pelaksanaan pencapaian terhadap 12 (dua belas) indikator SPM kesehatan dari seluruh kegiatan ditahun 2021 adalah sebesar **Rp. 3.875.784.665,00,-** atau **81.19 %** dari total anggaran **Rp. 4.773.534.748,00,-** dan termasuk kategori pencapaian kinerja baik.



Tabel 4.13

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator SPM	Anggaran		Capaian Kinerja
		Alokasi	Realisasi	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	929.201.438	760.949.615	81.89%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	378.302.500	318.828.400	84.28%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	44.020.500	34.075.500	77.41%
4	Pelayanan kesehatan balita	1.252.694.750	1.113.266.100	88.87%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	645.247.050	478.923.550	74,22%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	519.119.900	316.710.000	61.01%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	666.236.600	621.327.000	93.26%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	48.730.000	36.567.500	75.04%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	50.000.000	41.020.000	82.04%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	94.135.510	52.610.000	55.89%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	91.235.000	60.559.000	66.38%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	54.611.500	40.948.000	74.98%



No	Indikator SPM	Anggaran		Capaian Kinerja
		Alokasi	Realisasi	
	TOTAL	4.773.534.748	3.875.784.665	81.19%

4.2.4 Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan :

Tabel 4.14

Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1	4	48	435	57	108	19	-	672
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
2		138		502		29		671
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	4	55	60	613		673	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

1. Semua ibu hamil sudah diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan tapi untuk kunjungan sampai ke K4 terkendala karena masih adanya ibu hamil yang mengalami keguguran dan melahirkan di usia 7 bulan/prematur



sehingga untuk capaian pelayanan antenatal care sesuai standar tidak mencapai target

2. Masih adanya persalinan dengan bidan kampung di daerah sulit seperti di kecamatan loksado
3. Adanya kematian bayi Usia 0 -28 hari sebanyak 36 bayi dan ada BBLR yang tidak bisa diberikan Hb0 sebanyak 23 orang dikarenakan BB nya di bawah 2000 gr
4. Kegiatan posyandu pada masa pandemi tidak maksimal berjalan sehingga balita tidak datang untuk bertimbang
5. pada masa pandemi ada sebagian sekolah tidak melakukan PTM sehingga ada 0.57% anak sekolah tidak mendapatkan skrining pelayanan Kesehatan
6. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining FR PTM masih rendah
7. Partisipasi Masyarakat berkurang untuk datang ke Fasilitas Kesehatan di sebabkan Pandemi Covid-19
8. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait penyakit Menular dan Tidak Menular.

▪ **Solusi**

1. Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan ibu hamil resti agar tidak terjadi persalinan premature
2. Kemitraan dan komintmen dengan kepala desa pada saat lokmin lintas sektor dan kemitraan dengan Bidan Kampung.
3. Pendampingan /kunjungan rumah pada bayi resti.
4. Melakukan sweeping ke rumah balita yang tidak datang ke posyandu
5. Berkoordinasi dengan pihak sekolah agar bagi peserta didik yang tidak datang untuk melakukan janji temu



- dengan pihak puskesmas agar dilakukan skrining Kesehatan.
6. Melakukan sosialisasi dan KIE terkait pentingnya pemeriksaan FR PTM di Posbindu
 7. Untuk memenuhi target kinerja di tengah pandemi covid-19 ini maka dilakukan kegiatan kunjungan rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan
 8. Melakukan KIE terkait Penyakit menular dan Tidak Menular.

4.3.1 Urusan Pekerjaan Umum

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam Permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Target pencapaian SPM Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait sektor air limbah domestik adalah :

- 1) Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman.
- 2) Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun 2021 sebesar 100%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2021 terkait Sektor Air Limbah domestik adalah universal akses air limbah domestik sebesar 100% yang berarti bahwa



seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik baik berupa on site maupun off site sistem.

Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga/KK yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik (SPALD) Dasar	100%	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

a. Penyediaan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari.

Pencapaian SPM Air Minum Tahun Anggaran 2021 dengan indikatornya Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah 92,77 %. Capaian ini diperoleh dari jumlah akses air minum Jaringan Perpipaan sebanyak 36.453 KK. Jaringan Perpipaan disini termasuk SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi dari PDAM dan SPAM Perdesaan baik berupa Instalasi Sumur Bor Dalam, Instalasi Pengolahan Air Mini dan Penangkap Mata Air (Broncaptering). Sedangkan untuk rumah tangga yang belum terlayani SPAM Jaringan perpipaan masih ada sekitar 4.073 KK. Total rumah



tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2021 adalah sebanyak 56.296 Kepala Keluarga. Selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.16
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan
Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2021

No	Kecamatan	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit rumah)	(Unit rumah)
1	Angkinang	5225	4315	892	18
2	Daha Barat	1359	900	252	207
3	Daha Selatan	8393	6355	1516	522
4	Daha Utara	5939	3611	1552	776
5	Kalumpang	1969	974	743	252
6	Kandangan	13573	8690	3988	895
7	Loksado	2313	917	1161	235
8	Padang Batung	5883	3263	2327	293
9	Simpur	4134	2886	1049	199
10	Sungai Raya	4793	3073	1611	109
11	Telaga Langsat	2715	1469	679	567
TOTAL		56.296	36.453	15.770	4.073
Persentase Layanan			64,75	28,01	7,23
Capaian SPM			92,77%		

Keterangan :

JP adalah Jaringan Perpipaan

BJP adalah Bukan Jaringan Perpipaan

b. Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik

Pencapaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk SPM Air Limbah yaitu Penyediaan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2021 adalah sebesar 83,63 %. Total rumah tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2021 adalah sebanyak 56.296 kepala keluarga, dengan asumsi 1 KK sama dengan 4



Jiwa. Sebanyak 47.087 rumah tangga (KK) telah mendapatkan pelayanan air limbah domestik dasar baik berupa cubluk dan atau tangki septik. Sementara itu masih terdapat sekitar 1.564 rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah sehingga terindikasi masih melakukan BABS. Ada juga rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah akan tetapi selama itu mereka masih dapat menggunakan sarana air limbah milik keluarga atau tetangga ataupun sarana air limbah umum (WC Umum) maka terhitung telah mendapatkan akses air limbah sharing sebanyak 5.327 kepala keluarga.



Tabel 4.17
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021

No	Kecamatan	Target				Realisasi							
		Total	Akses Dasar	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Tanpa Akses	JSP	JSSP	Sharing	Akses Dasar (JSP + JSSP + Sharing)	Akses Layak (JSP+JSSP)	Akses Aman SPAL-S (JSP)	Akses Aman SPAL-T
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)
1	Simpur	4134	3786	3754	75	0	3786	323	25	4134	4109	3786	75
2	Sungai Raya	4793	4072	4070	329	51	4357	382	3	4742	4739	4357	329
3	Angkinang	5225	3712	3712	127	253	4263	709	0	4972	4972	4263	127
4	Kalumpang	1969	1013	1013	0	127	1511	331	0	1842	1842	1511	0
5	Kandangan	13573	10645	10638	583	1662	11442	408	61	11911	11850	11442	583
6	Padang Batung	5883	4274	4006	75	425	4741	602	115	5458	5343	4741	75
7	Telaga Langsung	2715	1982	1982	0	158	2139	392	26	2557	2531	2139	0
8	Loksado	2313	598	598	0	655	1541	3	114	1658	1544	1541	0
9	Daha Selatan	8393	2276	2116	75	2952	4017	1302	122	5441	5319	4017	75
10	Daha Utara	5939	1869	1869	300	2016	3002	875	46	3923	3877	3002	300
11	Daha Barat	1359	53	53	0	910	449	0	0	449	449	449	0
Total		56296	56296	56296	34280	33811	1564	6860	41248	5327	512	47087	46575
Persentase Layanan										83,64%	82,73%	73,27%	2,78%
Capaian SPM Akses Dasar										83,64%			



Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.18
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Perhitungan Capaian	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	$\frac{52.223}{56.296} \times 100$	92,77%
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	$\frac{47.807}{56.296} \times 100$	82,35%

4.2.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :



Tabel 4.19

Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	7.735.956.966	7.699.450.461	APBD Dan DAK
2	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		345.169.000	343.538.584	APBD
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		5.523.426.000	5.488.373.555	APBD Dan DAK
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		384.081.500	358.250.256	APBD
5	Pembangunan SANIMAS		1.000.000.000	1.000.000.000	APBN
6	Pembangunan MCK Pondok Pesantren		400.000.000	399.452.000	APBN

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.20
Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan

No.	Uraian	JUMLAH PEGAWAI/ORANG					PENDIDIKAN					
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	NON PNS	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PNS/Struktural Administrasi	3	26	9	-	-	1	1	14	6	13	3
2	PNS/Struktural Administrasi UPT	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
3	NON PNS	-	-	-	-	-	-	-	24	5	14	-
Jumlah		3	26	9	-	-	1	1	38	11	27	3

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Permasalahan Air Minum:

- Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dengan kepadatan penduduk masih kecil sehingga membutuhkan investasi besar jaringan perpipaan.
- Topografi pegunungan di kecamatan Loksado dan Padang Batung menyulitkan akses PDAM untuk masuk sehingga diperlukan investasi yang besar untuk memenuhi akses SPAM Jaringan Perpipaan PDAM di lokasi tersebut.
- Biaya bulanan PDAM bagi sebagian masyarakat masih menjadi faktor keengganan memasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum meski gratis.

Permasalahan Air Limbah :

- Topografi rawa pada tiga Kecamatan seperti Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan merupakan daerah rawa pasang surut cukup menyulitkan instalasi tangki septik pabrikan. Sementara itu tiga kecamatan ini memiliki



kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) tertinggi dibanding kecamatan lain.

2. *Mindset* dan *culture set* masyarakat yang pada umumnya masih belum bisa terlepas dari sungai sebagai pusat aktifitas rumah tangga seperti untuk keperluan minum, mandi sekaligus buang air.

▪ **Solusi**

1. Konsistensi dan sinergisitas pendanaan kegiatan dari APBD, DAK Sanitasi dan DAK Air Minum dan APBN Pamsimas dan Sanimas tetap menjadi solusi utama.
2. Sinkronisasi penanganan dan penentuan lokus dari berbagai sumber dana tersebut dan kerja sama antara Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dibawah koordinasi Bappelitbangda merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan angka SPM air Minum dan Air Limbah secara signifikan .
3. Pemicuan PHBS bersama Dinkes menjadi faktor penentu SPM air minum dan air limbah, serta dengan pemilihan lokasi dan kebutuhan yang lebih baik.

4.4.1 Urusan Perumahan Rakyat

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam



negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yan terkena relokasi program Pemerintahan Daerag Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah). Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan sebagai berikut:

Tabel 4.21

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh	100%	Setiap Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
	korban bencana kabupaten/kota	rumah layak huni		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	
				Realisasi	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas	100%	0	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	
				Realisasi	%
	Daerah kabupaten/kota	penyediaan rumah layak huni			

Rumusan penilaian capaian realisasi sebagaimana indikator yang telah ditetapkan adalah :

- a. Indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dihitung sebanyak 0 (nol) karena tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah dan tidak memerlukan relokasi akibat kejadian bencana, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 0 (nol) dibagi dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani sebanyak 0 (nol), jadi nilainya adalah tak terdefiniskan dan dilaporkan sebagai 100%.
- b. Indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dihitung sebanyak 0 (nol) karena tidak relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atau penguasaan tanah dan atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 0 (nol) dibagi dengan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria pelayanan sebanyak 0 (nol), jadi nilainya adalah tak terdefiniskan dan dilaporkan sebagai 100%.



Dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana, diperoleh data rumah tangga pada 5 (lima) desa di Kecamatan Loksado, yang dikategorikan sebagai rumah tangga pada daerah rawan bencana, dengan hasil data sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Desa Loksado | : jumlah 127 unit rumah. |
| 2. Desa Hulubanyu jumlah | : jumlah 152 unit rumah. |
| 3. Desa Tumingki | : jumlah 123 unit rumah. |
| 4. Desa Lok Lahung | : jumlah 39 unit rumah. |
| 5. Desa Haratai | : jumlah 91 unit rumah. |
| Jumlah terdata | : jumlah 532 unit rumah. |

4.4.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

Pada tahun anggaran 2021, melalui APBD telah disediakan alokasi anggaran sebesar **Rp. 78.750.000,00,-** pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan identifikasi ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana salah satu langkah awal penerapan SPM adalah dengan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana.

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23

Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	-	-	-	3	-	-	3
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		-		2		1		3
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	-	1	1	2	1		3	

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



▪ **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belum adanya penetapan suatu wilayah ataupun lokasi yang sebagai rawan bencana, meskipun terdapat data kejadian bencana dalam beberapa kurun waktu terakhir namun kejadiannya adalah secara parsial dan tidak terjadi pada lokasi atau kawasan dengan kategori tertentu sehingga belum ditetapkan sebagai suatu bencana daerah (kabupaten).

▪ **Solusi**

Solusi yang direncanakan dan mulai dilaksanakan adalah dengan menetapkan lokasi-lokasi sebagai daerah rawan bencana adalah pada daerah bantaran sungai yang dapat dikategorikan sebagai daerah rawan banjir serta longsor jika terjadi cuaca hujan dengan intensitas tinggi ataupun dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam pelaksanaan pendataannya, berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa masing-masing tempat untuk memperlancar pengambilan data dan membantu memberikan penjelasan kepada masing-masing warga.

4.5.1 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:



1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

4.5.1 Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan target Prioritas Nasional, karena berkaitan dengan hak warga negara yang paling minimal harus diterima oleh setiap warga Indonesia, sehingga wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warganya.

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mangacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.24

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%

Adapun rumus capaian Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25

Rumus Perhitungan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota pada tahun X}}{\text{Jumlah penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota pada Tahun X}} \times 100$

1.3 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.26

Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	$\frac{35}{35} \times 100$	100%	Karena tidak adanya kejadian kerusakan materil dan cedera fisik maka realisasi penerapan SPM dinyatakan terpenuhii sebesar 100%

1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :



Tabel 4.27

Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM Urusan	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah	10.000.000	2.800.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	860.351.009	782.070.385
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	143.400.000	127.800.000
		Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.500.000	13.950.000
		Sosialisasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	11.750.000	11.415.000



No	Jenis Pelayanan SPM Urusan	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Perbup	25.979.000	-
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	43.611.419	1.000.000
TOTAL ANGGARAN			1.114.591.428	909.035.385

1.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Satpol PP Kab. HSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.28

Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
2	3	42	1	-	12	3	-	63
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
5		35		20		3		63
Struktural					Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	3	5	9	45	9	63	



1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.29

Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda atau Perbup dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi	Mengupayakan pelaksanaan rutin kegiatan patrol untuk mengawasi apabila ada temuan pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani yang dilanggar dan penjagaan rutin tempat-tempat yang dianggap perlu dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Terus melakukan keterbukaan informasi mengenai kegiatan penegakan Perda Melalui media sosial
2	Belum semua personel mempunyai professional dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas	Memberikan bimbingan dan pemahaman kepada anggota melalui penyampaian materi mengenai Tupoksi Satpol PP dalam kegiatan Bintalsik	Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP.

4.5.2 Sub Urusan Kebakaran

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar



pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran.

Dalam perkembangannya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, K/L telah menetapkan masing-masing Peraturan Menteri tentang Standar Teknis penerapan SPM di daerah.

2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30

Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah 2020
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %

Adapun rumus capaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:



Tabel 4.31
Rumus Perhitungan Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran pada tahun X dalam waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran pada tahun X}} \times 100$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, teknis pernhitungan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran dilihat dari dua indicator, yaitu indicator utama layan SPM dan indicator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan sebagai berikut:

1. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

• Rumus :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time)

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$

• Pembilang

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*)

• Penyebut

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X



- Satuan Indikator
Persentase (%)
- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas/Perangkat Daerah.
- Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X}} \times 100 \%$$
- Pembilang
Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas/Perangkat Daerah.
- Penyebut
Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X
- Satuan Indikator adalah Persentase (%)

2.3 Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

Selama Tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjadi 34 (tiga puluh empat) kali kebakaran. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejumlah 34 (tiga puluh empat) kejadian kebakaran, dengan data selengkapnya sebagai berikut:



Tabel 4.32

Kejadian Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	34 Kejadian
2	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit	34 Kejadian
3	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit	34 Kejadian
4	Jumlah Keseluruhan korban jiwa kebakaran yang terdampak kebakaran	200 Jiwa
5	Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran yang berhasil dilakukan pertolongan dan penyelamatan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ciamis	200 Jiwa
6	Jumlah korban meninggal dunia	-
7	Jumlah korban yang mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya	-
8	Jumlah taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran	Rp.3.653.500.000

Pencapaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran dan Layanan Penunjang Capaian SPM adalah :

- a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:



Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) X 100 %
Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X

$$= \frac{34}{34} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas/Perangkat Daerah.

Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas/Perangkat Daerah X 100 %
Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X

$$= \frac{34}{34} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 adalah :
=100%+100% =100% (seratus persen) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.33

Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{34}{34} \times 100$	100%	Dari jumlah kejadian kebakaran 34 kejadian kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dalam rentang waktu tanggap (response time) 15 menit sejumlah 34 kejadian kebakaran

2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagai berikut :

Tabel 4.34

Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan SPM Urusan	Program/Kegiatan	Jumlah	Realisasi (Rp)
			Anggaran (Rp)	
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten	70.471.500	47.816.000



No	Jenis Pelayanan SPM Urusan	Program/Kegiatan	Jumlah	Realisasi (RP)
			Anggaran (Rp)	
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat	653.500.000	653.500.000
TOTAL ANGGARAN			723.971.500	701.316.000

2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Satpol-PP Kab. HSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.35
Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
2	3	42	1	-	12	3	-	63
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
5		35		20		3		63
Struktural					Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	3	5	9	45	9	63	

2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:



No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Masih kurangnya peralatan dan kemampuan professional personil damkar.	Memaksimalkan alat yang ada dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada personil damkar	Mengupayakan pemenuhan peralatan Damkar pada anggaran Belanja SKPD

4.5.3 Sub Urusan Bencana

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Meliputi :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - 1) penyusunan kajian risiko bencana Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 - 1) penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - 2) pembuatan rencana kontinjensi;
 - 3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - 4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - 6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) respon cepat kejadian luar biasa penyakit / *wabahzoonosis* prioritas;
 - 2) respon cepat darurat bencana;
 - 3) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - 4) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan



- 5) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Sedangkan penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai macam ancaman bencana yang di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran / Indikatornya Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Tersedianya data/Informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator: Persentase Penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.



$$\frac{\text{Persentase (\%) Penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal}}{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}} = \frac{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran / Indikatornya Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Persentase jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\frac{\text{Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} = \frac{\text{Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$$

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana. Penerima Layanan : Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.



1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Penyelesaian} \\ \text{dokumen sampai dengan} \\ \text{dinyatakan sah/legal} \end{array} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang} \\ \text{disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap} \\ \text{dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

2) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencana Rencana Kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ Penyelesaian} \\ \text{dokumen sampai dengan} \\ \text{dinyatakan sah/legal} \end{array} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen} \\ \text{yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon} \\ \text{lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana.



Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

4) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah warga negara yang ikut pelatihan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah warga negara yang mendapat layana Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$



6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.

$$\frac{\text{Persentase (\%)} \\ \text{Jumlah warga Negara} \\ \text{yang mendapat} \\ \text{peralatan}}{\text{Jumlah warga Negara yang}} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang} \\ \text{mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di} \\ \text{Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator : Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.

$$\frac{\text{Persentase (\%)} \\ \text{Kecepatan} \\ \text{respon kurang dari 24 jam} \\ \text{untuk setiap status KLB}}{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari}} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari} \\ \text{24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$$



2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam. Indikator : Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ kecepatan} \\ \text{respon kurang dari 24 jam} \\ \text{untuk setiap status darurat} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang} \\ \text{dari 24 jam untuk setiap penetapan} \\ \text{darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status} \\ \text{darurat bencana}} \times 100\%$$

3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Terlatihnya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas darurat bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ jumlah} \\ \text{petugas yang aktif} \\ \text{dalam penanganan} \\ \text{darurat bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam} \\ \text{penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam} \\ \text{penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran / Indikator Kerja Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana



Indikator : Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 4.36

Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

3.3 Realisasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan



mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sebagaimana dimaksud dibedakan atas bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Dalam tahapan Penyusunan Dokumen Kawasan Rawan Bencana sampai dengan dinyatakan sah dan legal ada **8. tahapan** capaian tahun 2021 baru sampai **6 tahap** sehingga capaian baru **75 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.37

Tahapan Penyusunan KRB

Tahapan	Uraian	Capaian
I	PERSIAPAN	Sudah
II	SURVEY	Sudah
III	WORKSHOP.SOSIALISASI KONSEP RPB	Sudah
IV	PENYUSUNAN DRAF 1 RPB	Sudah
V	DISKUSI PUBLIK	Sudah
VI	PENYUSUNAN DRAF 2 RPB	Sudah
VII	REVIEW DAN SINKRONISASI	Belum
VIII	FINALISASI DOKUMEN RPB	Belum

2) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.



Kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana adalah persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase jumlah} && \text{Jumlah penduduk dikawasan rawan} \\ & \text{penduduk dikawasan rawan} && \text{bencana yang memperoleh} \\ & \text{bencana yang memperoleh} && \text{informasi rawan bencana sesuai jenis} \\ & \text{informasi rawan bencana} && \text{ancaman bencana} \\ & \text{sesuai jenis ancaman} && = \frac{\text{Seluruh penduduk dikawasan rawan}}{\text{bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\% \\ & \text{bencana} && \\ \\ & = \frac{66.932}{66.932} \times 100 \% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Capaian realisasi kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah 66.932 orang dengan capaian 100% dengan rincian pada tabel di berikut :

Tabel 4.38

Data Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana yang Menerima Informasi Rawan Bencana Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk Menerima Informasi	Jumlah		Penduduk Di atas 17 Thn
			KK	Penddk	
1	2	3	4	5	6
1	SUNGAI RAYA	1.999	7.084	18.569	13.820
2	PADANG BATUNG	6.685	8.091	22.476	16.292
3	TELAGA LANGSAT	1.597	3.884	10.730	7.884
4	ANGKINANG	2.746	7.025	19.784	14.439



No.	Kecamatan	Penduduk Menerima Informasi	Jumlah		Penduduk Di atas 17 Thn
			KK	Penddk	
5	DAHA SELATAN	22.800	14.254	43.225	30.609
6	DAHA UTARA	14.330	10.828	33.892	23.824
7	KALUMPANG	2.397	2.470	6.796	5.001
8	LOKSADO	6.319	2.953	8.995	6.211
9	KANDANGAN	5.132	18.432	51.320	37.522
10	DAHA BARAT	1.425	2.647	8.230	5.754
11	SIMPUR	1.502	5.907	16.003	11.908
	Jumlah Total	66.932	83.575	240.020	173.264

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasarannya tersedianya dokumen tentang rencana penanggulangan bencana yang resmi sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan Capaian adalah dari **8 tahapan** proses penyusunan PRB baru sampai **6 tahap** sehingga capaian baru **75 %** sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.39
Tahapan Penyusunan RPB

Tahapan	Uraian	Capaian
I	PERSIAPAN	Sudah
II	SURVEY	Sudah
III	WORKSHOP.SOSIALISASI KONSEP RPB	Sudah
IV	PENYUSUNAN DRAF 1 RPB	Sudah
V	DISKUSI PUBLIK	Sudah
VI	PENYUSUNAN DRAF 2 RPB	Sudah
VII	REVIEW DAN SINKRONISASI	Belum
VIII	FINALISASI DOKUMEN RPB	Belum

- 2) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
Sasarannya tersedianya dokumen tentang rencana kontijensi (Renkon) yang resmi sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan Capaian : dari **8 tahapan** proses penyusunan PRB baru sampai **6 tahap** sehingga capaian baru **75 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.40
Tahapan Penyusunan Rekon

Tahapan	Uraian	Capaian
I	PERSIAPAN	Sudah
II	SURVEY	Sudah
III	WORKSHOP/SOSIALISASI	Sudah
IV	PENYUSUNAN DRAFT 1 RPB	Sudah
V	DISKUSI PUBLIK	Sudah
VI	PENYUSUNAN DRAF 2 RPB	Sudah



Tahapan	Uraian	Capaian
VII	REVIEW DAN SINKRONISASI	Belum
VIII	FINALISASI DOKUMEN RPB	Belum

- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
- 4) Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Sasaran Tersedianya Layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase (\%)} \text{ jumlah} & & \text{Jumlah warga Negara yang mendapat} \\ & \text{warga negara yang} & & \text{layanan Pusdalops} \\ & \text{mendapat layana Pusdalops} & = & \frac{\text{Jumlah warga negara yang berada di}}{\text{Kawasan rawan bencana}} & \times 100\% \\ & \text{penanggulangan bencana} & & & \\ & \text{dan sarana prasarana} & & & \\ & \text{penanggulangan bencana} & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{173.264}{173.264} \times 100 \% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Capaian realisasi kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah 100%

- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Sasaran Tersedianya Layanan peralatan perlindungan penanggulangan bencana. Dengan rumus capaian perhitungan sebagai berikut: Jumlah warga yang



mendapat layanan peralatan perlindungan di bagi jumla warga yang berada di kawasan rawan bencana.

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat peralatan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\% \\ &= \frac{173.264}{173.264} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian realisasi kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah 173.264 orang dengan capaian 100% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.41

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Layanan			
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pusdalop	Peralatan Perlindungan	Penyelamatan dan Evakuasi
1	2	4		5	6
1	SUNGAI RAYA	13,820	13,820	13,820	13,820
2	PADANG BATUNG	16,292	16,292	16,292	16,292
3	TELAGA LANGSAT	7,884	7,884	7,884	7,884
4	ANGKINANG	14,439	14,439	14,439	14,439
5	DAHA SELATAN	30,609	30,609	30,609	30,609
6	DAHA UTARA	23,824	23,824	23,824	23,824



No.	Kecamatan	Jenis Layanan			
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pusdalop	Peralatan Perlindungan	Penyelamatan dan Evakuasi
7	KALUMPANG	5,001	5,001	5,001	5,001
8	LOKSADO	6,211	6,211	6,211	6,211
9	KANDANGAN	37,522	37,522	37,522	37,522
10	DAHA BARAT	5,754	5,754	5,754	5,754
11	SIMPUR	11,908	11,908	11,908	11,908
Jumlah Total		173,264	173,264	173,264	173,264

3. Realisasi Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator pencapaian SPM penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan segera pada saat kejadian bencana. Untuk tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat kejadian bencana Longsor di tambang batu gunung di desa pagat batu kecamatan padang batung terdapat / ada 4 (empat) orang korban jiwa. Seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi, sehingga capaian realisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2021 adalah 100%.

Dengan demikian, Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.42

Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{66.932}{66.932} \times 100$	100%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{173.264}{173.264} \times 100$	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{4}{4} \times 100$	100%

3.4 Alokasi Anggaran

Rincian Anggaran dan realisasi kegiatan yang mendukung jenis SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Sub Urusan Bencana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.43

Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan SPM Urusan Trantibumlinmas	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		



No	Jenis Pelayanan SPM Urusan Trantibumlinmas	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	20.000.000	5.290.000
		Pengendalian operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	70.122.554	63.826.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	75.750.00	75.637.000
		Pengelolaan risiko bencana	39.400.00	37.440.000
		Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	208.562.500	194.064.000
		Penanganan Pascabencana kabupaten	4.320.000	4.260.000
		Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	31.500.000	31.500.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat darurat Bencana	396.500.000	216.812.500
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	5.200.000	2.500.000
		Penyediaan logistik Kebencanaan	91.082.345	82.500.000
TOTAL ANGGARAN			942.792.399	713.829.000

3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada BPBD Kesbangpol Kab. HSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.44

Personil Badan Penanggulangan Bencana Kab.HSS Tahun 2021

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	1	6	1	-	3	-	-	11
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		6		4		1		11
Struktural					Fungsional			
Eselon	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah	Tertentu	Umum	Jumlah	
-	-	1	2	3	-	5	11	

3.5 Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Belum maksimalnya koordinasi yang terintegritas antar instansi.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Adanya lokasi bencana yang sulit di jangkau, sehingga memperlambat bantuan bencana kepada masyarakat.

▪ Solusi

1. Akan lebih memaksimalkan anggaran pada komponen penerapan SPM.
2. Melakukan dan membangun relationship dengan elemen terkait.
4. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2022.



4.6. Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah



tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/ suami dan anaknya.
3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali



kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS dan DTKS;

Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.45

Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Data Eksisting Tahun 2021	Keterangan
1	Disabilitas Terlantar	353	
2	Anak Terlantar	738	
3	Lansia Terlantar	1350	



No	Jenis PMKS	Data Eksisting Tahun 2021	Keterangan
4	Gelandangan dan Pengemis	21	
5	Data Korban Bencana	4270	

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.HSS

Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial adalah yang melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS di lapangan terdiri dari; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 11 orang yang berada di 11 Kecamatan se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 4.46

Program dan Kegiatan Urusan Sosial
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan darurat dan	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Pemberian nutrisi
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan sekolah
		5. Penyediaan Alat Bantu		Kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ketiak, alat komunikasi
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan	kejadian luar biasa; c. Penyuluhan dan	Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pembinaan Bagi PMKS ; d. Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Orang dengan Kecacatan Berat.	Fasilitasi ke Balai rehabilitasi
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluarga Penyandang disabilitas terlantar		Peningkatan Kapasitas keluarga ODKB
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		Kerjasama dengan Disdukcapil
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan LTPKD
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		
		13. Layanan rujukan		
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan: a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Pemberian nutrisi
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan sekolah
		5. Penyediaan Alat Bantu		Bahan-bahan pelatihan
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Pelatihan keterampilan dan PBK Anak Terlantar
		8. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar		-
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		Kerjasama dengan Disdukcapil
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan LTPKD
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK
		13. Layanan Rujukan		Fasilitasi bersama Sakti Peksos
3.	Rehabilitasi sosial dasar	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
	Lanjutan Usia Terlantar di luar Panti	2. Layanan kedaruratan	Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan; sosial bagi PMKS; b. Penyuluhan dan Pembinaan Bagi PMKS.	Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Pemberian nutrisi, Home Care
		4. Penyediaan sandang		Home Care
		5. Penyediaan Alat Bantu		Kursi roda, alat bantu dengar, tongkat ketiak, alat komunikasi
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Pelayanan Home Care
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluargaPenyandang disabilitas terlantar		Pelayanan Home Care
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		Kerjasama dengan Disdukcapil
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan LTPKD
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Pelayanan Home Care
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Pelayanan Home Care
		13. Layanan rujukan		Pelayanan Home Care
		4.		Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama sakti peksos
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama sakti peksos
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan: a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa.	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Sembako
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan laki dan perempuan
		5. Penyediaan Alat Bantu		Perlengkapan kebencanaan
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Kerjasama dengan Puskesmas/RSU
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Refungsionalisasi pasca bencana
		8. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga yang terkena bencana		Refungsionalisasi fisik, mental dan sosial pasca bencana
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		Kerjasama dengan Disdukcapil
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan LTPKD
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber

Tabel 4.47

Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

4.6.3 Realisasi

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti

Realisasi capaian rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.48

Realisasi Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	353	353	100%
2	Penyediaan Permakanan	312	312	100%
3	Penyediaan Sandang	17	17	100%



No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
4	Penyediaan Alat Bantu	38	38	100%
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	17	17	100%
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental , Spritual dan Sosial	10	10	100%
7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar	9	9	100%
8	Akses le Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	9	9	100%
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3	3	100%
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	3	3	100%
11	Layanan Rujukan	9	9	100%
12	Layanan Data Pengaduan	9	9	100%
13	Penyediaan Layanan Kedaruratan bagi Daerah yang belum memiliki kendaraan Khusus layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan tidak mampu melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	100%
Jumlah		353	353	100%

- 1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar pada Tahun 2021 sebanyak 353 orang;
- 2) Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial luar panti sebanyak 353 orang.



3) Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti} = \frac{\text{Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi seosial dasar di luar panti}} \times 100\% \\
 & = \frac{353}{353} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, capaian jumlah penyandang disabilitas terlantar pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

b. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti

Realisasi capaian rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.49

Realisasi Anak Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	738	738	100%
2	Layanan Data Pengaduan	15	15	100%
3	Penyediaan Permakanan	518	518	100%
4	Penyediaan Sandang	25	25	100%
5	Penyediaan Alat Bantu	11	11	100%



No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
6	Pemberian Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	15	15	100%
7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak terlantar	220	220	100%
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	220	220	100%
9	Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	5	5	100%
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	5	100%
11	Layanan Rujukan	63	63	100%
12	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang belum memiliki kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan Baru	1	1	100%
Jumlah		738	738	100%

- 1) Jumlah Anak Terlantar pada Tahun 2021 sebanyak 738 orang;
- 2) Jumlah Pengiriman Anak Remaja ke PSBR pada Tahun 2021 sebanyak 39 orang;



3) Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Anak} && \text{Jumlah Anak Terlantar yang} \\
 & \text{Terlantar yang} && \text{mendapatkan pelayanan} \\
 & \text{mendapatkan pelayanan} &= & \text{rehabilitasi social di luar panti} && \text{X 100\%} \\
 & \text{rehabilitasi sosial di luar} && \text{Populasi Anak Terlantar di} \\
 & \text{panti} && \text{Daerah Kabupaten yang} \\
 & && \text{membutuhkan rehabilitasi seosial} \\
 & && \text{dasar di luar panti} \\
 \\
 & = \frac{738}{738} \times 100 \% \\
 \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Anak Terlantar diluar Panti pada tahun 2021 adalah sebanyak 738 orang, Jumlah pengiriman anak remaja ke PSBR pada tahun 2021 sebanyak 39 orang dan jumlah jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tahun 2021 adalah 738 orang dengan capaian sebesar 100%.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Realisasi capaian rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.50

Realisasi Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
1.	Rehabiliasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1350	1350	100%
	Layanan Data Pengaduan	7	1	100%



No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
	Penyediaan Permakanan	1350	1350	100%
	Penyediaan Alat Bantu	29	29	100%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	7	7	100%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100	100	100%
	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	7	7	100%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7	7	100%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7	7	100%
	Layanan Rujukan	7	7	100%
	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang belum memiliki Kendaraan Khusus layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan	1	1	100%



No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
	baru dan Pembiayaan pemeliharaan			
Jumlah		1350	1350	100%

- 1) Target Tahunan Tahun 2021 sebanyak 1350 orang
 Realisasi capaian Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar 1350 paket.

2) Perhitungan :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti} \\ & = \frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Populasi Lansia Terlantar di Daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \frac{1350}{1350} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah lanjut Usia Terlantar diluar panti sosial tahun 2021 adalah 1350 orang dan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tahun 2021 adalah 1350 orang dengan capaian sebesar 100%.

d. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti

Realisasi capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 4.51
Realisasi Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	21	21	100%
	Layanan Data dan Pengaduan	21	21	100%
	Penyediaan Permakanan	21	21	100%
	Penyediaan Sandang	21	21	100%
	Penyediaan Alat Bantu	1	1	100%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	21	21	100%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21	21	100%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21	21	100%
	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang belum memiliki kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti dan tidak mampu	1	1	100%



No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
	melakukan pengadaan kendaraan Baru			
	Jumlah	21	21	100%

- 1) Jumlah Gelandangan dan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya pada Tahun 2021 ada 21 orang;
- 2) Jumlah pemulangan warga terlantar ke Daerah asal pada Tahun 2021 ada 21 orang;
- 3) Jumlah Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapat Pelayan Rehabilitasi Sosial Dasar sebanyak 21 orang
- 4) Perhitungan :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase gelandangan dan pengemis yang} \\ & \text{mendapatkan Pelayanan rehabilitasi social di luar} \\ & \text{panti} \\ & = \frac{\text{Jumlah Gelandangan dan pengemis yang} \\ & \text{mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di} \\ & \text{luar panti}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah} \\ & \text{Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi} \\ & \text{social dasar di luar panti}} \times 100\% \\ & = \frac{1350}{1350} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti sosial pada Tahun 2021 adalah sebanyak 21 orang dan Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang terlayani pada tahun 2021 adalah 21 orang dengan capaian sebesar 100%.



e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Realisasi capaian perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.52

Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian
1.	Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	4270	4270	100%
	Penyediaan Permakanan	4270	4270	100%
	Penyediaan Sandang	207	207	100%
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	1	100%
	Penangan Khusus Bagi Kelompok Rentan	17	17	100%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	207	207	100%
Jumlah		4270	4270	100%

- 1) Jumlah Gelandangan dan Pengemis dan Penyakit Sosial Lainnya pada Tahun 2021 ada 21 orang;
- 2) Jumlah pemulangan warga terlantar ke Daerah asal pada



Tahun 2021 ada 21 orang;

- 3) Jumlah Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapat Pelayan Rehabilitasi Sosial Dasar sebanyak 21 orang
- 4) Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Pelayanan rehabilitasi social di luar panti} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\% \\
 & = \frac{4270}{4270} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah korban bencana pada Tahun 2021 adalah 4270 orang dan jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota tahun 2021 adalah 4270 orang dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi Pencapaian Target SPM Urusan Sosial pada Tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.53
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{353}{353} \times 100$	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{738}{738} \times 100$	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{1350}{1350} \times 100$	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	$\frac{21}{21} \times 100$	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{4270}{4270} \times 100$	100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 4.54

Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3		5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Penyediaan Alat Bantu 2. Layanan Kedaruratan 3. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	101.502.200 46.600.000 4.600.000 50.302.200	85.827.200 46.600.000 2.650.000 36.577.200
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar 2. Penyediaan Permakanan 3. Rujukan Anak-anak Terlantar 4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial	3.134.519.600 174.525.000 2.959.994.600 639.288.500 103.900.000	2.944.699.600 99.175.000 2.845.542.600 300.791.500 97.740.000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3		5
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program pelayanan dan rehabulitasi kesejahteraan sosial 1. Penyediaan Permakanan 2. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	5.946.497.900 5.897.272.900 49.225.000	2.769.886.900 2.744.536.900 25.350.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Layanan Kedaruratan 2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	41.960.000 33.050.000 8.910.000	24.940.000 16.030.000 24.940.000
5	Perlindungan Dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana 1. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga Bencana	484.449.800	458.414.000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3		5
Jumlah			10.452.118.000	6.682.299.200

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.55
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	11	2	-	10	2	-	25
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		5		16		4		25
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	4	8	13	12		25	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Penyediaan Data dilakukan melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil (PSKS) yang dikumpulkan oleh Tenaga Keejahteraan Sosial Kecamatan belum terdata untuk tahun 2021
2. Perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan menyesuaikan persediaan



bantuan tanggap darurat bencana yang masih ada pada stock opname. Untuk penyediaan sandang pada tahun 2021 belum diakomodir dengan APBD Kabupaten karena adanya barang bantuan tanggap darurat dari Kementerian Sosial

3. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan memaksimalkan pagu anggaran daerah yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan SPM khususnya dibidang sosial, proses perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum berfokus pada target sasaran SPM dan indikator SPM atau dengan kata lain masih bersifat umum dan tidak terfokus sehingga belum semua kebutuhan untuk pemenuhan SPM dapat dianggarkan. Pada tahun selanjutnya akan kami fokuskan secara khusus perencanaan dan penganggaran terkait SPM melalui matrik perencanaan yang kami buat sehingga KPM dapat terlayani dengan baik dan maksimal. Kesulitan ini adalah dampak dari masa transisi dan penyesuaian terhadap Permendagri 90, kami terus berupaya agar pemetaan dan sinkronisasi kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
4. Belum adanya kendaraan khusus roda empat (operasional) untuk layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti.
5. Untuk tahun anggaran 2021 terjadi kesalahan pemetaan kegiatan khusus terkait penanganan bencana sehingga belum dapat dilakukan entry pada capaian realisasi kegiatan SPM pada aplikasi sesuai dengan indikator SPM yang seharusnya. Namun pelaksanaan SPM bidang Sosial



khususnya penanganan bencana tetap terlaksana dengan baik. Untuk indikator SPM yang masih 0% karena tidak adanya penganggaran ataupun perencanaan maka akan terus kami lakukan evaluasi demi perbaikan layanan SPM khususnya bidang Sosia pada Dinas Sosial. Dan untuk Pagu dan Realisasi Anggaran pada pelaksanaan SPM tahun 2021 belum terpilah spesifik berdasarkan Bidang SPM yang ditangani dan hal ini tentu akan kami perbaiki ditahun-tahun mendatang.

▪ **Solusi**

1. Melakukan perbaikan dengan melakukan pengumpulan data terkait PPKS yang menjadi target layanan SPM pada tahun 2022
2. Perlu dianggarkan untuk pembelian kendaraan Roda empat untuk Rehabilitasi di laur Panti



BAB V

KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 ini merupakan manifestasi laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Uraian yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak di semua sektor. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pertanian, pariwisata dan UMKM serta industri. Sektor-sektor inilah yang salah satunya menjadi *point policy brief* dalam hal pemulihan ekonomi daerah. Alhamdulillah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inovasi Daerah yang merupakan salah satu unsur dari Indeks Daya Saing Daerah, tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 61,83 (Kategori Sangat Inovatif) dan Kembali masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif secara Nasional *di Innovative Government Award 2021*.

LPPD yang disampaikan ini telah menyajikan seluruh pelaksanaan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan



pemerintah daerah baik itu urusan wajib pelayanan Dasar (SPM), urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan serta capaian kinerja makro serta indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* dan *Output* sebagai capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021, secara umum seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian, masih perlu upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kedepan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.